

TESIS

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI KANTOR BUPATI MAROS**

**IMPLEMENTATION of REGIONAL REGULATION of MAROS
REGENCY NUMBER 11 of 2014 CONCERNING NO SMOKING AREA
in THE REGENT'S OFFICE in MAROS**

ASRUL ARIF

K012171155



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI KANTOR BUPATI MAROS**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Kesehatan Masyarakat

Disusun dan diajukan oleh:

ASRUL ARIF

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

TESIS

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI KANTOR BUPATI MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

ASRUL ARIF
Nomor Pokok : K012171155

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 9 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M. Sc

Ketua



Prof. Dr. dr. M. Alimin Maidin, MPH

Anggota

Ketua Program Studi
Kesehatan Masyarakat



Dr. Masni, Apt., MSPH

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asrul Arif

Nomor Pokok : K012171155

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Asrul Arif

P R A K A T A

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, Maha Suci ALLAH, SWT yang atas karunia ilmu, kesehatan dan kesempatan-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat penulis selesaikan pada waktunya. Tak lupa shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pembawa kebenaran, teladan ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, STW, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan tesis ini. Keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam tesis ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Namun dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis memberanikan diri mempersembahkan tesis ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan selama ini.

Penyusunan tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Terima kasih tak terhingga untuk isteri tercinta NURUL MUTHMAINNAH, SKM, M.Kes dan kedua anakku tersayang MUHAMMAD DAFFA IZZ ATHARI DAN MUHAMMAD DZAKY AZZAHIDI, atas cinta, kasih sayang, kesabaran, motivasi dan do'a tulus yang tak putus, yang menghantarkan penulis hingga sampai ke tahap ini. Terima kasih yang tidak terhingga untuk yang sangat penulis muliakan, kedua orang tua saya Ibu Hj. Siswati P. Dahlan dan Bapak H. Muh. Arif Halil, SPd, atas do'a dan dukungannya, untuk semua spirit, bantuan moril, materil dan spritual yang

ihklas. Kepada adik-adikku tercinta beserta adik ipar, Ilham dan Tika, Asrah, Asmah dan Ilham, terima kasih atas semua dukungan, doa dan bantuan materil selama penulis menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis haturkan kepada Bapak Dr. Ridwan Mochtar Thaha, MSc sebagai ketua komisi penasihat dan Bapak Prof. Dr. dr. Alimin Maidin, MPH sebagai anggota komisi penasihat yang senantiasa memberikan arahan, dorongan dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewan penguji yang terhormat atas masukan, saran dan koreksinya dalam pembuatan tesis ini yakni, Ibu Dr. Suriah, SKM, M.Kes., Ibu Rahayu Indriasari, SKM, MPH, Ph.D dan Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed. Semoga apa yang diberikan akan dibalas oleh yang Maha Kuasa dengan limpahan rahmat dan karuniaNya.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dekan FKM UNHAS Periode 2014-2018, Prof. Dr. drg. A. Zulkifli, M.Kes dan Dekan FKM UNHAS Periode 2018-2022, Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed
2. Bapak Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc. Selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Periode 2015-2019 dan Ibu Dr. Masni, Apt, MSPH selakuk Ketua Program Studi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin

Periode 2019-2023 atas petunjuk dan arahan kepada penulis selama masa pendidikan.

3. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin atas ilmu berharga, bimbingan, dan segala bantuan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Kepada para ibu/bapak pegawai di Kantor Bupati Maros yang bersedia menjadi responden/informan dalam bekerjasama dan memberikan waktunya selama proses penyusunan tesis ini.
5. Kepada Bapak Bupati/Wakil Bupati Maros dan seluruh staf, terima kasih atas seluruh bantuannya dalam membantu kelancaran selama penelitian.
6. Teman-teman terbaikku mahasiswa magister jurusan Promosi Kesehatan angkatan 2017 (Bu Eka, Bu Imah, Bu Jily, Bu Nova, Bu Orpa, Bu Ocha, Mami Violend, Uwya, Echi, Ukhti Heny, Aya, Yuyun, Haelvy, Rezi, Sutri, Nana, Pak Rudi dan Pak Joni) atas kebersamaan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada saudara dan sahabatku, Kak Sahran Sukur, S.Kom dan Kak Dian, terima kasih atas bantuan, motivasi, fasilitas dan doa selama penulis melaksanakan penelitian di Kantor Bupati Maros.
8. Kepada keluarga dan kerabat serta sahabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya.

Semoga tesis ini memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya... Robbal Aalamiin.

Wassalam

Makassar, 9 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

ASRUL ARIF. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros (dibimbing oleh **Ridwan M. Thaha** dan **Alimin Maidin**).

Salah satu penyebab masalah kesehatan di Indonesia adalah perilaku merokok. Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan komponen utama kebijakan pengendalian tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros berdasarkan variabel implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Penelitian menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Sebagai data pendukung dilakukan wawancara mendalam. Sampel berjumlah 188 orang dari 196 populasi dan informan 10 orang. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji *chi square* untuk data kuantitatif dan penyajian data emik, data etik dan penarikan kesimpulan untuk data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berhubungan dengan implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros adalah disposisi (p value = 0,040), sedangkan variabel lainnya yaitu komunikasi (p value = 0,145), sumber daya (p value = 0,716) dan struktur birokrasi (p value = 0,891) menunjukkan tidak ada hubungan terhadap implementasi kebijakan KTR. Setelah analisis diketahui bahwa 56,9% responden menyatakan implementasi KTR di Kantor Bupati Maros berhasil. Hasil wawancara mendalam menunjukkan pada umumnya informan menilai implementasi kebijakan KTR berhasil. Namun penerapan sanksi belum pernah diterapkan, maka diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Maros lebih tegas menerapkan sanksi bagi pegawai yang melanggar kebijakan KTR.

Kata Kunci : Kawasan tanpa rokok, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

ABSTRACT

ASRUL ARIF. Implementation of Regional Regulation of Maros Regency Number 11 of 2014 Concerning No Smoking Area in The Regent's Office in Maros (supervised by **Ridwan M. Thaha** and **Alimin Maidin**).

One of the causes of health problems in Indonesia is smoking behavior. Establishing a No Smoking Area (KTR) is a major component of tobacco control policies. This study aims to analyze the implementation of Maros Regency Regulation No. 11 of 2014 concerning No-Smoking Areas in the Maros Regent's Office based on George C. Edwards III's policy implementation variables.

The study used descriptive analytic design with cross sectional study approach. As supporting data, in-depth interviews were conducted. The sample consisted of 188 people from 196 populations and 10 informants. Data obtained through questionnaires and in-depth interviews. Data analysis was performed univariately and bivariately with chi square test for quantitative data and presentation of emic data, ethical data and conclusion drawing for qualitative data.

The results showed that variables related to the implementation of KTR policy in Maros Regent's Office were disposition (p value = 0.040), while the other variables were communication (p value = 0.145), resources (p value = 0.716) and bureaucratic structure (p value = 0.891) shows no relationship to the implementation of KTR policy. After analysis it was found that 56.9% of respondents stated that the implementation of KTR in the Maros Regent's Office was successful. The results of in-depth interviews showed that informants generally considered the KTR policy implementation to be successful. However, the application of sanctions has never been applied, it is expected that the Government of Maros Regency will more firmly apply sanctions for employees who violate KTR policies.

Keywords: Non-smoking area, communication, resources, disposition, bureaucratic structure.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR MATRIKS	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ARTI SINGKATAN DAN ISTILAH	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
1. Tujuan Umum	11
2. Tujuan Khusus	11
D. Manfaat Penelitian	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Perilaku Merokok	13
B. Tinjauan Umum tentang Kawasan Tanpa Rokok	16
C. Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan	22
D. Tinjauan Umum tentang Komunikasi	26
E. Tinjauan Umum tentang Sumber Daya	32
F. Tinjauan Umum tentang Disposisi	36
G. Tinjauan Umum tentang Sumber Daya	38
H. Sintesis Penelitian	42
I. Kerangka Teori	47
J. Kerangka Konsep	52
K. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	52
L. Hipotesis	62
BAB III. METODE PENELITIAN	64
A. Rancangan Penelitian	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	64
C. Populasi dan Sampel	64
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	68
F. Keabsahan Data	71
G. Penyajian Data	71

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Hasil Penelitian	72
B. Pembahasan	119
C. Keterbatasan Penelitian	144
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	145
A. KESIMPULAN	145
B. SARAN	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	154

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	75
Tabel 4.2	Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	76
Tabel 4.3	Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	78
Tabel 4.4	Disposisi dalam Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	79
Tabel 4.5	Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	80
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Penilaian terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	82
Tabel 4.7	Hubungan Tingkat Pendidikan Responden terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	83
Tabel 4.8	Hubungan Transmisi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	84
Tabel 4.9	Hubungan Kejelasan Informasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	85
Tabel 4.10	Hubungan Konsistensi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	86
Tabel 4.11	Hubungan Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	87

Tabel 4.12	Hubungan Staf terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	88
Tabel 4.13	Hubungan Informasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	89
Tabel 4.14	Hubungan Wewenang terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	90
Tabel 4.15	Hubungan Fasilitas terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	91
Tabel 4.16	Hubungan Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	92
Tabel 4.17	Hubungan Sikap Responden terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	93
Tabel 4.18	Hubungan Dukungan Pimpinan terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	94
Tabel 4.19	Hubungan Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	95
Tabel 4.20	Hubungan Standar Operasional Prosedur terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	96
Tabel 4.21	Hubungan Fragmentasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	97
Tabel 4.22	Hubungan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019	98
Tabel 4.23	Karakteristik Informan Penelitian Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Th 2019	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Pendekatan Implementasi menurut George C. Edward III	47
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian	52

DAFTAR MATRIKS

	Halaman
Matriks 2.1 Sintesis Penelitian Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	42
Matriks 4.1 Matriks Hasil Penelitian	118
Matriks 4.2 Matriks Pedoman Observasi	142

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Informed Consent
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Check List / Pedoman Observasi
- Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 6 Output Analisis
- Lampiran 7 Master Tabel Penelitian
- Lampiran 8 Matriks Analisis Isi Informan
- Lampiran 9 Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran 10 Izin Penelitian dari FKM UH
- Lampiran 11 Izin Penelitian dari BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 12 Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Maros
- Lampiran 13 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014
Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Lampiran 14 Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ARTI SINGKATAN DAN ISTILAH

Singkatan	Keterangan
FCTC	Framework Convention of Tobacco Control
KTR	Kawasan Tanpa Rokok
MoU	Memorandum of Understanding
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	Sumber Daya Alam
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	Standard Operating Procedure
WHO	World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab dan membuat aturan hukum yang mengatur dan melindungi masyarakat agar terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk bagi masyarakat miskin (Maidin, 2016).

Salah satu penyebab masalah kesehatan adalah merokok. Perilaku merokok merupakan perilaku yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang merokok tetapi juga bagi orang-orang di sekitar perokok yang ikut menghirup asap rokok. Rokok dapat membuat lingkungan sekitar kita

menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan, sehingga akan menimbulkan kerugian baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi (Azmi, 2016).

Saat sebatang rokok terbakar maka asapnya menguraikan sekitar 4.000 bahan kimia terutama nikotin dan tar yang merupakan racun utama yang paling berbahaya bagi kesehatan tubuh (Kemenkes, 2011). Sudah banyak sosialisasi tentang bahaya kandungan rokok seperti dapat menyebabkan katarak dan kebutaan, kanker mulut, periodontitis, kanker paru-paru, pneumonia, bronkhitis, asma, batuk kronis, kanker perut dan lambung, kanker ginjal, kanker pankreas, kanker kandung kemih, tulang rapuh dan leukimia (Armayati, 2014). Tingginya jumlah perokok di Indonesia turut meningkatkan jumlah pasien penyakit tidak menular (71%) seperti jantung, stroke, kanker, diabetes, dan gagal ginjal. Penyakit tidak menular ini telah menjadi penyebab utama kematian di Indonesia dan merupakan 5 penyakit dengan biaya rawat inap tertinggi yaitu mencapai Rp. 2,1 Trilyun (Profil Kesehatan Indonesia, 2017).

Penggunaan tembakau mengalami peningkatan di Negara berkembang (Demir et al., 2015), di mana Indonesia juga berada di dalamnya. Data *Sustainable Development Goals (SDGs)* menunjukkan bahwa jumlah perokok di Indonesia menempati posisi tiga besar di dunia setelah China dan India. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan prevalensi perokok laki-laki dewasa

paling tinggi didunia, yaitu sebesar 68,8%. Perokok usia muda juga tidak boleh diabaikan, dimana partisipasi remaja Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat partisipasi remaja dunia, yaitu sebesar 24,10 % dan 21,44 % (WHO, 2017).

Secara nasional perilaku merokok penduduk 15 tahun keatas masih fluktuatif dari tahun 2013 sebesar 36,3%, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 33,8% (Riskesdas, 2018). Perokok laki-laki sebesar 64,9% dan perokok perempuan sebesar 4,8% masih menghisap rokok tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Ini menunjukkan tingginya prevalensi penduduk Indonesia berumur 15 tahun keatas yang merokok setiap hari. Jumlah seluruh perokok di Indonesia diperkirakan lebih dari 90 juta orang atau sebanyak 64,9% pria di Indonesia merokok. Dengan kata lain, dua dari tiga laki-laki usia di atas 15 tahun di Indonesia adalah perokok. Menurut hasil laporan Riskesdas 2018, perilaku merokok penduduk umur ≥ 10 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 25,91%. Sedangkan secara nasional perilaku merokok penduduk umur ≥ 10 tahun keatas adalah 28,8% (Riskesdas Sulsel, 2018).

Perilaku merokok di wilayah Kabupaten Maros berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros pada Tahun 2018 adalah sebesar 54,28% keluarga yang memiliki anggota keluarga yang merokok. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok di Kabupaten Maros masih tergolong tinggi yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018).

Perilaku merokok menjadi penyebab utama tingginya angka morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia (Rozema et al., 2016); (Ye et al., 2015). Dikatakan demikian karena setiap tahun lebih kurang 5,4 juta jiwa meninggal karena penyakit akibat penggunaan tembakau (Faber et al., 2016), (Demir et al., 2015), (Been et al., 2014). Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, bahkan akan melebihi 8 juta jiwa pada tahun 2030, di mana sebesar 80% kematian terjadi di negara dengan pendapatan rendah dan menengah (Berg et al., 2016).

Penggunaan tembakau tidak hanya memberikan dampak negatif kepada para penggunanya sendiri, dalam hal ini perokok aktif, akan tetapi juga bagi orang yang berada disekitarnya atau yang biasa disebut dengan perokok pasif. Perokok pasif saat ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia (Berg et al., 2016), (Intarut et al, 2016). Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat 600.000 kematian atau sekitar 1% kematian terjadi pada para perokok pasif di seluruh dunia (Ravara et al, 2013).

Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak menandatangani perjanjian kerjasama *Framework Convention of Tobacco Control* (FCTC), sehingga tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melarang atau mengendalikan peredaran rokok di negaranya (Hakam, 2015). Namun demikian, pemerintah juga berusaha untuk melindungi warganya dari paparan asap rokok. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan yang melarang kegiatan merokok di tempat umum. Atas dasar

inilah maka upaya perlindungan perlu dilakukan oleh negara. Selain memberikan pendidikan kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok, maka salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting adalah adanya kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa asap rokok.

Saat ini peraturan mengenai penggunaan tembakau di Indonesia tersedia dalam bentuk Peraturan Daerah. Sebanyak 309 kabupaten/kota (60,1%) dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia telah menerapkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini dilihat pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 115 ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum adalah Kawasan Tanpa Rokok, serta pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari pada perilaku supir angkutan kota di Makassar menunjukkan sebagian responden mengetahui mengenai Kawasan Tanpa Rokok (58,8%), angkutan umum sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (51,2%) (Fatmasari, 2015). Sedangkan penelitian Sitanggang pada RSUD Kabanjahe dan Muliku di RSUD Monginsidi Manado menunjukkan bahwa kurangnya komitmen dan kepatuhan direktur rumah sakit dan jajarannya serta pemberian sanksi

yang tidak tegas menyebabkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak berhasil (Sitanggang et al, 2018), (Muliku et al, 2016).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Argentina yang menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum maksimal karena penerapan undang-undang pengendalian tembakau belum diterapkan secara komprehensif seperti belum dibatasinya larangan iklan dan promosi rokok, serta harga rokok masih terjangkau. Oleh karena itu, masih dibutuhkan advokasi yang kuat pada dewan eksekutif untuk menerapkan undang-undang pengendalian tembakau secara komprehensif (Konfino et al, 2014). Penelitian di Brazil dan Australia menunjukkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) karena di area yang ditetapkan sebagai area bebas asap rokok masih disediakan ruangan khusus untuk merokok, di mana asap rokok masih dapat menyebar di area sekitar dan dirasakan oleh perokok pasif (Thomas & Richmond, 2017), (Almeida et al, 2012).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat membawa dampak positif, di antaranya: pengurangan paparan asap rokok (Yang et al., 2018), (Macnaughton et al., 2017), (Sureda et al., 2015). Kesadaran dan dukungan aturan Kawasan Tanpa Rokok (Peruga et al, 2018), (Qureshi & Kania, 2018), (Weishaar et al., 2016), (Jancey et al., 2014). Berkurangnya gejala pernapasan dan turunnya kejadian serangan jantung (Barnoya & Navasacien, 2013), (Burns et al., 2013). Peningkatan jumlah perokok yang ingin

berhenti (Feliu et al., 2019), (Kang & IlCho, 2018), (Burns et al., 2013). Membatasi pemasaran, menaikkan bea cukai dan harga rokok (Lando et al., 2018), (Mistry et al., 2018), (Ross et al., 2018), (Weishaar et al., 2016),

Sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Maros membuat Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mengatur tentang kawasan atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, dan merupakan salah satu produk kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut adalah bupati, pejabat pemerintah, pegawai, dan masyarakat. Pihak-pihak inilah yang ikut mengambil peran dalam implementasi kebijakan ini. Tanpa keterlibatan mereka maka implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak akan berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pasal 10 ayat 1 berbunyi : "Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 (poin b) yang meliputi perkantoran pemerintah dan swasta, serta industri, kecuali pada tempat khusus merokok" Peraturan ini juga memuat kewajiban bagi penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk memasang tanda peringatan larangan merokok dan wajib menegur orang yang melanggar peraturan daerah ini. Hal ini terdapat pada pasal 7 ayat 1 dan 4. Pada kenyataannya, aturan ini hanya dilaksanakan

sebagian, yaitu memang ada tanda atau peringatan larangan merokok di Kantor Bupati Maros, namun masih banyak pegawai dan masyarakat yang datang untuk mengurus keperluannya masih berperilaku merokok dan tidak ada yang melarangnya. Kenyataan ini tentunya menghadirkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Mengapa kebijakan yang telah ditetapkan dan disahkan sejak empat tahun lalu kemudian tidak memiliki kekuatan pada proses implementasinya.

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan (Indiahono, 2009). Salah satu model implementasi kebijakan dikembangkan oleh George C. Edward III. Beliau menamakan model implementasi kebijakannya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini, ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Suratman, 2017), yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan penyampaian ide, gagasan, peraturan dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila mereka yang menjadi pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya di sini meliputi manusia sebagai pelaksana kebijakan dan sumber daya pendukung seperti kecakapan, informasi, sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan, maka akan dilaksanakan dengan senang hati, tapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan bermasalah. Selain itu dukungan pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program dan tujuan secara efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan struktur birokrasi. Ada dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur kerja baku standar atau *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. SOP atau petunjuk pelaksanaan dapat memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan fragmentasi lebih kepada penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi kebijakan ini tentu dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhinya. Begitu juga dengan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Keberhasilan dari implementasi kebijakan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Apabila menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III, maka implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh empat faktor, di antaranya adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk menganalisis hubungan komunikasi ditinjau dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

b. Untuk menganalisis hubungan sumber daya ditinjau dari aspek staf, informasi, wewenang, dan fasilitas terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

- c. Untuk menganalisis hubungan disposisi ditinjau dari aspek sikap dan dukungan pimpinan terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- d. Untuk menganalisis hubungan struktur birokrasi ditinjau dari aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Manfaat bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan kepada instansi terkait dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Maros untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sehingga dapat terlaksana dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perilaku Merokok

Perilaku adalah setiap tindakan manusia yang dapat dilihat, atau merupakan respons dan reaksi seseorang terhadap stimulus. Karakteristik perilaku ada dua yaitu perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Perilaku terbuka terjadi bila respons terhadap stimulus berupa tindakan atau praktik yang dapat diamati oleh orang lain dari luar atau "*observable behavior*". Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus belum dapat diamati orang lain dari luar atau "*unobservable behavior*" yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan metode tertentu misalnya berpikir, sedih, berkhayal, bermimpi dan persepsi (Notoatmodjo, 2014).

Metode menghisap setelah dibakar tidak sepenuhnya digunakan orang dalam mengkonsumsi rokok, ternyata banyak cara dan metode untuk mengekspresikan rokok untuk dikonsumsi. Seperti yang diungkapkan oleh Leventhal & Clearly (dalam Septriadi, 2016) terdapat 4 tahap dalam perilaku merokok sehingga menjadi perokok, yaitu :

1. Tahap *Prepatory*. Seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat atau dari hasil bacaan. Hal-hal ini menimbulkan minat untuk merokok.
2. Tahap *Initiation*. Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah seseorang akan meneruskan atau tidak terhadap perilaku merokok.

3. Tahap *Becoming a Smoker*. Apabila seseorang telah mengkonsumsi rokok sebanyak empat batang per hari maka mempunyai kecenderungan menjadi perokok.
4. Tahap *Maintenance of Smoking*. Tahap ini merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri (*self regulating*). Merokok dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan.

Apabila seseorang merokok, maka orang tersebut akan mendapatkan nikotin dari rokok yang akan masuk ke dalam tubuh. Nikotin tersebut akan menempel pada reseptor di otak yang akan menimbulkan rasa nyaman dan ketergantungan nikotin. Bila seseorang ketergantungan nikotin, maka apabila tidak merokok akan menimbulkan gejala putus zat (*withdrawal*) seperti kurang konsentrasi, energi yang menurun, daya tangkap menurun, dan kecemasan yang akan mempengaruhi seorang perokok. Perubahan perilaku tersebut disebabkan karena efek nikotin terhadap susunan saraf pusat dengan adanya pelepasan dopamin di area otak yang akhirnya mempengaruhi konsentrasi, rasa nyaman, dan perilaku perokok (Kemenkes 2011)

Perilaku merokok menyumbang hampir 30% dari semua kematian karena penyakit jantung dan merupakan faktor predisposisi utama kematian di Amerika Serikat (18,1%). Perilaku merokok, baik perokok aktif dan perokok pasif, merupakan salah satu perilaku berisiko kesehatan yang dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit diabetes mellitus, hipertensi, gangguan ginjal, paru-paru, jantung dan rongga mulut

neoplasma. Merokok merupakan perilaku risiko kesehatan yang dapat dimodifikasi oleh seseorang dalam menjaga kesehatannya, dan salah satu prediktor yang berpengaruh adalah niat (Thaha, 2018)

Perilaku merokok menjadi penyebab utama tingginya angka morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia (Rozema et al., 2016); (Ye et al., 2015). Dikatakan demikian karena setiap tahun lebih kurang 5,4 juta jiwa meninggal karena penyakit akibat penggunaan tembakau (Faber et al., 2016), (Demir et al., 2015), (Been et al., 2014). Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, bahkan akan melebihi 8 juta jiwa pada tahun 2030, di mana sebesar 80% kematian terjadi di negara dengan pendapatan rendah dan menengah (Berg et al., 2016).

Penggunaan tembakau tidak hanya memberikan dampak negatif kepada para penggunanya sendiri, dalam hal ini perokok aktif, akan tetapi juga bagi orang yang berada di sekitarnya atau yang biasa disebut dengan perokok pasif. Perokok pasif saat ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia (Berg et al., 2016), (Intarut et al, 2016). Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat 600.000 kematian atau sekitar 1% kematian terjadi pada paraperokok pasif di seluruh dunia (Ravara et al, 2013).

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di media massa. Hal ini bisa diartikan bahwa masalah rokok telah menjadi semakin

serius. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rokok, selain merugikan bagi perokok, juga merugikan orang lain yang tidak merokok yang berada di sekitarnya, karena akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok. Oleh karena itu perlu langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, di antaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes, 2011).

B. Tinjauan Umum tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa baik individu, masyarakat, parlemen, maupun pemerintah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang. Komitmen bersama dari berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

1. Pengertian

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR merupakan upaya perlindungan

untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar oleh asap rokok (Kemenkes, 2011).

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat maupun pemerintah. Komitmen bersama sangat dibutuhkan dalam keberhasilan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Oleh sebab itu, pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) perlu diwujudkan bersama.

Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan kawasan tanpa asap rokok terbukti dapat membawa dampak yang positif, di antaranya: pengurangan paparan asap rokok (Yang et al., 2018), (Macnaughton et al., 2017), (Thomas & Richmond, 2017), (Lim et al., 2017), (Ickes et al., 2017), (Sureda et al., 2015). Kesadaran dan dukungan aturan Kawasan Tanpa Rokok (Mistry et al., 2018), (Peruga et al., 2018), (Qureshi & Kania, 2018), (Martinez et al., 2016), (Weishaar et al., 2016), (Jancey et al., 2014). Berkurangnya gejala pernapasan dan turunnya kejadian serangan jantung (Barnoya & Navas-acien, 2013), (Burns et al., 2013). Peningkatan jumlah perokok yang ingin berhenti (Feliu et al., 2019), (Kang & Il Cho, 2018), (Thomas

& Richmond, 2017), (Barnoya & Navas-acien, 2013), (Burns et al., 2013). Membatasi pemasaran, menaikkan bea cukai dan harga rokok, penjualan dan penggunaan rokok (Lando et al., 2018), (Mistry et al., 2018), (Ross et al., 2018), (Qureshi & Kania, 2018), (Weishaar et al., 2016), (Martinez et al., 2016)

2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes, 2011), di antaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- j. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
- k. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.
- l. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.

3. Tujuan

Tujuan penetapan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. Menurunkan angka kesakitan dan / atau angka kematian dengancara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

4. Sasaran

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah ditempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain,

tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

- a. Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan: pimpinan/penanggung jawab/pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Sasaran di Tempat Proses Belajar Mengajar: pimpinan/penanggung jawab pengelola tempat proses belajar mengajar, peserta didik/siswa, tenaga kependidikan (guru), unsur sekolah lainnya (tenaga administrasi, pegawai di sekolah).
- c. Sasaran di Tempat Anak Bermain: pimpinan/penanggung jawab pengelola tempat anak bermain, pengguna/pengunjung tempat anak bermain.
- d. Sasaran di Tempat Ibadah: pimpinan/penanggung jawab pengelola tempat ibadah, jemaah, masyarakat disekitar tempat ibadah.
- e. Sasaran di Angkutan Umum: pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb), karyawan, pengemudi dan awak penumpang, penumpang.
- f. Sasaran di Tempat Kerja: pimpinan/penanggung jawab pengelola sarana penunjang di tempat kerja (kantin, toko, dsb), staf/pegawai/karyawan, tamu.
- g. Sasaran di Tempat Umum: pimpinan/penanggung jawab pengelola sarana penunjang di tempat umum (restoran, hiburan, dsb), karyawan, pengunjung/pengguna tempat umum.

5. Manfaat

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

6. Sejarah

Pada tahun 2003, WHO melaksanakan Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang tembakau yang merupakan perjanjian pertama yang dinegosiasikan di bawah naungan organisasi kesehatan dunia dalam menanggapi isu tentang penggunaan tembakau. Tujuan dilaksanakannya konvensi ini adalah untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau, dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok (WHO, 2004).

Pemerintah Indonesia bukannya menutup mata terhadap permasalahan rokok. Hal ini dapat dilihat dengan upaya yang dilakukan

untuk melindungi warganya dari paparan asap rokok. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah perumusan MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan yang menekankan pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam surat bernomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan bersama ini sebenarnya sudah menyebutkan adanya sanksi bagi pihak pelanggar, namun masih perlu diperkuat dengan petunjuk operasional dan konsistensi implementasinya di lapangan.

Saat ini kebijakan larangan merokok di tempat umum di Indonesia menjadi kebijakan daerah, meskipun belum semua daerah sudah membuat kebijakan ini. Sampai saat ini sudah ada 19 provinsi dengan 309 kabupaten/kota yang sudah membuat peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ada pula beberapa kabupaten kota yang membuat semacam peraturan dari walikota atau bupati, namun hal ini belum terlalu kuat dalam penerapan sanksi dan juga implementasinya.

C. Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja "to implemen". Menurut Webster's Dictionary, kata *to implement* berasal dari bahasa Latin, *implementum* dari asal kata

impere dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up; to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan (Suratman, 2017).

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Apabila pengertian implementasi tersebut dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan

sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis (Dewi, 2016).

Secara rinci WHO membedakan peran negara dan pemerintah sebagai pelaksana di bidang kesehatan, yaitu sebagai pengarah (*stewardship*), pelaksana (*regulator*) dan yang dikenakan regulasi (masyarakat). Fungsi pengarah terdiri dari tiga aspek utama, yaitu :

1. Menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan main dalam sistem kesehatan.
2. Menjamin keseimbangan antara berbagai pelaku utama dalam sektor kesehatan.
3. Menerapkan perencanaan strategik bagi seluruh sistem kesehatan.

Disebabkan penting dan strategisnya sektor kesehatan, WHO menetapkan delapan elemen yang menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan, yakni :

1. Pendekatan holistik, artinya pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak dapat semata-mata mengandalkan upaya kuratif, tetapi harus lebih mempertimbangkan upaya preventif, promotif dan rehabilitatif.
2. Partisipatori, dengan adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan dapat dibangun aksi

bersama masyarakat yang menjadi kekuatan pendorong dalam mengimplementasikan kebijakan dan dalam menyelesaikan masalah.

3. Kebijakan publik yang sehat, yakni kebijakan diarahkan guna mendorong terwujudnya pembangunan kesehatan yang kondusif dan berorientasi kepada masyarakat.
4. Ekuitas, yakni terdapat pemerataan layanan kesehatan kepada setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi dan status sosialnya.
5. Efisiensi, setiap layanan kesehatan berorientasi proaktif dengan mengoptimalkan biaya dan teknologi.
6. Kualitas, tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga negara dan perlu ditingkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang setara dengan pelayanan kesehatan bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas dan globalisasi dalam sektor kesehatan.
7. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan mengoptimalkan social capital. Pemberdayaan utamanya dilakukan pada daerah terpencil dan daerah perbatasan.
8. *Self-reliant*, kebijakan kesehatan dapat memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas kesehatan di wilayah sendiri.

Pelaksanaan kebijakan publik menurut Edwards III dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik di antaranya:

konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: evaluasi *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post*. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum tentang Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Berdasarkan etimologi kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin “*communicatio*” yang terbentuk dari dua akar kata “*com*”, berarti “dengan” atau “bersama dengan” dan “*unio*” berarti “bersatu dengan”. Jadi komunikasi dapat diartikan “*union with*” (bersatu dengan) atau “*union together with*” (bersama dengan). Ungkapan ini lazim disebut dalam satu kata saja, yakni “*communio*”, yang berarti “saya” tidak sekedar “bersama-sama dengan” tetapi lebih jauh dari itu yakni “bersatu dengan” orang lain (bersama dalam satu kesatuan – bersatu dalam kesamaan) (Liliweri, 2011).

Dalam perkembangan praktik komunikasi manusia, etimologi kata “komunikasi” mengalami peralihan makna dari bahasa Latin ke bahasa Inggris yang dikenal dalam kata “*common*” (dalam bahasa Latin ada pula kata “*communis*”), yang berarti “bersama dengan” dan “bersatu dengan”. Hal ini dapat dipahami aktivitas komunikasi manusia

sebagai usaha membangun “*commonness*” yang artinya kebersamaan makna atas suatu informasi, gagasan atau sikap demi “bersama dengan” atau “bersatu dengan” orang lain (Liliweri, 2011).

Menurut Hybels dan Weafer II dalam Liliweri (2011) komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan dan perasaan. Proses ini meliputi informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dengan kata-kata, atau yang disampaikan dengan bahasa tubuh, gaya maupun penampilan diri, menggunakan alat bantu disekeliling kita sehingga buah pesan menjadi lebih kaya.

Pendapat lain menurut Walhstrom (1992) mengatakan bahwa komunikasi adalah (1) pernyataan diri yang efektif, (2) pertukaran pesan-pesan yang tertulis, pesan-pesan dalam percakapan, bahkan melalui imajinasi, (3) pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau dengan metode lain, (4) pengalihan informasi dari seseorang kepada orang lain, (5) pertukaran makna antar pribadi dengan sis/tem simbol, dan (6) proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu.

2. Unsur-unsur komunikasi

Komunikasi sebagai aktivitas meliputi beberapa unsur : (Liliweri, 2011)

- a. Pengirim (*sender*) atau sumber (*resource*) adalah individu, kelompok, atau organisasi berperan untuk mengalihkan (*transferring*) pesan.
- b. *Encoding* adalah pengalihan gagasan kedalam pesan.

- c. Pesan (*message*) adalah gagasan yang dinyatakan oleh pengirim kepada orang lain.
- d. Saluran (*media*) adalah media dari komunikasi yang merupakan tempat di mana sumber menyalurkan pesan kepada penerima, misalnya melalui gelombang suara, cahaya, atau halaman cetakan dan lain-lain.
- e. *Decoding* adalah pengalihan pesan kedalam gagasan.
- f. Penerima (*receiver*) adalah individu atau kelompok yang menerima pesan.
- g. Umpan balik (*feed back*) adalah reaksi terhadap pesan.
- h. Gangguan (*noise*) adalah efek internal atau eksternal akibat dari peralihan pesan.
- i. Bidang pengalaman (*field of experience*) adalah bidang atau ruang yang menjadi latar belakang informasi dari pengirim maupun penerima.
- j. Pertukaran makna (*shared meaning*) adalah bidang atau ruang (tumpang tindih) yang tercipta karena kebersamaan.
- k. Konteks (*context*) adalah situasi, suasana, atau lingkungan fisik, non fisik (sosiologis-antropologis, psikologis, politik, ekonomi dan lain-lain).

3. Fungsi Komunikasi

Secara umum ada lima kategori fungsi (tujuan) utama komunikasi (Liliweri, 2011), yakni :

a. Informasi

Fungsi utama dari komunikasi adalah menyampaikan pesan (informasi), atau menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Artinya diharapkan dari penyebarluasan informasi itu, para penerima informasi akan mengetahui sesuatu yang ingin diketahui.

b. Pendidikan

Fungsi pendidikan dari komunikasi adalah menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik kepada orang lain. Artinya, dari penyebarluasan informasi itu diharapkan para penerima informasi akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang ingin diketahui.

c. Instruksi

Fungsi instruksi adalah fungsi komunikasi untuk memberikan instruksi (mewajibkan atau melarang) penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

d. Persuasi

Fungsi persuasi kadang disebut fungsi mempengaruhi. Fungsi ini merupakan fungsi komunikasi yang menyebarkan informasi yang dapat memengaruhi (mengubah) sikap penerima agar dia menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kehendak pengirim.

e. Menghibur

Fungsi menghibur adalah fungsi pengirim untuk mengirimkan pesan-pesan yang mengandung hiburan kepada para penerima agar penerima menikmati apa yang diinformasikan.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Suratman, 2017).

Edwards III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi (Suratman, 2017).

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok

sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan.

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan Edwards III. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung

efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. Menurut Edwards III dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

E. Tinjauan Umum tentang Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik (*intangible*). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi besar maupun hilang, dan ada pula sumber

daya yang selalu tersedia. Selain itu dikenal pula sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan dan sumber daya tak terbarukan. Pengertian lain tentang sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan, dimana sumber daya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

Setiap sumber daya memiliki kegunaan yang lebih spesifik dan memiliki ciri tersendiri, semuanya berguna bagi kehidupan manusia. Sebenarnya ada banyak sekali sumber daya yang ada di lingkungan kita, seperti :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan (Hasibuan, 2016)

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam, ia dapat diolah menjadi sesuatu barang atau jasa yang berharga bagi kehidupan manusia. Seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya alam juga memerlukan sumber daya yang lain sebagai

penunjang, seperti sumber daya manusia yang mampu dan memiliki keahlian dalam mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia.

3. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal atau kapital adalah suatu sarana untuk mendukung proses produksi suatu barang dan jasa. Sumber daya modal tersebut tidak hanya berupa uang saja, tetapi teknologi, peralatan mesin, tanah, informasi dan sebagainya juga termasuk modal karena dapat mendukung proses produksi. Dengan adanya modal, maka proses produksi akan menjadi lebih mudah dan efisien.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan

pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan secara efektif. Sumber daya yang penting menurut Edwards III (Suratman, 2017) meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan staf atau implementator saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksana kebijakan. Ada dua bentuk informasi, yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak mengetahui kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki

konsekuensi langsung, seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan dana, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Selanjutnya adalah fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi tersebut tidak akan berhasil.

F. Tinjauan Umum tentang Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Edwards III (Suratman, 2017) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk

melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Menurut Edwards III, banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan.

Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau lebih kebijakan dan usaha-usaha pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat nampak. Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi adalah besar jika masyarakat tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-

kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada.

Disamping itu dukungan dari para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

G. Tinjauan Umum tentang Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan (Suratman, 2017), yaitu :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (dukungan anggota legislatif dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi.
5. Tingkat komunikasi “terbuka” yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikan secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Dalam birokrasi pada umumnya dan khususnya birokrasi publik, pemimpin memegang peranan yang sangat strategis, berhasil tidaknya birokrasi menjalankan tugas-tugas pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Oleh karena itu kedudukan pemimpin sangat mendominasi semua aktivitas yang dilakukan birokrasi. Pada konteks birokrasi, dimana para staf (bawahan) bekerja selalu tergantung pada pemimpin. Apabila seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas-tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Padahal antara pimpinan dan staf, keduanya merupakan satu kesatuan tim kerja yang dipelihara dalam menjalankan misi dan tujuan birokrasi (Pasolong, 2010).

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Menurut Edwards III (Suratman, 2017) ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu, prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua, berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi birokrasi pemerintah.

1. *Standar Operating Procedure (SOP)*

Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (*Standar Operating Prosedure*). Dengan menggunakan *Standar Operating Prosedure* para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragami tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan

fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan pelaksana mungkin juga akan menghambat perubahan. Bila suatu badan memiliki fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan tersebut akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

H. Sintesis Penelitian

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	TUJUAN	HASIL
1	Peruga, A., et al. (2018)	Correlates of Compliance With National Comprehensive Smoke-Free Laws (Metode: Cross-Sectional)	Untuk mengeksplorasi kepatuhan yang tinggi terhadap larangan merokok di 41 negara yang telah menerapkan undang-undang nasional komprehensif tentang bebas rokok.	Peluang kepatuhan yang tinggi terhadap undang-undang komprehensif bebas rokok meningkat menjadi 30% dengan setiap elemen kebijakan yang disetujui untuk penegakan hukum. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh keterlibatan lokal yurisdiksi dalam menyediakan pelatihan atau panduan untuk inspeksi. Tingkat kepatuhan tidak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, demografi, prevalensi merokok atau waktu yang telah berlaku sejak larangan nasional bebas rokok diimplementasikan.
2	Marguerite Thomas & Robyn Richmond (2017)	Smoke-Free Mental Health Inpatient Facility Policies in Australia: Variation Across States and Territories (Metode: Kualitatif)	Untuk melihat bagaimana negara-negara bagian di Australia dalam menafsirkan dan mengambil tindakan untuk memastikan layanan rawat inap kesehatan mental bebas asap rokok dalam kaitannya dengan kebijakan dan legislasi bebas rokok.	Semua wilayah yurisdiksi memiliki kebijakan legislasi yang memandatkan bahwa dalam ruangan pada fasilitas rawat inap rumah sakit harus bebas asap rokok. Wilayah yang menerapkan sepenuhnya aturan tersebut adalah Queensland, Australia Selatan dan Canberra. Sedangkan wilayah lain seperti New South Wales, Northern Territory, dan Western Australia masih membuat tempat khusus merokok di luar gedung fasilitas rawat inap. Kebijakan kawasan bebas rokok di rumah sakit dibahas secara luas di Australia dengan tujuan untuk melindungi staf, pasien dan pengunjung dari bahaya peokok pasif dan mendorong agar perokok berhenti merokok. Rumah sakit yang menerapkan kebijakan ini secara komprehensif, hasilnya efektif. Sedangkan wilayah yang masih menyediakan ruangan khusus untuk merokok, hasilnya kurang efektif.

3	Kaleta, D., et al. (2017)	Tobacco Use Patterns, Knowledge, Attitudes Towards Tobacco and Availability of Tobacco Control Training Among School Personnel From a Rural Area in Poland <i>(Metode: Analisis Regresi Linier Multivariat)</i>	Untuk mengevaluasi pola penggunaan tembakau, pengetahuan dan perilaku terhadap ketersediaan pelatihan kontrol tembakau dikalangan personal sekolah yang ada di daerah pedesaan Polandia.	Sekitar 24% dari personal sekolah (guru dan staf) masih merokok dan 9% adalah mantan perokok. Lebih banyak guru dibanding staf non pengajar yang mengatakan bahwa sekolah memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tembakau ke pelajar. Sebagai tambahan, 6% dari pelajar menyatakan bahwa setiap hari pelanggaran terhadap kebijakan kontrol tembakau dilakukan oleh guru dan staf. Lebih dari 80% guru menyatakan bahwa dibutuhkan pelatihan pada pelajar untuk mencegah mereka dari penggunaan tembakau. Personal sekolah yang merokok dan tidak merokok menganggap bahwa dibutuhkan pelatihan anti tembakau dikalangan pelajar.
4	Weishaar, H., et al. (2016)	'Maybe They Should Regulate Them Quite Strictly Until They Know The True Dangers': a Focus Group Study Exploring UK Adolescents' Views on e-Cigarette Regulation <i>(Metode: Kualitatif)</i>	Untuk mengeksplorasi persepsi remaja tentang keberadaan rokok elektrik dan pendapat mereka terhadap potensi regulasi rokok elektrik	Para partisipan secara kritis mempertimbangkan bukti yang ada dan minat yang bersaing terhadap debat regulasi dan menunjukkan pemahaman yang tinggi terhadap keuntungan dan kerugian dari regulasi. Mereka sangat mendukung aturan tentang rokok elektrik, pembatasan penjualan, pemasaran dan penggunaan rokok elektrik di tempat-tempat umum.
5	Ye, X., et al. (2015)	Smoking Behaviors Before and After Implementation of a Smoke-Free Legislation in Guangzhou, China <i>(Metode: Cross Sectional Survey, Logistik Regression)</i>	Untuk membandingkan perilaku merokok sebelum dan sesudah implementasi dari aturan bebas rokok di Guangzhou, Cina.	Tingkat perilaku merokok menurun secara signifikan dari 20,8% menjadi 18,2% khususnya dikalangan usia 15 – 24 tahun. Angka rasio berhenti merokok naik secara signifikan dari 14,5% menjadi 17,9%, tapi tetap rendah pada usia 15 – 44 tahun. Pada umumnya perilaku merokok di lokasi yang menerapkan larangan merokok secara penuh menurun secara signifikan dari 36,4% menjadi 24,3% di tempat-tempat seperti tempat budaya, kendaraan umum dan kantor-kantor pemerintahan. Sedangkan perilaku merokok di tempat yang menerapkan larangan merokok parsial meningkat dari 89,6% menjadi 90,4%.

6	Sitanggang, S. H, et al (2018)	Implementasi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Tentang Kawasan Tanpa Rokok <i>(Metode: Kualitatif)</i>	Untuk menganalisis pelaksanaan SK Direktur RSUD Kabanjahe No. 1255/RSU/2016 tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kabanjahe Tahun 2017	Ketidakberhasilan penerapan KTR disebabkan karena kurangnya komitmen dan kepatuhan direktur rumah sakit serta jajarannya yang kurang aktif melibatkan diri dalam pengimplementasian regulasi tentang KTR. Hal tersebut dikarenakan belum ada dasar hukum yang menguatkan dari PEMDA Kabupaten Karo yaitu PERDA yang mengatur tentang KTR, sehingga dalam menjalankan kebijakan ini secara sepenuhnya tidak berjalan efektif. Selain itu karena belum adanya sanksi yang memberi efek jera kepada para pelanggar kebijakan KTR baik secara lisan, tulisan maupun tindakan hukum atau kebijakan-kebijakan rumah sakit lainnya. Koordinasi dalam internal rumah sakit sebagai pelaku kebijakan sangat lemah, dan juga belum ada koordinasi eksternal contohnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo maupun LSM yang terkait dengan KTR dalam melakukan penyuluhan, sosialisasi dan edukasi lainnya kepada pegawai maupun kepada pengunjung rumah sakit.
7	Viralista Ardina (2018)	Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai <i>(Metode: Kualitatif)</i>	Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan KTR berdasarkan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan disposisi implementor.	Dari segi standar, sasaran, tujuan, SDM, dan finansial, kebijakan KTR sudah mendapatkan respon positif. Dari segi koordinasi, kondisi sosial ekonomi, dan disposisi, kebijakan KTR masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Meskipun telah dibuat kebijakan KTR, masih saja masyarakat yang telah memiliki kebiasaan merokok sulit untuk mematuhi. Apalagi tidak adanya penindakan tegas atas pelanggaran kebijakan tersebut, maka tidak ada efek jera dalam diri masyarakat untuk terus melakukan kebiasaan buruk merokok disembarang tempat. Disatu sisi dapat dipahami bahwa adanya respon positif dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, namun partisipasi masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masih rendah, serta tingkat kesadaran akan dampak buruk merokok masih belum melekat dalam diri masyarakat. Karena hal itu masyarakat masih ada yang merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik itu masyarakat sebagai tamu yang berkunjung ke kantor, maupun dari pegawai di kantor itu sendiri.

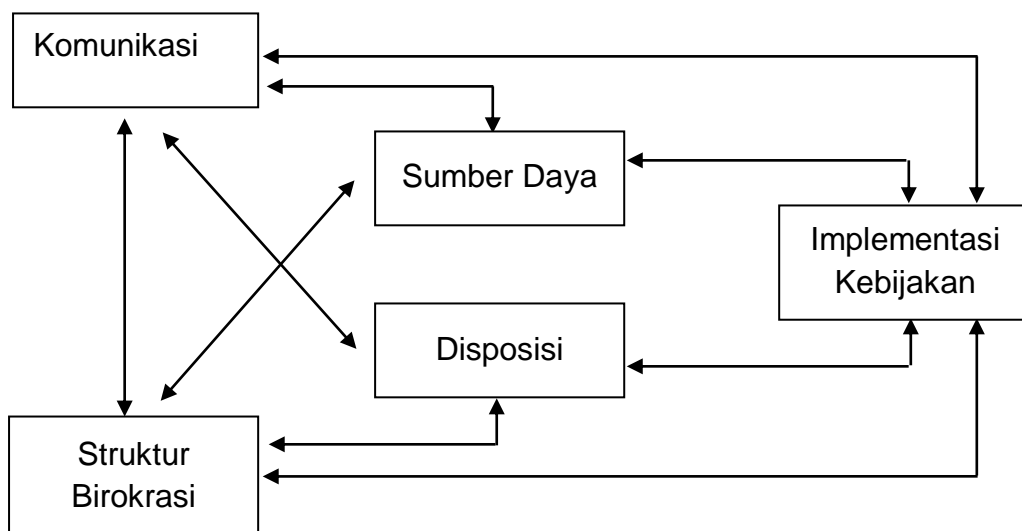
8	Wulanningrum, P. A., et al. (2016)	Evaluasi Penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Di Perguruan Tinggi Kota Semarang (Metode: Kualitatif)	Mengevaluasi penerapan kebijakan Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada program studi kesehatan masyarakat di perguruan tinggi Kota Semarang.	Pada tahapan input SDM dalam pengelolaan KTR belum memenuhi standar, masih banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tertulis tentang KTR, media tentang KTR sudah ada, dana operasional dalam penerapan KTR masih terbatas. Pada tahap perencanaan sudah ada karena terlaksana rancangan program. Pada tahap pelaksanaan belum berjalan maksimal karena masih ada kendala dalam pemasangan papan pengumuman, tanda KTR, belum ada jobdesk dan belum ada penyuluhan khusus tentang KTR. Pada tahap pengawasan belum berjalan karena tidak ada tim pengawas khusus KTR. Pada tahap pembinaan belum maksimal karena tidak ada tim yang melakukan bimbingan dan klinik berhenti merokok tidak aktif. Tahapan output masih terdapat program studi kesehatan masyarakat yang lingkungannya belum bebas dari asap rokok karena masih tersedia tempat khusus merokok dan sanksi yang diberikan berupa denda atau peneguran.
9	Falentina Agun Ingan (2016)	Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Kota Samarinda). (Metode: Kualitatif)	Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengawasan, proses pelaksanaan pemberian sanksi administratif terhadap larangan merokok, proses partisipasi pegawai aparatur rumah sakit dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dari kawasan tanpa rokok (KTR) di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Kota Samarinda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses pengawasan kebijakan KTR di RSUD AW Sjahranie Kota Samarinda belum efektif karena tergolong rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan tim satgas anti rokok dalam mengawasi kawasan tanpa rokok. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja tim satgas anti rokok yang kurang aktif melakukan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi pada setiap harinya. 2. Pemberian sanksi administratif masih menjadi persoalan serius dikarenakan sanksi administratif berupa denda hanya masih di berlakukan untuk pegawai, sementara untuk masyarakat itu sendiri hanya berupa sanksi teguran lisan, sedangkan yang lebih banyak ditemukan melanggar kebanyakan dari kalangan masyarakat. 3. Partisipasi pegawai rumah sakit dan masyarakat masih belum berjalan maksimal, hal tersebut terlihat dari sikap kepedulian pegawai maupun masyarakat yang kurang terlibat dalam proses pengawasan kawasan tanpa rokok, sehingga menyebabkan tingkat pelanggaran semakin meningkat setiap harinya, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi dikawasan tanparokok, banyak masyarakat yang ditemukan merokok. Hal tersebut sangat ironis karena sesama pengunjung rumah sakit tidak saling memperingatkan bahwa adanya peraturan untuk dilarang merokok dilingkungan rumah sakit.

10	Muliku, H. R., et al. (2016)	Analisis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Tingkat III Robert Wolter Monginsidi Manado <i>(Metode Kualitatif)</i>	Untuk menganalisis pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Tingkat III Robert Wolter Monginsidi Manado	Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Tingkat III Robert Wolter Monginsidi Manado belum berjalan dengan baik karena masih banyak pengunjung yang merokok di lingkungan rumah sakit, meskipun sudah banyak terdapat tanda peringatan dilarang merokok. Selain itu, karena kurangnya pelaksanaan ketegasan dalam melakukan kebijakan, oleh kurangnya sanksi tegas, maka tidak dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar aturan yang membuat pelaksanaan kebijakan ini dianggap tidak berjalan dengan baik.
----	---------------------------------	---	---	--

Matriks 2.1 Sintesis Penelitian tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

I. Kerangka Teori

Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Model implementasi kebijakannya dikenal dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Edward III menyatakan bahwa ada empat variabel (faktor penentu) penting yang perlu mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Suratman, 2017). Model Pendekatan Implementasi menurut George C. Edward III dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Model Pendekatan Implementasi menurut George C. Edward III

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan penyampaian ide, gagasan, peraturan dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi

kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila mereka yang menjadi pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

George Edward III membahas tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan (Suratman, 2017), di antaranya :

- a. Transmisi, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut.
- b. Kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana, tetapi komunikasi juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkaitan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.
- c. Konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, apabila perintah tersebut bertentangan, perintah

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber Daya

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya di sini meliputi manusia sebagai pelaksana kebijakan dan sumber daya pendukung seperti kecakapan, informasi, sarana dan prasarana.

George Edward III mengemukakan bahwa ada beberapa indikator sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator-indikator itu antara lain :

- a. Staf, atau yang lebih populer dengan istilah Sumber Daya Manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak cukup dan cakap. Cukup dalam hal ini dari segi jumlah. Sedangkan cakap dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi dan kemampuan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu : informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan di mana pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan.

- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksanan kebijakan mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan, maka akan dilaksanakan dengan senang hati, tapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan bermasalah. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan, yaitu : kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya, karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Selain itu dukungan pejabat pelaksana sangat dibutuhkan

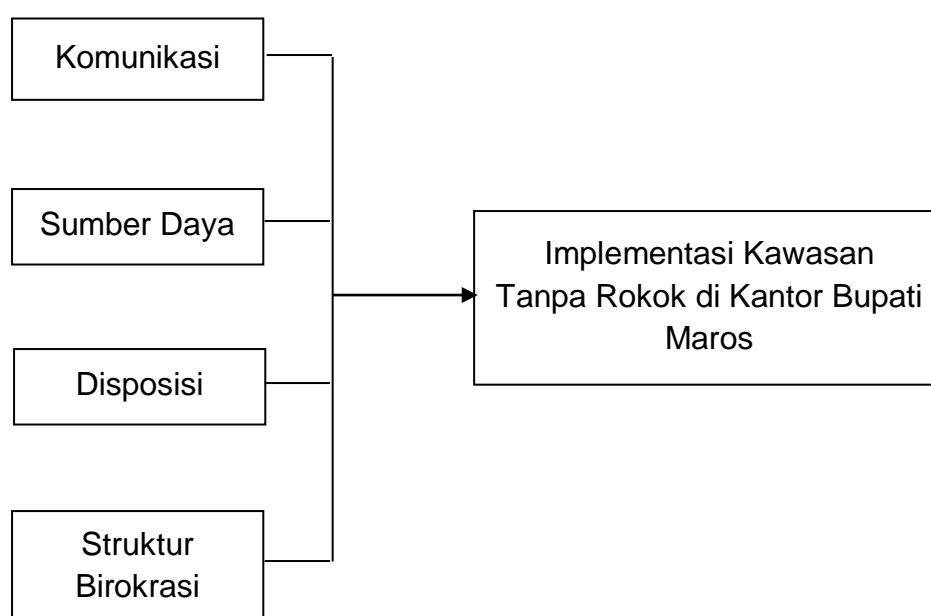
dalam mencapai sasaran program dan tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan seperti menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan struktur birokrasi. Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur kerja baku standar atau *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. SOP atau petunjuk pelaksanaan dapat memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan fragmentasi lebih kepada penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

J. Kerangka Konsep

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan kerangka teori dari George Edward III, peneliti merumuskan kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Konsep Penelitian

K. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros berdasarkan jawaban reponden. Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Untuk indikator penilaian diambil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Indikator tersebut (Kemenkes RI, 2011) terdiri dari:

- a. Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- b. Penerapan 100% Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- c. Menciptakan ruang dan lingkungan bersih dan sehat dari asap rokok.
- d. Melarang keras siapapun yang merokok di wilayah Kawasan tanpa Rokok (KTR).
- e. Adanya media promosi tentang larangan merokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- f. Terlaksananya sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- g. Pemberian teguran terhadap setiap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- h. Pemberian sanksi/denda terhadap setiap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- i. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- j. Perokok merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Adapun penilaian terhadap indikator dilakukan dengan menilai tingkat pencapaian implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) menggunakan skala Likert dengan interval nilai 1-5. Kategori penilaiannya terdiri dari :

- 1) Sangat Baik dengan nilai 5 (SB = 5)
- 2) Baik dengan nilai 4 (B = 4)
- 3) Cukup Baik dengan nilai 3 (CB = 3)
- 4) Kurang Baik dengan nilai 2 (KB = 2)
- 5) Tidak Baik dengan nilai 1 (TB = 1)

Kriteria Objektif :

Berhasil : Apabila total skor penilaian ≥ 38

Kurang Berhasil : Apabila total skor penilaian < 38

2. Komunikasi

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komunikasi adalah bagaimana penyampaian informasi dari Bupati Maros ke pegawai Kantor Bupati Maros tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilihat dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi. Kuesioner komunikasi diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Baik : Apabila total skor penilaian ≥ 24

Kurang Baik : Apabila total skor penilaian < 24

a. Transmisi**Definisi Operasional :**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan transmisi yaitu sejauh mana responden memperoleh informasi terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada pegawai Kantor Bupati Maros. Kuesioner transmisi informasi terdiri dari 8 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Baik : Apabila total skor penilaian ≥ 7

Kurang Baik : Apabila total skor penilaian < 7

b. Kejelasan**Definisi Operasional :**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kejelasan informasi yaitu pemahaman responden terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada pegawai Kantor Bupati Maros yang diukur dengan memberikan pertanyaan pengetahuan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner transmisi informasi terdiri dari 9 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Baik : Apabila total skor penilaian ≥ 14

Kurang Baik : Apabila total skor penilaian < 14

c. Konsistensi

Definisi Operasional:

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsistensi informasi yaitu sejauh mana isi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros tidak dilakukan perubahan. Kuesioner transmisi informasi terdiri dari 5 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban "Tidak" diberi nilai 1 dan "Ya" diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Baik : Apabila total skor penilaian ≥ 5

Kurang Baik : Apabila total skor penilaian < 5

3. Sumber Daya

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber daya adalah hal-hal yang menjadi penggerak dan pendorong dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Yang termasuk sumber daya dalam penelitian ini adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Kuesioner sumber daya diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 7

Kurang : Apabila total skor penilaian < 7

a. Staf**Definisi Operasional :**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan staf adalah semua pegawai Kantor Bupati Maros yang mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner staf terdiri dari 3 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 2

Kurang : Apabila total skor penilaian < 2

b. Informasi**Definisi Operasional :**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan informasi adalah semua informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner informasi terdiri dari 3 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 2

Kurang : Apabila total skor penilaian < 2

c. Wewenang

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan wewenang adalah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner wewenang terdiri dari 3 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 1

Kurang : Apabila total skor penilaian < 1

d. Fasilitas

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan fasilitas adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner fasilitas terdiri dari 5 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 2

Kurang : Apabila total skor penilaian < 2

4. Disposisi

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap dari pegawai Kantor Bupati Maros dan dukungan pimpinan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor bupati yang disertai dengan kesungguhan di dalam implementasinya. Kuesioner disposisi untuk sikap diukur dengan menggunakan skala Likert dengan interval nilai 1-4. Kategori penilaiannya terdiri dari :

- a. Sangat Setuju dengan nilai 4 (SS = 4)
- b. Setuju dengan nilai 3 (S = 3)
- c. Tidak Setuju dengan nilai 2 (TS = 2)
- d. Sangat Tidak Setuju dengan nilai 1 (STS = 1)

Sedangkan kuesioner disposisi untuk dukungan pimpinan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 36

Kurang : Apabila total skor penilaian < 36

a. Sikap

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sikap adalah respon pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner

sikap terdiri dari 10 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert dengan interval nilai 1-4. Kategori penilaiannya terdiri dari :

- 1) Sangat Setuju dengan nilai 4 (SS = 4)
- 2) Setuju dengan nilai 3 (S = 3)
- 3) Tidak Setuju dengan nilai 2 (TS = 2)
- 4) Sangat Tidak Setuju dengan nilai 1 (STS = 1)

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 34

Kurang : Apabila total skor penilaian < 34

b. Dukungan Pimpinan

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dukungan pimpinan adalah komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner dukungan pimpinan terdiri dari 3 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Cukup : Apabila total skor penilaian ≥ 2

Kurang : Apabila total skor penilaian < 2

5. Struktur Birokrasi

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara

implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Yang termasuk dalam struktur birokrasi ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berdasarkan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab). Kuesioner struktur birokrasi diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Baik : Apabila total skor penilaian ≥ 4

Kurang Baik : Apabila total skor penilaian < 4

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah petunjuk pelaksanaan yang dapat memudahkan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari 3 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Baik : Apabila total skor penilaian ≥ 2

Kurang Baik : Apabila total skor penilaian < 2

b. Fragmentasi

Definisi Operasional :

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dan pembagian tugas dalam

pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kuesioner fragmentasi terdiri dari 3 pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Untuk jawaban Ya diberi nilai 1 dan Tidak diberi nilai 0.

Kriteria Objektif :

Baik : Apabila total skor penilaian ≥ 2

Kurang Baik : Apabila total skor penilaian < 2

L. Hipotesis

1. Hipotesis Null (Ho)

- a. Tidak ada hubungan komunikasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- b. Tidak ada hubungan sumber daya terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- c. Tidak ada hubungan disposisi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- d. Tidak ada hubungan struktur birokrasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan komunikasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- b. Ada hubungan sumber daya terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- c. Ada hubungan disposisi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
- d. Ada hubungan struktur birokrasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional* study untuk mengetahui hubungan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk menunjang data kuantitatif maka akan dilakukan wawancara mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Maros yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pengumpulan data akan dilakukan pada Bulan Maret dan April Tahun 2019. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti menemukan masih banyak pegawai yang merokok dalam lingkungan Kantor Bupati Maros.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah semua pegawai yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Maros dengan jumlah 196 orang.

2. Sampel Penelitian

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling* sehingga seluruh populasi yang ada di Kantor Bupati Maros menjadi responden sebanyak 196 orang. Selanjutnya untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan sewaktu pengambilan sampel di lokasi penelitian disebabkan oleh berbagai sebab yang dapat menyulitkan peneliti untuk mengumpulkan sampel maka peneliti menetapkan kriteria inklusi pada sampel penelitian sebagai berikut:

- a. Berada di lokasi penelitian selama masa penelitian berlangsung.
- b. Bersedia menjadi responden.

Selain itu, untuk memberikan informasi penunjang pelengkap data dan memperkuat hasil penelitian akan dipilih 10 orang untuk dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*).

3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya (Afrizal, 2016). Informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari berbagai bidang yang berada di Kantor Bupati Maros. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama, yaitu :

a. Informan Kunci

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bupati Maros selaku kepala daerah Kabupaten Maros sekaligus penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

b. Informan Utama

Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada di lingkungan Kantor Bupati Maros seperti kepala bidang, pegawai dan Satpol PP..

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Kuesioner

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Adapun tahapan pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner, sebagai berikut :

- 1) Menentukan populasi penelitian.
- 2) Menghitung jumlah sampel dari populasi penelitian.
- 3) Turun ke lokasi penelitian.
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada kepada pegawai yang terpilih menjadi sampel.
- 5) Meminta kesediaan sampel untuk menjadi responden penelitian.

- 6) Jika bersedia maka proses wawancara dimulai dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan kuesioner penelitian.
- 7) Kuesioner penelitian diisi oleh peneliti berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada responden.

b. Check List

Observasi dengan menggunakan *check list* bertujuan untuk mengumpulkan data primer terkait fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di setiap bagian di Kantor Bupati Maros. Adapun tahapan pengumpulan data primer dengan menggunakan *check list*, sebagai berikut :

- 1) Turun ke setiap bagian.
- 2) Melakukan pengamatan terhadap fasilitas pendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di setiap bagian.
- 3) Melakukan pengecekan pada lembar *check list*.

c. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Selain menggunakan kuesioner dan check list untuk pengumpulan data primer, wawancara mendalam juga dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data hasil observasi menggunakan pedoman wawancara. Adapun tahapan pengumpulan data primer dengan menggunakan pedoman wawancara, sebagai berikut :

- 1) Akan dipilih 10 orang pegawai untuk dilakukan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

- 2) Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada pegawai yang akan diwawancarai.
- 3) Meminta kesediaan pegawai yang terpilih untuk dilakukan wawancara mendalam.
- 4) Jika bersedia maka proses wawancara dimulai dengan membacakan pertanyaan dalam pedoman wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, yaitu data jumlah dan nama pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap bagian di Kantor Bupati Maros. Selain itu data sekunder diperoleh dari informasi yang didapatkan melalui penelusuran literatur (Literature Review) yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputerisasi melalui program SPSS, meliputi :

1. *Editing* : Pada tahap ini melakukan pengecekan isian formulir dan kuesioner, apakah sudah lengkap, jelas, relevan dan konsisten.
2. *Coding* : Selanjutnya diberikan kode untuk setiap variabel dengan tujuan memudahkan mengidentifikasi variabel penelitian.
3. *Entry Data* : Kegiatan memasukkan data dari kuesioner ke program SPSS.

4. *Cleaning* : Pembersihan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses input data.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah diolah sehingga diperoleh arti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini ada dua tahap analisis yaitu analisis univariat dan analisis bivariat.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian yang selanjutnya menghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam bentuk tabulasi silang (cross tabulation) dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan uji statistik Chi-square, bila memenuhi syarat uji Chi-square, dengan rumus :

$$X^2 = \sum \left[\frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e} \right]$$

Syarat uji chi-square adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel. Jika syarat uji chi-square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya. Alternatif uji chi-square untuk tabel 2 x 2 adalah uji Fisher, untuk tabel 2 x K adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dan untuk tabel selain 2 x 2 dan 2 x K,

dilakukan penggabungan sel lalu terbentuklah suatu tabel B x K yang baru dan selanjutnya dipilih uji hipotesis yang sesuai dengan tabel yang baru tersebut (Sugiyono, 2017). Jika p-value > 0.05, maka H_0 diterima artinya menunjukkan dua variabel tersebut tidak ada hubungan dan jika p-value < 0.05 maka H_0 ditolak artinya menunjukkan dua variabel tersebut ada hubungan.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penyajian data / data emik

Data yang telah diperoleh dari informan tanpa intervensi peneliti yang disajikan dalam bentuk teks naratif.

b. Reduksi data / data etik

Pada tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ditemukan di lapangan dan melakukan analisis melalui penggolongan, membuang yang tidak perlu, mengarahkan dan menajamkan data. Sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penarikan Kesimpulan / Konsep

Pencarian makna dan kata kunci peristiwa untuk membentuk pola dan alur sebab akibat untuk membentuk konsep yang kemudian dijadikan proposisi.

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menjamin dan mencerminkan akurasi informasi kualitatif yang dikumpulkan. Untuk menentukan keabsahan data pada penelitian ini digunakan triangulasi :

1. Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil observasi, serta melakukan wawancara kepada informan agar dapat mendapatkan umpan balik. Umpan balik ini berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari informasi yang didapatkan.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara menggunakan kelompok informan yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan dengan cara mendapatkan informan dari pejabat, pegawai, dan satuan pengamanan kantor Bupati Maros.

G. Penyajian Data

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel disertai asumsi penjelasan dan narasi untuk interpretasi serta pembahasan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Maros sejak tanggal 29 Maret sampai 10 Mei 2019, dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan fragmentasi. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Maros yaitu sebanyak 188 orang dari total 196 orang pegawai (8 orang sedang menempuh pendidikan) dan sebanyak 10 orang informan yang berhasil diwawancarai. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan maka hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45'-50°07' Lintang Selatan dan 109°205'-129°12' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone di sebelah Timur dan Selat Makassar di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² atau 3,53 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara administrasi pemerintahannya terdiri 14 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, jumlah Kecamatan di Kabupaten Maros tidak mengalami perubahan karena pemekaran. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Maros sebanyak 14 kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 23 kelurahan (103 desa/kelurahan). Dari 14 kecamatan tersebut terdapat 89 lingkungan dan 320 dusun. Menurut klasifikasi desa/kelurahan, masih terdapat 22 desa/kelurahan swadaya dan 22 desa/kelurahan swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 yang sudah swasembada.

Kondisi daerah merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang dijadikan lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Letak Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis apabila ditinjau dari segi geografis. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar. Sehingga kegiatan perekonomian akan banyak berjalan di Kabupaten Maros. Hal ini juga ditopang dengan letak bandara internasional Sultan Hasanuddin yang berada di dalam wilayah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 % (10 desa) adalah pantai, 5 % (5 desa) adalah kawasan lembah, 27 % (28 Desa) kawasan lereng/bukit dan 58 % (60 desa) adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari

bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berada pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten / Kota di Sulawesi selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Maros; Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep, sebelah selatan adalah kota makassar, sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan sebelah barat adalah selat Makassar.

2. Analisis Univariat

Dalam penelitian ini analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi karakteristik umum responden yang meliputi : jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan responden dan distribusi frekuensi dari setiap variabel yang diukur baik variabel dependen maupun variabel independen dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

a. Karakteristik Umum Responden

Karakteristik umum repsonden meliputi jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, status merokok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden
Di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Karakteristik Responden	n	%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	99	52,7
Perempuan	89	47,3
Kelompok Umur		
<30 tahun	11	5,9
30 - 39 tahun	77	40,9
40 - 49 tahun	78	41,5
>49 tahun	22	11,7
Pendidikan Terakhir		
SMA	18	9,6
Diploma	20	10,6
S1	128	68,1
S2	22	11,7
Pernah Merokok		
Ya	74	39,4
Tidak	114	60,6
Masih Merokok		
Ya	51	68,9
Tidak	23	31,1

Sumber : Data Primer

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah laki-laki, yaitu 52,7% dan responden perempuan 47,3%. Kelompok umur responden yang paling banyak adalah 40 – 49 tahun yaitu 41,5%, berbeda sedikit dengan kelompok umur 30 – 39 tahun yaitu 40,9%. Untuk tingkat pendidikan, ditemukan bahwa responden dengan tingkat pendidikan S1 adalah 68,1% dan tingkat pendidikan SMA adalah 9,6%. Responden yang pernah merokok yaitu 39,4% dan masih merokok yaitu 68,9%.

b. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Variabel	n = 188	%
Transmisi		
Baik	110	58,5
Kurang Baik	78	41,5
Kejelasan		
Baik	102	54,3
Kurang Baik	86	45,7
Konsistensi		
Baik	157	83,5
Kurang Baik	31	16,5
Komunikasi		
Baik	107	56,9
Kurang Baik	81	43,1

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros pada umumnya sudah baik. Untuk faktor transmisi ditemukan 58,5% responden menyatakan baik dan selebihnya 41,5% menyatakan kurang baik. Untuk faktor kejelasan ditemukan 54,3% responden yang menyatakan kejelasan informasinya sudah baik dan selebihnya 45,7% responden menyatakan kurang baik. Untuk faktor konsistensi, ditemukan 83,5% responden menyatakan baik dan selebihnya 16,5% menyatakan kurang baik. Untuk variabel

komunikasi, ditemukan 56,9% responden menyatakan komunikasinya sudah baik dan selebihnya 43,1% responden yang menyatakan komunikasi kurang baik.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 8 yang menyatakan bahwa peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah disosialisasikan sejak tahun 2014 dengan melibatkan semua instansi yang ada di Kabupaten Maros, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Begitu pula yang dinyatakan oleh informan 7 bahwa Bagian Hukum di Sekretariat Daerah biasa melakukan koordinasi dengan Satpol PP membahas tentang peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

c. Sumber Daya dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Sumber daya dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros dinilai dari beberapa faktor yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Variabel	n = 188	%
Staf		
Cukup	169	89,9
Kurang	19	10,1
Informasi		
Cukup	173	92,0
Kurang	15	8,0
Wewenang		
Cukup	176	93,6
Kurang	12	6,4
Fasilitas		
Cukup	172	91,5
Kurang	16	8,5
Sumber Daya		
Cukup	132	70,2
Kurang	56	29,8

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros pada umumnya sudah cukup. Untuk faktor staf, ditemukan 89,9% responden yang menyatakan sudah cukup dan selebihnya 10,1% menyatakan kurang. Untuk faktor informasi, ditemukan 92,0% responden menyatakan bahwa informasi KTR yang diterima sudah cukup dan selebihnya 8,0% menyatakan informasinya kurang. Untuk faktor wewenang, ditemukan 93,6% responden menyatakan cukup dan selebihnya 6,4% responden menyatakan kurang. Untuk fasilitas pendukung, ditemukan 91,5% responden menyatakan fasilitas cukup dan selebihnya 8,5% yang menyatakan kurang. Untuk variabel sumber daya, ditemukan

70,2% responden yang menyatakan sumber daya cukup dan selebihnya 29,8% menyatakan kurang.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 3 yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia mencukupi dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Begitu pula yang dinyatakan oleh informan 6 bahwa Bupati Maros telah menyiapkan semua fasilitas untuk mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

d. Disposisi dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Disposisi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Disposisi dalam Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Variabel	n = 188	%
Sikap		
Cukup	103	54,8
Kurang	85	45,2
Dukungan Pimpinan		
Cukup	179	95,2
Kurang	9	4,8
Disposisi		
Cukup	102	54,3
Kurang	86	45,7

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 54,8% responden sudah memiliki sikap yang cukup terhadap implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros dan selebihnya 45,2% responden yang memiliki sikap kurang. Untuk

faktor dukungan pimpinan, ditemukan 95,2% responden yang menyatakan bahwa dukungan pimpinan cukup mendukung keberhasilan implementasi kebijakan KTR dan selebihnya 4,8% responden menyatakan dukungan pimpinan masih kurang. Untuk variabel disposisi ditemukan 54,3% responden yang menyatakan cukup dan selebihnya 45,7% responden menyatakan kurang.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 9 yang menyatakan bahwa sangat setuju dengan ada peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan siap untuk melaksanakannya.

e. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Variabel	n = 188	%
SOP		
Baik	169	89,9
Kurang Baik	19	10,1
Fragmentasi		
Baik	156	83,0
Kurang Baik	32	17,0
Struktur Birokrasi		
Baik	150	79,8
Kurang Baik	38	20,2

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros pada umumnya sudah baik. Untuk faktor SOP ditemukan 89,9% yang menyatakan SOP sudah baik dan selebihnya 10,1% menyatakan kurang baik. Untuk faktor fragmentasi, ditemukan 83,0% yang menyatakan fragmentasi sudah baik dan selebihnya 17,0% menyatakan kurang baik. Untuk variabel struktur birokrasi, ditemukan 79,8% menyatakan struktur birokrasi sudah baik dan selebihnya 20,2% yang menyatakan struktur birokrasi kurang baik.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 10 yang menyatakan bahwa ada SOP dalam implementasi peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Para pelaksana harus membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum mereka turun ke lokasi. Begitu pula yang dinyatakan oleh informan 8 bahwa setiap akan melaksanakan tugas, harus dirembukkan dulu mengenai persiapan personil dan peralatan tugas.

f. Impelementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Penilaian terhadap
Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Implementasi Kebijakan KTR	n	%
Berhasil	107	56,9
Kurang Berhasil	81	43,1
Total	188	100,0

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas terdapat 6,9% responden yang menyatakan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah berhasil dilaksanakan di Kantor Bupati Maros dan selebihnya 43,1% menyatakan kurang berhasil.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 5 yang menyatakan bahwa implementasi peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sudah berhasil, karena sudah tidak ada orang yang merokok di ruangan. Begitu pula yang dinyatakan oleh informan 3 bahwa di Kantor Bupati Maros sudah terimplementasi dengan sangat baik. Informan 10 mengungkapkan bahwa khusus di lingkup Kantor Bupati Maros efektif sekali. Tidak ada lagi yang berani merokok kalau bukan di ruangan khusus merokok dan sesama pegawai bisa saling menegur kalau ada yang melanggar.

3. Analisis Bivariat

a. Hubungan Tingkat Pendidikan Responden terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan tingkat pendidikan responden terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hubungan Tingkat Pendidikan Responden terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
SMA	10	55,6	8	44,4	18	100,0
Diploma	15	75,0	5	25,0	20	100,0
S1	75	58,6	53	41,4	128	100,0
S2	7	31,8	15	68,2	22	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden yang berpendidikan SMA, 55,6% menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 44,4% menyatakan kurang berhasil. Dari 20 responden dengan pendidikan diploma, 75,0% menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 25,0% menyatakan kurang berhasil. Dari 128 responden dengan tingkat pendidikan S1, 58,6% menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil, dan selebihnya 41,4% menyatakan kurang berhasil.

Sedangkan 22 responden dengan tingkat pendidikan S2, 31,8% yang menyatakan implementasi kebijakan KTR ini berhasil dan selebihnya 68,2% menyatakan kurang berhasil.

b. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1) Hubungan Transmisi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan transmisi informasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Hubungan Transmisi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Transmisi Informasi KTR	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Baik	64	58,2	46	41,8	110	100,0
Kurang Baik	43	55,1	35	44,9	78	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 110 responden yang memiliki transmisi informasi baik, 58,2% menyatakan implementasi kebijakan KTR sudah berhasil dan selebihnya 41,8% yang menyatakan kurang berhasil. Dari 78 responden yang memiliki transmisi informasi kurang baik, 55,1% menyatakan implementasi

kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 44,9% menyatakan kurang berhasil.

2) Hubungan Kejelasan Informasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan kejelasan informasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Hubungan Kejelasan Informasi terhadap Implementasi
Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Kejelasan Informasi KTR	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Baik	52	51,0	50	49,0	102	100,0
Kurang Baik	55	64,0	31	36,0	86	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 102 responden yang memiliki kejelasan informasi baik, 51,0% di antaranya menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 47,1% menyatakan kurang berhasil. Dari 86 responden yang memiliki kejelasan informasi kurang baik, 64,0% menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 36,0% menyatakan kurang berhasil.

3) Hubungan Konsistensi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan konsistensi informasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Hubungan Konsistensi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Konsistensi Informasi KTR	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Baik	93	59,2	64	40,8	157	100,0
Kurang Baik	14	45,2	17	54,8	31	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 157 responden yang memiliki konsistensi informasi yang baik, 59,2% menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 40,8% menyatakan kurang berhasil. Dari 31 responden dengan konsistensi informasi yang kurang baik, 45,2% menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 54,8% menyatakan kurang berhasil.

4) Hubungan Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan komunikasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Hubungan Komunikasi terhadap Implementasi
Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Komunikasi	Implementasi Kebijakan KTR				n	%	p value
	Berhasil		Kurang Berhasil				
	n	%	n	%			
Baik	56	52,3	51	47,7	107	100,0	0,145
Kurang Baik	51	63,0	30	37,0	81	100,0	
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0	

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 107 responden dengan komunikasi baik, 52,3% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 47,7% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 81 responden dengan komunikasi kurang baik, 63,0% di antaranya menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 37,0% lainnya menyatakan kurang berhasil.

Hasil analisis uji chi square didapatkan p value (0,145) > α (0,05) artinya tidak ada hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

c. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1) Hubungan Staf terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan staf terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hubungan Staf terhadap Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Staf	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Cukup	94	55,6	75	44,4	169	100,0
Kurang	13	68,4	6	31,6	19	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 169 responden yang menyatakan staf cukup, 55,6% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 44,4% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 19 responden yang menyatakan staf kurang, 68,4% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 31,6% menyatakan kurang berhasil.

2) Hubungan Informasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan informasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Hubungan Informasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Informasi	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Cukup	97	56,1	76	43,9	173	100,0
Kurang	10	66,7	5	33,3	15	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 173 responden yang menyatakan informasi cukup, 56,1% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 43,9% menyatakan masih kurang berhasil. Sedangkan dari 15 responden yang menyatakan informasi kurang baik, 66,7% yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 33,3% menyatakan kurang berhasil.

3) Hubungan Wewenang terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan wewenang terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Hubungan Wewenang terhadap Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Wewenang	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Cukup	103	58,5	73	41,5	176	100,0
Kurang	4	33,3	8	66,7	12	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 176 responden yang dengan wewenang cukup, 58,5% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 41,5% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 12 responden dengan wewenang kurang, 33,3% menyatakan implementasi kebijakan KTR sudah berhasil dan 66,7% menyatakan kurang berhasil.

4) Hubungan Fasilitas terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan fasilitas terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Hubungan Fasilitas terhadap Implementasi Kebijakan KTR
di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Fasilitas	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Cukup	97	56,4	75	43,6	172	100,0
Kurang	10	62,5	6	37,5	16	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 172 responden yang menyatakan fasilitas cukup, 56,4% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 43,6% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 16 responden yang menyatakan fasilitas kurang, 62,5% menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 37,5% menyatakan kurang berhasil.

5) Hubungan Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan sumber daya terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Hubungan Sumber Daya terhadap Implementasi
Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Sumber Daya	Implementasi Kebijakan KTR				n	%	<i>p</i> value
	Berhasil		Kurang Berhasil				
	n	%	n	%			
Cukup	74	56,1	58	43,9	132	100,0	0,716
Kurang	33	58,9	23	41,1	56	100,0	
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0	

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 132 responden yang menyatakan sumber daya cukup, 56,1% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 43,9% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 56 responden yang menyatakan sumber daya kurang, 58,9% menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 41,1% menyatakan kurang berhasil.

Berdasarkan hasil analisis uji *chi square* didapatkan *p* value (0,716) > α (0,05) artinya tidak ada hubungan antara sumber daya terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

d. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1) Hubungan sikap responden terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan sikap responden terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17
Hubungan Sikap Responden terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Sikap	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Cukup	65	63,1	38	36,9	103	100,0
Kurang	42	49,4	43	50,6	85	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 103 responden yang memiliki sikap cukup terhadap implementasi kebijakan KTR, 63,1% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 36,9% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 85 responden yang memiliki sikap kurang terhadap implementasi kebijakan KTR, 49,4% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan 50,6% lainnya menyatakan kurang berhasil.

2) Hubungan dukungan pimpinan terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan dukungan pimpinan terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Hubungan Dukungan Pimpinan terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Dukungan Pimpinan	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Cukup	104	58,1	75	41,9	179	100,0
Kurang	3	33,3	6	66,7	9	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 179 responden yang menyatakan dukungan pimpinan cukup, 58,1% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 41,9% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 9 responden yang menyatakan bahwa dukungan pimpinan kurang, 33,3% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan 66,7% menyatakan kurang berhasil.

3) Hubungan disposisi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan disposisi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Hubungan Disposisi terhadap Implementasi
Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Disposisi	Implementasi Kebijakan KTR				n	%	p value
	Berhasil		Kurang Berhasil				
	n	%	n	%			
Cukup	65	63,7	37	36,3	102	100,0	0,040
Kurang	42	48,8	44	51,2	86	100,0	
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0	

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 102 responden yang menyatakan disposisi cukup, 63,7% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan 36,3% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 86 responden yang menyatakan disposisi kurang, 48,8% menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan 51,2% menyatakan kurang berhasil.

Berdasarkan hasil analisis uji *chi square* didapatkan p value (0,040) < α (0,05) artinya ada hubungan antara disposisi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

e. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1) Hubungan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Hubungan Standar Operasional Prosedur terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP)	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Baik	95	56,2	74	43,8	169	100,0
Kurang Baik	12	63,2	7	36,8	19	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 169 responden yang menyatakan standar operasional prosedur (SOP) baik, 56,2% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 43,8% lainnya menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 19 responden yang menyatakan standar operasional prosedur (SOP) kurang baik, 63,2% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 36,8% lainnya menyatakan kurang berhasil.

2) Hubungan Fragmentasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan fragmentasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Hubungan Fragmentasi terhadap Implementasi
Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

Fragmentasi	Implementasi Kebijakan KTR				n	%
	Berhasil		Kurang Berhasil			
	n	%	n	%		
Baik	88	56,4	68	43,6	156	100,0
Kurang Baik	19	59,4	13	40,6	32	100,0
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 156 responden yang menyatakan fragmentasi baik, 56,4% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 43,6% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 32 responden yang menyatakan fragmentasi kurang baik, 59,4% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 40,6% menyatakan kurang berhasil.

3) Hubungan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hubungan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Hubungan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros Tahun 2019

Struktur Birokrasi	Implementasi Kebijakan KTR				n	%	p value
	Berhasil		Kurang Berhasil				
	n	%	n	%			
Baik	85	56,7	65	43,3	150	100,0	0,891
Kurang Baik	22	57,9	16	42,1	38	100,0	
Total	107	56,9	81	43,1	188	100,0	

Sumber : Data Primer

Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 150 responden yang menyatakan struktur birokrasi baik, 56,7% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 43,3% menyatakan kurang berhasil. Sedangkan dari 38 responden yang menyatakan struktur birokrasi kurang baik, 57,9% di antaranya menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil dan selebihnya 42,1% menyatakan kurang berhasil.

Berdasarkan hasil analisis uji *chi square* didapatkan p value (0,891) > α (0,05) artinya tidak ada hubungan antara struktur

birokrasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

4. Hasil Wawancara Mendalam

a. Gambaran Umum Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, para Kepala Bagian dalam lingkungan Kantor Bupati Maros, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja. Peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada 10 (sepuluh) informan yang terdiri dari 7 orang Kepala Bagian, 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 1 orang Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 orang Sekretaris Daerah yang menjadi informan kunci. 8 orang informan berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan. Gambaran umum tentang karakteristik informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Karakteristik Informan Penelitian
Implementasi Kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros
Tahun 2019

No	Inisial	Umur (thn)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Informan 1	52	L	S2
2	Informan 2	56	L	S2
3	Informan 3	53	P	S2
4	Informan 4	49	P	S1
5	Informan 5	58	L	S1
6	Informan 6	57	L	S1
7	Informan 7	54	L	S1
8	Informan 8	58	L	S2
9	Informan 9	45	L	S1
10	Informan 10	57	L	S2

Sumber : Data Primer

b. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan tidak ada hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masuk dalam kategori baik. Hasil wawancara mendalam menunjukkan semua informan menyatakan komunikasi berjalan dengan baik dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor

Bupati Maros. Berikut ini kutipan wawancara terkait komunikasi kepada informan :

1) Pengetahuan informan tentang adanya Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara semua informan mengikuti sosialisasi dan mengetahui adanya Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Dengan sendirinya saya tahu, dari sosialisasi disampaikan bahwa ada kawasan dilarang merokok.”

(Informan 1, 52 Tahun)

“Semuakan diwajibkan untuk ikut sosialisasi, kalau tidak salah itu disini Aula pendopo.”

(Informan 3, 53 Tahun)

“Kalau sosialisasi sudah di semua pegawai, termasuk dalam bentuk papan informasi, spanduk dan sticker.”

(Informan 7, 54 Tahun)

“Ya, saya ikut. Kita sudah sosialisasi waktu tahun 2014 dihadiri oleh semua instansi di Kabupaten Maros.”

(Informan 8, 58 Tahun)

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa informan mengetahui adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok dan mengikuti sosialisasinya. Hasil wawancara dengan informan kunci setidaknya mampu dijadikan alasan bahwa semua pegawai di Kabupaten Maros harus mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini dibuktikan dengan adanya undangan

dari Pemerintah Kabupaten Maros kepada semua instansi untuk menghadiri sosialisasi peraturan daerah tersebut.

“Saat sosialisasi saya tahu, karena diundang semua pimpinan SKPD, termasuk semua pegawai, ada juga dari organisasi..”
(Informan 10, 57 Tahun)

2) Pengetahuan informan tentang area yang wajib mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengetahui area yang wajib mengimplementasikan KTR dan ada yang dapat menyebutkan dengan baik dan jelas area mana saja.

“Yang saya tahu itu wilayah KTR, kantor-kantor, rumah sakit, sekolah, puskesmas, pasar.”
(Informan 2, 56 Tahun)

“Tempat umum, sekolahan, tempat-tempat ekonomi, tempat kerja seperti kantor bupati ini, termasuk fasilitas kesehatan, olahraga, Rumah Sakit.”
(Informan 5, 58 Tahun)

“Di kantor bupati tidak boleh merokok. Puskesmas, ada juga papan bicara disana, masjid, sekolah.”
(Informan 7, 54 Tahun)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan sudah mengetahui area mana saja yang masuk dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Informan mengetahui area Kawasan Tanpa Rokok dari fasilitas yang ada di tempat-tempat tersebut, seperti spanduk, tanda larangan merokok dan papan bicara.

3) Konsistensi komunikasi internal dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan mengaku tidak pernah ada komunikasi internal yang dilakukan untuk membahas Perda Kawasan Tanpa Rokok, tapi hanya sebatas saling mengingatkan.

“Dalam bentuk pertemuan tidak pernah dibahas, tapi kalau saling mengingatkan kalau diruangan tidak boleh merokok sudah biasa.”

(Informan 1, 52 Tahun)

“Saya rasa belum pernah ikut, tidak tahu kalau di kantor Pol PP disana.”

(Informan 2, 56 Tahun)

“Kalau sesama pegawai, kalau diruanganku pak toh, saya bilangji sama pegawai yang laki-laki, kalau mauki merokok, janganki diruangan.”

(Informan 3, 53 Tahun)

“Kalau pertemuan khusus membahas ini saya tidak pernah ikut.”

(Informan 6, 57 Tahun)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian informan tidak pernah mengikuti pertemuan internal untuk membahas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Informan menyatakan bahwa sesama pegawai di kantor bupati Maros bisa saling mengingatkan bila ada yang melanggar.

Sebagian informan juga menyatakan bahwa sebelum melaksanakan tugas, sesuai SOP terlebih dahulu melakukan pertemuan internal untuk membahas tugas-tugas yang akan

dilaksanakan dilapangan termasuk implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Kami di bagian hukum biasa koordinasi dengan Satpol PP membahas tentang perda yang ada di Kabupaten Maros termasuk Perda KTR.”

(Informan 7, 54Tahun)

“Wah harus begitu, ada SOP nya harus dirembukkan dulu bersama..”

(Informan 8, 58.Tahun)

Hasil wawancara dengan informan kunci juga menyatakan bahwa selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada pegawai untuk mematuhi Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Bupati pernah 1 kali mengundang kepala SKPD, kepala bagian untuk membahas ini. Bupati menyampaikan kalau tidak boleh merokok di kantor, karena sudah adami aturannya. Jadi kalau rapat dengan pegawai, saya bilangmi janganki merokok disini..”

(Informan 10, 57 Tahun)

c. Sumber daya dalam Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan tidak ada hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masuk dalam kategori cukup. Hasil wawancara mendalam menunjukkan semua informan menyatakan sumber daya mencukupi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok di Kantor Bupati Maros. Berikut ini kutipan wawancara terkait sumber daya kepada informan :

1) Kesiapan staf dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa yang menjadi pengawas implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

“Itukan semua perda ke Satpol PP untuk mengamankan perda.”

(Informan 2, 56 Tahun)

“Yang jelas kalau tupoksinya Satpol PP kan itu diperaturan bupati mereka penegak perda.”

(Informan 7, 54 Tahun)

“Anggota melaksanakan tugasnya dengan baik, harus itu. Sebelum patroli saya kumpulkan dulu kemudian saya ingatkan kembali ke mereka tentang tugasnya.”

(Informan 8, 58 Tahun)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan Satpol PP adalah penegak semua perda yang ada di Kabupaten Maros, termasuk Perda Kawasan Tanpa Rokok. Ada juga informan yang menyatakan bahwa para pimpinan bisa menjadi pengawas implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan SDM di Kantor Bupati Maros sudah cukup untuk mengimplementasikan perda tersebut.

“Para pimpinan seperti kabag, asisten.”

(Informan 1, 52 Tahun)

“SDM nya mencukupi dan kita harus mengikuti perda ini. Biasa ada sidak Pak Bupati dengan Satpol PP.”

(Informan 3, 53 Tahun)

Hasil wawancara dengan informan kunci diperoleh keterangan bahwa Bagian Hukum dan Satpol PP yang menjadi pengawas dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Tupoksinya di bagian hukum, Satpol PP, jadi terbagi itu. Yang jelas fungsi pengawasannya itu kan di Satpol PP. Jadi Satpol PP memang ada keliling kan, di area kantor bupati ..”
(Informan 10, 57 Tahun)

2) Kewenangan pelaksana dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan Perda Kawasan Tanpa Rokok adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

“Kewenangan pelaksana itu bisa menegur. Jadi Satpol PP akan menegur bila ada pegawai yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.”
(Informan 1, 52 Tahun)

“Satpol PP karena dia yang menangani langsung turun menyidak bersama bupati.”
(Informan 3, 53 Tahun)

“Selama ini cuman di Satpol PP. Kadang-kadang ditegur, ya cuman teguran. Sanksi belum ada.”
(Informan 4, 49 Tahun)

“Jadi kalau kami melihat pegawai yang merokok di bukan di tempatnya, kami tegur pak, karena memang kami katakan kamu melanggar perda. Anda jangan merokok disini.”
(Informan 9, 45 Tahun)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa semua informan menyatakan kewenangan ada pada Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangannya dalam bentuk menegur pegawai apabila ada yang merokok dalam kantor bupati dan bersama dengan Bupati Maros melaksanakan inspeksi mendadak ke setiap ruangan yang ada di Kantor Bupati Maros. Menurut informan, kewenangan yang belum dilaksanakan adalah memberikan sanksi kepada orang yang melanggar perda, sehingga tidak memberikan efek jera pada pelanggar tersebut.

3) Tersedianya fasilitas dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa sumber daya pendukung sudah tersedia dan mencukupi dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros.

“Jadi sudah ada area untuk merokok. Dilantai 2 ada 2 ruangan diatas itu kiri kanan dibawah juga ada. Ada juga CCTV yang memantau.”

(Informan 2, 56 Tahun)

“Semua ruangan dipasang sticker , spanduk Kawasan Tanpa Rokok, termasuk poster. ada kawasan ruangan khusus untuk merokok.”

(Informan 3, 53 Tahun)

“Dipasang spanduknya, sticker dan papan besarnya.”

(Informan 4, 49 Tahun)

“Kita arahkan untuk merokok diruangan merokok, kita buat papan bicara, sticker semua ditempel di setiap sudut dan pintu ruangan dan tempat-tempat strategis, bahkan sudah dibuat ruangan khusus untuk merokok itu dilantai 2.”

(Informan 8, 58. Tahun)

“Pak bupati sudahmi napikirkan sarananya. Adami disiapkan ruangan untuk merokok di lantai 2, adami papan bicara, poster, spanduk, leaflet, sticker..”

(Informan 10, 57 Tahun)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa semua informan menyatakan kalau fasilitas dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, seperti ruangan khusus merokok, spanduk, sticker, poster, leaflet, CCTV dan papan bicara. Fasilitas tersebut sudah ada di dalam kantor bupati dan sudah disebarakan ke area-area yang masuk dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Maros.

d. Disposisi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan ada hubungan antara disposisi dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masuk dalam kategori cukup. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa semua informan menyatakan disposisi sangat mendukung dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros. Berikut ini kutipan wawancara terkait disposisi kepada informan :

1) Sikap dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut memang harus diatur karena cukup banyak yang merokok di dalam kantor bupati sebelum adanya perda tersebut.

“Setuju sekali, terutama bagi kami atau pegawai yang tidak merokok..”

(Informan 2, 56 Tahun)

“Kalau saya sebagai pegawai saya setuju sekali atas perda yang dikeluarkan oleh Pak Bupati. Ini memang harus diatur pak.”

(Informan 3, 53 Tahun)

Sebagian informan menyatakan bahwa bagi para perokok merasa tidak setuju dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok.

“Laki-laki banyak yang perokok pak, setelah adanya aturan ini, mereka curi kesempatan merokok, mungkin tidak setuju..”

(Informan 4, 58 Tahun)

“Yang perokok tentu saya kira nda, tapi bagaimanapun juga karena ini aturan, ya harus dilakukan dan dilaksanakan.”

(Informan 6, 57 Tahun)

“Mungkin ada yang tidak setuju, karena mengganggu kenyamanannya, selama ini mereka merokok sembarangan, sekarang harus curi waktu luang untuk merokok.”

(Informan 7, 54 Tahun)

Kutipan wawancara di atas, informan menyatakan bahwa bagi pegawai yang merokok, merasa tidak setuju dengan adanya

peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok, karena mengganggu kenyamanannya. Informan juga menyatakan karena ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Maros, maka harus ditegakkan dan dilaksanakan.

2) Sikap terhadap perokok dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menjelaskan kalau ada pegawai yang merokok akan langsung diberi teguran dan diminta untuk merokok di area yang sudah disediakan., termasuk tamu yang berkunjung ke kantor bupati akan di minta untuk merokok di ruangan khusus merokok.

“Kalau ada yang merokok, saya tegur, saya suruh ke ruangan khusus merokok.”

(Informan 1, 52 Tahun)

“Kalau yang merokok saya biasanya langsung tegur.”

(Informan 3, 53 Tahun)

“Iya, kadang-kadang kalau ada yang merokok diruang publik, kita kasi peringatanlah kalau ini kawasan tidak boleh merokok.”

(Informan 4, 49 Tahun)

“Jangankan ASN, tamu saja, kalau ada yang merokok kami tunjukkan ruangan merokok..”

(Informan 10, 57 Tahun)

3) Dukungan Bupati Maros dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa Bupati Maros sangat mendukung adanya

Perda Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini karena Bupati Maros yang menjabat saat ini adalah yang mengeluarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, menjadi contoh yang ideal karena Bupati Maros tidak merokok, menyediakan sarana dan prasarana pendukung dan turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke ruangan kerja pegawai yang ada di kantor bupati maupun di instansi lain.

“Pak Bupati sangat mendukung, pertama beliau yang mengeluarkan perda, kedua beliau tidak merokok, ketiga sudah menyediakan sarana dan prasarana pendukung perda.”
(Informan 1, 52 Tahun)

“..Beliau yang menegur langsung pegawai yang masih merokok diruangan kerja, jadi pasti sangat mendukung.”
(Informan 2, 56 Tahun)

“Sangat mendukung, ketika mensosialisasikan perda ini, sudah dibuatkan juga ruangan khusus merokok. Bahkan Pak Bupati biasa melakukan sidak.”
(Informan 3, 53 Tahun)

“Mendukung sekali, biasaki pak bupati keliling itu bersama Pol PP untuk mengecek setiap ruangan.”
(Informan 5, 58 Tahun)

e. Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan tidak ada hubungan antara struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masuk dalam kategori baik. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan ada struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok di Kantor Bupati Maros. Berikut ini kutipan wawancara terkait struktur birokrasi kepada informan :

1) Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa Perda Kawasan Tanpa Rokok sudah ada SOP nya dan sudah dilaksanakan dengan baik. SOP tersebut terdapat dalam draft peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. SOP tersebut seperti melakukan pertemuan sebelum turun langsung ke lokasi, menyiapkan berkas peraturan daerah serta menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut.

“Petunjuk pelaksanaan yang ada, biasanya tertulis di Perdanya dan disampaikan ke seluruh staf, itumi juga SOP nya.”
(Informan 2, 56 Tahun)

“SOP pasti ada ini. Yang tangani ini tentunya bagian hukum, Satpol PP juga karena dia yang turun menyidak.”
(Informan 3, 53 Tahun)

“SOP kita yaitu 1. Bahwa setiap kita mau penegakan perda itu, harus dirembukkan dulu bersama, 2. Kalau kita mau patroli siapkan mobil, siapkan sempritan, siapkan berkas perdanya, siapkan berapa jumlah personil, siapkan ini dan itu.”
(Informan 8, 58 Tahun)

“..Ada itu, kalau Satpol PP mau melakukan tugasnya untuk melaksanakan ini perda, mereka harus bahas dulu langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan..”
(Informan 10, 57 Tahun)

Dari hasil wawancara, ada informan yang mengatakan kalau tidak mengetahui adanya SOP dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

“Nda paham saya kalau masalah SOP nya, terus terang saya tidak masuk dalam struktur komite itu, saya nda paham.”
(Informan 1, 52 Tahun)

2) Fragmentasi dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP dan juga menjadi tanggung jawab bagi semua pegawai untuk melaksanakannya.

“Tapi sesama kita pegawai disini, kalau saya, saya tegur pak orang yang merokok dalam ruangan.”
(Informan 2, 56 Tahun)

“Setiap pegawai seharusnya bisa bertanggung jawab terhadap peraturan daerah yang ada.”
(Informan 4, 49 Tahun)

“Pol PP sebagai penegak perda, mereka yang mengimplementasikan. Setiap pegawai juga harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perda KTR.”
(Informan 6, 57 Tahun)

“Penegak kebijakan ini memang Satpol PP, namun bukan berarti mereka sepenuhnya yang melaksanakannya. Harus ada kerja sama dengan semua instansi, semua pegawai.”
(Informan 10,, 57 Tahun)

Dari hasil wawancara, ada informan yang menyatakan kalau seharusnya para pimpinan yang memberikan himbauan dan contoh.

“Ada himbauan dan contoh dari para pimpinan, itu intinya disitu. Para pimpinan seperti kabag, asisten tidak merokok di dalam ruangan.”

(Informan 1, 52 Tahun)

Dari hasil wawancara, beberapa informan menyatakan kalau tanggung jawab implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ada pada Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja.

“..akan ke bagian hukum. Penegak perda itu adalah Pol PP, kami menyampaikan bahwa ada aturan seperti ini dan mereka akan melaksanakannya.”

(Informan 7, 54 Tahun)

“Sebelum patroli saya kumpulkan dulu kemudian saya ingatkan kembali ke mereka tentang tugasnya yang harus dilaksanakan.”

(Informan 8, 58 Tahun)

“Setiap hari diatur jadwal, namanya mutasi, disamping dia tulis di mutasinya dia juga melapor sama saya, saya lapor ke atasan saya.”

(Informan 9, 45 Tahun)

- f. Tanggapan dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**
- 1) Hambatan dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan yang menyatakan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok adalah masih ada pegawai yang mengambil kesempatan untuk merokok di dalam lingkungan kantor bupati. Kemudian penerapan sanksi yang belum ditegakkan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar kebijakan ini.

“Hambatannya di ASN yang masih merokok di tempat yang dilarang. Selain itu penerapan sanksi yang belum ditegakkan.”
(Informan 1, 52 Tahun)

“..perlu lebih ditingkatkan lagi penegakan perda ini, bisa di sanksinya dan bisa juga di pengawasannya.”
(Informan 4, 49 Tahun)

“Pemberian sanksi saya kira belum, inikan untuk penyadaran..”
(Informan 5, 58 Tahun)

Dari hasil wawancara, ada informan yang menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini karena sudah adanya kesadaran dari pegawai untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau hambatan tidak adaji yang terlalu..”
(Informan 2, 56 Tahun)

“Tidak adaji hambatan, kesadaran yang tinggi untuk tidak merokok diruangan. Kita berterima kasih kepada pak bupati atas munculnya ini aturan..”
(Informan 6, 57 Tahun)

2) Usaha yang dilakukan untuk menciptakan ruangan bebas asap rokok

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menjelaskan bahwa sudah ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok. Usaha yang dilakukan adalah menyediakan ruangan khusus merokok, inspeksi mendadak, membuat media informasi seperti spanduk, poster, papan bicara, sticker, leaflet dan tanda larangan merokok. Selain itu, saling mengingatkan

sesama pegawai juga sudah dilaksanakan dalam implementasi peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok.

“Kalau usaha, saya biasa mengingatkan teman-teman disini yang merokok supaya keruangan yang sudah disediakan.”
(Informan 2, 56 Tahun)

“Banyak pak usaha yang sudah dilakukan, adami dibuat papan bicara, poster, tanda larangan merokok, ruangan khusus merokok.”
(Informan 3, 53 Tahun)

“Ada sosialisasi, sudah banyak dibuat media-media supaya orang tidak merokok.”
(Informan 4, 49 Tahun)

“Kami melakukan sidak bersama pak bupati, kalau ada asbak atau rokok, akan kami sita. Bupati langsung menegur bila ada yang merokok.”
(Informan 8, 58 Tahun)

3) Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah berhasil diterapkan di Kantor Bupati Maros. Berhasilnya implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok karena semua pegawai sudah mengetahui adanya peraturan daerah ini, sudah tersedianya sarana dan prasarana pendukung, serta tidak ada lagi yang merokok di dalam ruangan kerja pegawai.

“Pelaksanaan perda ini berhasil karena orang sudah tahu bahwa disini tidak boleh merokok, kalau merokok sudah ada fasilitas tempat merokok.”
(Informan 1, 52 Tahun)

“Implementasi perda ini cukup berhasil, dimana kita sudah jarangmi melihat orang yang merokok didalam ruangan..”
(Informan 2, 56 Tahun)

“Alhamdulillah, di kantor bupati sendiri itu sudah terimplementasi dengan sangat baik.”
(Informan 3, 53 Tahun)

“Saya berfikir perda dilarang merokok ini sangat berhasil.”
(Informan 9, 45 Tahun)

Dari hasil wawancara, dua informan menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih perlu ditingkatkan dalam implementasi dan pengawasannya. Hal ini karena masih ditemukannya orang yang merokok dalam area kantor bupati Maros.

“Masih perlu ditingkatkan agar perda ini benar-benar bisa ditegakkan, karena saya akui masih ada yang merokok di lorong-lorong dalam kantor.”
(Informan 4, 49 Tahun)

“Kalau keberhasilannya ada presentasinya ya, tapi paling tidak ada perubahan. Nah untuk memaksimalkan memang harus ada pengawasan secara rutin, berkala dan berkelanjutan.”
(Informan 8, 58 Tahun)

Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sudah berhasil.

“Kalau khusus untuk lingkup kantor bupati ini efektif sekali. Tidak ada lagi yang berani merokok itu kalau tidak di tempatnya. Tidak ada lagi yang membandel itu, nda adalah..”
(Informan 10, 57 Tahun)

Matriks 4.1. **MATRIKS HASIL PENELITIAN**

No	Variabel	Hasil Kuantitatif	Hasil Kualitatif
1.	Komunikasi	Sebesar 52,3% responden dengan komunikasi baik menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil, sedangkan selebihnya 47,7% responden menyatakan kurang berhasil.	"Ada sosialisasi karena Perda ini sebenarnya harus melibatkan stakeholder yang ada, dari kesehatan termasuk DPR, kemudian disosialisasikan ke bawah." (Informan 6, 57 tahun)
			"Dalam bentuk pertemuan tidak pernah dibahas, tapi kalau saling mengingatkan kalau diruangan tidak boleh merokok sudah biasa." (Informan 1, 52 tahun)
2.	Sumber Daya	Sebesar 56,1% responden dengan sumber daya cukup menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil, sedangkan selebihnya 43,9% responden menyatakan kurang berhasil.	"SDM nya mencukupi dan kita harus mengikuti perda ini. Biasa ada sidak Pak Bupati dengan Satpol PP." (Informan 3, 53 tahun)
			"Pak Bupati sudah mi napikirkan sarananya. Adami disiapkan ruangan untuk merokok di lantai 2, adami papan bicara, poster, spanduk, leaflet, sticker..." (Informan 10, 57 tahun)
3.	Disposisi	Sebesar 63,7% responden dengan disposisi cukup menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR berhasil, sedangkan selebihnya 36,3% responden menyatakan kurang berhasil.	"Setuju sekali, terutama bagi kami pegawai yang tidak merokok.." (Informan 2, 56 tahun)
			"Pak Bupati sangat mendukung, pertama beliau yang mengeluarkan perda, kedua beliau tidak merokok, ketiga sudah menyediakan sarana dan prasarana pendukung perda." (Informan 1, 52 tahun)

4.	Struktur Birokrasi	Sebesar 56,7% responden dengan struktur birokrasi baik menyatakan implementasi kebijakan KTR berhasil, sedangkan selebihnya 43,3% responden menyatakan kurang berhasil.	<p>"...ada itu, kalau Satpol PP mau melakukan tugasnya untuk melaksanakan ini perda, mereka harus bahas dulu langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan.." (Informan 10, 57 tahun)</p> <p>"Satpol PP sebagai penegak perda, mereka yang mengimplementasikan. Setiap pegawai juga harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perda KTR." (Informan 6, 57 tahun)</p>
----	--------------------	---	---

Matriks diatas menunjukkan bahwa berdasarkan data kuantitatif dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, pada umumnya responden menyatakan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros berhasil. Hal ini di dukung oleh data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam pada beberapa informan.

B. Pembahasan

a. Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat diwajibkan oleh setiap pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Terbukti dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yaitu mulai dari usia sekolah dasar hingga SMP, yang masuk dalam sistem aturan wajib belajar 9 tahun, kemudian jenjang sekolah lanjutan/kejuruan hingga

tingkat perguruan tinggi baik itu diploma, sarjana, magister, doktor hingga profesor.

Semakin tinggi tingkat pendidikan responden diharapkan bahwa responden akan semakin bijak dalam memberikan penilaian terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang ada. Karena pola pikir antara mereka yang menempuh pendidikan dengan mereka yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan pasti akan berbeda. Dunia pendidikan memungkinkan seseorang untuk memiliki pola pikir yang lebih ilmiah, terstruktur dan berdasarkan fakta yang ada.

Dalam penelitian ini pada umumnya responden menilai bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sudah berhasil. Hasil yang paling tinggi terlihat pada responden yang memiliki latar pendidikan diploma, yaitu sebanyak 15 orang (75%), sedikit berbeda jika dibandingkan dengan responden dari latar belakang pendidikan SMA sebanyak 10 orang (55,6%) dan Sarjana (S1) sebanyak 75 orang (58,6%). Hal sebaliknya justru ditemukan pada responden dengan latar belakang pendidikan magister (S2), dimana sebagian besar dari mereka yaitu sebanyak 15 orang (68,2%) justru menilai bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros masih kurang berhasil.

b. Hubungan Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Komunikasi merupakan proses pemberian informasi kepada petugas pelaksana kebijakan. Informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarakan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi (Subarsono, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 56,9% responden memiliki komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros. Komunikasi ini diukur dengan menggunakan tiga faktor yang menjadi bagian dalam komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi yang diterima oleh responden.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018), dimana faktor komunikasi pada implementasi Kawasan Tanpa Rokok di RSI Faisal Kota Makassar berjalan dengan baik. Dimana

transmisi, kejelasan dan konsistensi dari implementasi Kawasan Tanpa Rokok berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan serta disesuaikan dengan kebijakan yang ada.

Transmisi informasi merupakan penyebaran informasi terkait suatu kebijakan. Pemerintah harus mentransmisikan informasi kepada pelaksana kebijakan agar mereka mengerti akan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah diterima dengan baik oleh pegawai yang ada di Kantor Bupati Maros, terlihat bahwa sebanyak 58,5% responden yang memiliki transmisi informasi dalam kategori baik. Ditemukan bahwa sebanyak 81,9% responden menyatakan pernah mendapatkan informasi tentang kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros. Sebanyak 72,3% responden menyatakan pernah dilaksanakan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan sebanyak 65,4% responden yang menyatakan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi kebijakan KTR tersebut. Tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi, informasi mengenai kebijakan KTR ini juga diperoleh responden dari berbagai jenis media informasi seperti spanduk, banner, poster, stiker dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak NA bahwa sosialisasi dilakukan pada semua pegawai, termasuk dalam bentuk papan informasi, spanduk dan stiker.

Selain transmisi, kejelasan informasi juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam keberhasilan suatu proses komunikasi. Kejelasan informasi menghendaki agar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini ditransmisikan secara jelas kepada pelaksana dan pihak lain yang diharapkan, sehingga mereka mengetahui apa yang perlu dipersiapkan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 54,3% responden telah memiliki kejelasan informasi yang baik terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Sebanyak 98,9% responden mengetahui pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 80,9% responden mengetahui tujuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan sebanyak 99,5% responden mengetahui manfaat dari penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Secara umum responden mengetahui area yang wajib mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok, kecuali pada tempat umum dan angkutan kendaraan umum ditemukan hanya sebanyak 56,9% dan 53,2% responden yang menjawab benar. Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak PR, menyebutkan yang menjadi wilayah KTR itu adalah area Kantor Bupati Maros, daerah perkantoran, rumah sakit, sekolah, masjid, tempat anak-anak bermain dan puskesmas. Dan wawancara pada Bapak BB, yang menyebutkan bahwa area KTR itu adalah kantor-kantor, rumah sakit, sekolah, puskesmas dan pasar.

Selanjutnya mengenai konsistensi informasi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pihak pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, konsistensi informasi diukur dengan melihat sejauh mana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini tidak mengalami perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 83,5% responden menyatakan konsistensi informasi yang baik dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros. Hal ini dapat dilihat bahwa lebih dari 90,0% responden pada umumnya menyatakan tidak pernah dilakukan perubahan baik isi aturan, tujuan, sasaran, tugas dan tanggung jawab serta sanksi dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Secara aturan tertulis sanksi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini memang tidak mengalami perubahan, hanya saja dalam hal penegakan sanksi ini yang masih belum terlaksana. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak AW, bahwa pemberian sanksi yang kurang tegas, sejauh ini hanya sebatas sanksi teguran, sedangkan denda belum pernah ada.

Dari hasil tabel silang antara komunikasi dan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros dapat dilihat bahwa 52,3% keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disebabkan adanya komunikasi yang baik. Sedangkan pada hasil uji *chi square* didapatkan p value (0,145) > α (0,05) yang artinya

tidak ada hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

c. Hubungan Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya di sini meliputi manusia sebagai pelaksana kebijakan dan sumber daya pendukung seperti informasi, wewenang dan fasilitas.

Sumber daya pada proses implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros berhubungan dengan kesiapan dari pihak pelaksana. Berikut hasil penelitian mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat dalam penelitian ini diukur dengan melihat keberadaan komite atau tim pengawas dalam implementasi kebijakan KTR. Komite ini yang bertugas untuk mengimplementasikan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Kantor Bupati Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 89,9% responden menyatakan bahwa sumber daya manusia (staf) sudah cukup. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros dibentuk dalam suatu komite atau tim

pengawas. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 93,6% responden menyatakan ada komite atau tim pengawas yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan KTR.

Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros yang bertugas sebagai komite atau tim pengawas implementasi kebijakan KTR adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Kabupaten Maros. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak NA bahwa semua itu merupakan tupoksi dari Satpol PP karena mereka sebagai penegak Perda. Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak BB bahwa Satpol PP yang bertugas untuk mengamankan semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Maros.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk yaitu informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 92,0% responden menyatakan informasi dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros sudah dikategorikan cukup. Karena sudah banyak media informasi yang ada di dalam lingkungan

kantor Bupati Maros seperti poster, sticker dan tanda larangan merokok yang bisa dilihat langsung oleh pegawai dan pengunjung. Seperti yang diungkapkan oleh informan IRH bahwa semua sudut ruangan yang bisa di lihat oleh orang sudah ada sticker, spanduk dan poster tentang kawasan tanpa rokok.

3. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Terkait implementasi kebijakan KTR ini, kewenangan ini diukur dengan melihat sejauh mana pelaksana KTR memiliki kewenangan dalam menegur dan memberikan sanksi kepada para pegawai yang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 93,6% responden menyatakan kewenangan dikategorikan cukup. Hanya dalam pelaksanaannya terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan KTR ini hanya sebatas dalam memberikan teguran pada orang yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros. Sedangkan untuk penegakan sanksi denda sampai saat ini belum pernah ditegakkan. Seperti yang diungkapkan oleh informan NA bahwa Satpol PP sebagai penegak Perda bisa untuk menegur pegawai yang merokok, tapi hanya sebatas teguran karena sanksi belum pernah yang ada diberikan sanksi denda. Sejalan dengan informan DBS yang menyatakan bahwa selama ini hanya Satpol

yang menegur hanya sebatas teguran, karena sanksi belum pernah ada.

4. Fasilitas

Selain sumber daya manusia, sumber daya pendukung atau fasilitas juga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya pendukung atau fasilitas di sini dapat berupa aturan, pemasangan tanda larangan merokok dan sebagainya. Sumber daya pendukung seperti spanduk, poster dan aturan akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan KTR. Keterbatasan sumber daya pendukung akan membuat implementasi kebijakan terhambat (Ratri, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 91,5% responden menyatakan fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sudah dikategorikan cukup. Sebanyak 95,7% responden menyatakan bahwa ada tempat khusus merokok yang disediakan di lingkungan Kantor Bupati Maros. Hasil observasi peneliti menemukan bahwa tempat khusus merokok ini betul masih ada sampai sekarang dan masih digunakan oleh beberapa pegawai yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros.

Fasilitas lain berupa media informasi tentang larangan merokok juga ditemukan di beberapa titik yang ada di dalam

lingkungan Kantor Bupati Maros. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebanyak 94,1% responden yang menyatakan tersedia media informasi tentang larangan merokok di Kantor Bupati Maros.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Thomas dan Richmod (2017) yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada dasarnya sangat dibutuhkan. Fasilitas yang dibutuhkan antara lain dalam bentuk pengadaan media promosi seperti baliho, spanduk, stiker, billboard, serta atribut-atribut. Tapi untuk fasilitas ruangan khusus merokok masih perlu ditinjau ulang, karena akan membuat orang tetap mempunyai kesempatan untuk merokok dalam lingkungan kawasan tanpa rokok yang memungkinkan asap rokok dapat mencemari lingkungan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Pambudi, tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah didukung oleh sumber daya yang memadai (Monica & Pambudi, 2017).

Namun terkait dana khusus untuk mendukung implementasi kebijakan KTR, pada umumnya yaitu sebanyak 94,7% responden yang menyatakan tidak ada dana khusus yang dianggarkan. Dana

yang dianggarkan ini hanya sebatas pelaksanaan sosialisasi kebijakan KTR, pembuatan tempat khusus merokok dan tanda larangan merokok di dalam lingkungan Kantor Bupati Maros. Namun ini hanya dilaksanakan pada awal-awal terbitnya Perda, setelahnya sudah tidak pernah ada anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi dan sarana pendukung lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan kunci (BA) bahwa anggaran khusus terkait implementasi kebijakan KTR meliputi pelaksanaan sosialisasi Perda, sudah melekat di Perda, tapi itupun hanya dilaksanakan pada tahun 2014 di awal-awal terbitnya Perda.

Hasil tabel silang antara sumber daya dan implementasi kebijakan KTR menunjukkan bahwa hanya sebesar 56,1% responden dengan sumber daya cukup yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros. Dari hasil uji *chi square* didapatkan p value (0.637) > α (0,05) artinya tidak ada hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

d. Hubungan Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Disposisi adalah sikap dari pegawai Kantor Bupati Maros dan dukungan pimpinan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam penelitian ini sikap dari pelaksana kebijakan

diukur dengan melihat sejauh mana sikap mereka dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54,8% responden memiliki sikap yang cukup terhadap implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros. Terlihat bahwa sebanyak 61,7% responden yang menyatakan sangat setuju dan 35,6% menyatakan setuju terhadap implementasi Perda Kabupaten Maros No 11 Tahun 2014 tentang KTR, sebanyak 31,4% responden menyatakan sangat setuju dan 67,0% responden menyatakan setuju terhadap pemberian denda dalam bentuk sejumlah uang bagi yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Fatmasari (2014) tentang perilaku supir angkutan pasca penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar, dimana sikap responden terhadap penerapan peraturan kawasan tanpa rokok sebagian besar setuju yaitu 42,7% dengan adanya peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa sebanyak 35,6% responden menyatakan sangat setuju dan 62,8% responden yang menyatakan setuju bahwa sesama pegawai akan saling mengingatkan jika ada yang merokok di dalam lingkungan Kantor Bupati Maros. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari informan BA yang menyatakan bahwa sesama pegawai di Kantor

Bupati Maros bisa saling menegur (mengingatkan) jika ada yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros.

Sikap ini tentunya kembali pada pribadi masing-masing responden. Bagi mereka yang tidak merokok, tentu saja akan sangat mendukung implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Seperti yang diungkapkan oleh informan IRH bahwa sebagai pegawai setuju sekali atas Perda ini karena berdampak pada kesehatan pegawai yang tidak merokok. Sebaliknya bagi mereka yang masih merokok tentu akan merasa sangat dibatasi dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Seperti yang diungkapkan oleh informan NA, mungkin ada yang tidak setuju karena mengganggu kenyamanannya yang selama ini bisa merokok di mana saja, sekarang tidak boleh merokok di sembarang tempat.

Selain sikap dari para pelaksana kebijakan, dukungan pimpinan juga merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini dukungan pimpinan diukur dengan melihat sejauh mana pimpinan menjadikan implementasi kebijakan KTR ini sebagai prioritas program dan memberikan dukungan fasilitas dalam rangka implementasi kebijakan KTR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 95,2% responden menyatakan bahwa dukungan pimpinan cukup dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

terlihat bahwa sebanyak 96,3% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR ini menjadi prioritas program dan 95,7% responden yang menyatakan bahwa pimpinan telah memberikan dukungan fasilitas dalam rangka implementasi kebijakan KTR.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa pimpinan dalam hal ini Bupati Maros sangat mendukung implementasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini. Seperti yang disampaikan informan PR bahwa Bapak Bupati sangat mendukung, selain karena Bupati yang mengeluarkan Perda, beliau memang tidak merokok, beliau juga sudah menyediakan sarana prasarana pendukung Perda seperti ruangan khusus merokok. Dari informan AW bahwa Bapak Bupati sangat mendukung implementasi kebijakan KTR ini, bahkan melakukan sidak bersama Satpol PP dan menegur langsung pegawai yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros.

Hasil tabel silang antara disposisi dan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros menunjukkan bahwa sebanyak 63,7% responden dengan disposisi cukup menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Berdasarkan hasil uji *chi square* didapatkan p value $(0,040) < \alpha (0,05)$ artinya ada hubungan antara disposisi dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Hal ini menunjukkan bahwa jika sikap

dari pelaksana dan dukungan pimpinan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A.Ikram (2017) tentang implementasi perda Kota Makassar Tahun 2013 tentang KTR di Unhas yang menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Implementor yang dimaksud adalah mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling mendukung dan bersama dalam menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama. Hasil penelitian lain di Santiago, Chile yang menyatakan bahwa dengan adanya sikap dari pelaksana dan sasaran kebijakan yang mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di negaranya, maka kebijakan ini berhasil diimplementasikan. Begitu juga dengan adanya dukungan dari pimpinan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program, sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Peruga, et.al, 2018).

e. Hubungan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata

dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edward III, dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi.

Karakteristik dari pelaksana sangat terkait dengan kinerja implementasi kebijakan. Karakteristik pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam menjalankan proses implementasi kebijakan dapat diketahui bahwa harus adanya mekanisme implementasi kebijakan yang jelas dan terarah. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui prosedur kerja yang disebut sebagai Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang baik seharusnya mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, mudah dipahami dan menjadi acuan dalam bekerjanya tim pelaksana. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 89,9% responden menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur dikategorikan baik

dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Bupati Maros. Namun, hasil dari pertanyaan responden ditemukan bahwa hanya sebanyak 93,6% responden yang menyatakan ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan KTR dan sebanyak 89,9% responden menyatakan bahwa tim pengawas kebijakan KTR melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa beberapa informan menyatakan bahwa Perda KTR ini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh informan AW bahwa SOP kebijakan KTR ini ada pada Satpol PP sebagai pelaksana Perda, di antaranya SOP itu adalah tidak boleh merokok dalam ruangan kerja atau di area kantor Bupati Maros. Dari informan PA didapatkan informasi bahwa SOP kebijakan KTR ini seperti menegur atau mengingatkan ASN yang merokok di dalam Kantor Bupati. Namun ada pula informasi dari informan yang menyatakan ketidaktahuan mereka tentang adanya SOP dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini. Seperti yang diungkapkan oleh informan PR bahwa ia tidak paham terkait masalah SOP kebijakan KTR ini.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viralista (2018) dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana SOP bagi para pelaksana dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

ada didalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim pelaksana. Kemudian untuk penyampaian aturan-aturan seperti larangan dan sanksi kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor yaitu dengan cara menyampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor bupati untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok, kemudian dengan penyampaian secara personal, atau teguran personal pada orang yang melanggar seperti merokok di sembarang tempat.

Terkait fragmentasi ditemukan sebanyak 83,0% responden dengan fragmentasi dikategorikan baik dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Terlihat bahwa sebanyak 90,4% responden menyatakan bahwa pengawas KTR ini sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan KTR..

Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa tanggung jawab pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini ditujukan pada semua pegawai Kantor Bupati Maros. Seperti informasi yang diperoleh dari informan IRH bahwa Perda KTR ini ditujukan pada semua ASN yang ada di Kantor Bupati Maros, sehingga semua seharusnya bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dari informan AW diperoleh informasi bahwa tanggung jawab pelaksanaan KTR kembali pada setiap ASN, meskipun masih ada yang melanggar.

Sedangkan hasil wawancara dari informan NA diperoleh informasi bahwa tanggung jawab Perda adalah bagian hukum sebagai pembuatnya yang kemudian disampaikan kepada Satpol PP sebagai penegak Perda.

Hasil tabel silang antara struktur birokrasi dan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros Tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 56,7% responden dengan struktur birokrasi baik menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Berdasarkan hasil uji *Chi Square* didapatkan p value $(0,891) > \alpha (0,05)$ artinya tidak ada hubungan antara struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semua pegawai di Kantor Bupati Maros merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini.

f. Tanggapan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014

Implementasi kebijakan berhubungan erat dengan komitmen dari pelaksana kebijakan dan kesadaran dari sasaran kebijakan. Namun, komitmen inilah yang sampai saat ini masih dipermasalahkan oleh pelaksana kebijakan. Kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan serta antar pelaksana kebijakan yang masih saling menuding satu dengan lainnya dan melepas tanggung jawab mereka sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan proses implementasi kebijakan akan berhasil jika pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat dan

saling bahu-membahu selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan komitmen pelaksana kebijakan yang baik tidak dibarengi dengan kesadaran dari sasaran kebijakan dalam hal ini beberapa oknum pegawai yang kadang masih mencuri waktu luang untuk tetap merokok dalam lingkungan Kantor Bupati Maros. Masih adanya oknum pegawai yang merokok disebabkan karena penerapan sanksi yang kurang tegas dari pelaksana kebijakan, bahkan belum pernah ada yang diberikan sanksi bila kedapatan merokok. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ingan (2016) tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok di RSUD AW Syahrani Kota Samarinda, dimana proses pemberian sanksi administratif bagi pelanggar kebijakan masih menjadi persoalan serius karena tidak pernah dilaksanakan.

Dari hasil wawancara mendalam, informan DBS menyatakan bahwa masih ada ASN yang merokok di dalam lingkungan Kantor Bupati Maros. ASN ini merokok di bagian lorong jalan keluar bagian samping kantor bupati. Biasanya mereka hanya akan mendapatkan teguran dari Satpol PP atau sesama pegawai tanpa diberikan sanksi. Sehingga peraturan daerah ini perlu lebih ditingkatkan dan dipertegas lagi dalam pemberian sanksi dan pengawasannya. Dari informan kunci (BA) diakui bahwa memang masih ada oknum ASN yang mengambil kesempatan untuk merokok, namun bila diketahui maka

akan diarahkan untuk merokok keruangan khusus merokok, selain itu peraturan daerah ini harus terus disosialisasikan ke pegawai.

Sebenarnya sudah ada usaha nyata yang dilakukan oleh pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bentuk usaha yang nyata di antaranya : menegur pegawai yang merokok dalam lingkungan Kantor Bupati Maros, memasang tanda larangan merokok dan melakukan inspeksi mendadak ke ruangan kerja pegawai. Seperti yang disampaikan oleh informan HT bahwa yang melakukan inspeksi mendadak adalah Bupati Maros didampingi oleh Satpol PP, bila ada pegawai yang kedapatan merokok dalam ruangan akan ditegur langsung oleh bupati dan bila mendapatkan asbak atau rokok maka akan disita.

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang telah direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros dianggap berhasil. Dari informan PR yang menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan daerah ini berhasil karena semua pegawai mengetahui kalau tidak boleh merokok di kantor bupati, bila ingin merokok maka

sudah ada ruangan khusus merokok. Sementara informan BA menyatakan bahwa implementasi peraturan daerah ini, khususnya di Kantor Bupati Maros sangat efektif. Karena sudah tidak ada lagi pegawai yang berani merokok kalau bukan di ruangan khusus merokok yang sudah disediakan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, maka variabel sumber daya (staf dan fasilitas) serta disposisi (dukungan pimpinan) merupakan dua variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya fasilitas kebijakan seperti ruangan khusus merokok, media informasi dan Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan yang setiap hari mengawasi pegawai maupun pengunjung agar tidak ada yang merokok dalam lingkungan Kantor Bupati Maros. Selain itu, besarnya dukungan pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Maros yang menjadi contoh tidak merokok dan rutin melaksanakan sidak ke ruangan kerja pegawai.

Dalam penelitian ini juga beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan adalah pelaksanaan sosialisasi, karena sosialisasi dalam bentuk pertemuan hanya dilakukan pada saat awal diterbitkannya peraturan daerah ini. Dimana pada saat sosialisasi hanya mengundang perwakilan pegawai dari bagian yang ada dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, instansi pemerintah, kelompok

masyarakat, unsur pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga tidak semua pegawai mengikuti sosialisasi dan mengetahui adanya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari media informasi seperti poster, spanduk, sticker, leaflet dan tanda larangan merokok. Adapun hasil observasi peneliti sebagai berikut :

Matriks 4.2. MATRIKS PEDOMAN OBSERVASI

NO	INDIKATOR	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung	√		Masih ada pegawai yang merokok di dalam gedung Kantor Bupati Maros, mereka tidak merokok dalam ruangan kerja, tapi merokok di bagian sayap gedung menuju jalan keluar.
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam KTR	√		Ada 2 ruangan khusus merokok di lantai 1, tepatnya di kantin kantor dan ada 2 ruangan khusus merokok di lantai 2 yang sudah didesain rapi.
3	Ditemukan tanda larangan merokok	√		Banyak tanda larangan merokok yang bisa dijumpai di Kantor Bupati Maros. Setiap pintu dipasang sticker tanda larangan merokok. Dinding kantor juga banyak poster dan tanda larangan merokok yang terpasang.
4	Tercium bau asap rokok	√		Pegawai yang melanggar area KTR di jalan masuk dan keluar, sehingga orang yang masuk dari sisi sayap bisa mencium bau asap rokok.
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam KTR		√	Tidak ditemukan asbak dalam ruangan kerja setiap bagian di Kantor Bupati Maros.

6	Ditemukan puntung rokok di dalam KTR	√	Masih ada puntung rokok ditemukan dilantai 2 bagian sayap, Puntung rokok ditemukan di pot tanaman.
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan perusahaan tembakau dalam bentuk sponsor, promosi (iklan rokok, spanduk, billboard, dll)	√	Tidak ada indikasi kerjasama dengan perusahaan rokok.
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan KTR	√	Kantin dalam Kantor Bupati Maros menjual rokok.

Dari hasil observasi juga masih ditemukan adanya rokok yang dijual dalam kantin yang ada di Kantor Bupati Maros. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 2, dimana Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau. Selain itu masih ditemukannya pegawai dan pengunjung yang merokok dalam wilayah Kantor Bupati Maros.

Merujuk dari hasil observasi di atas, maka peneliti menilai bahwa implementasi peraturan daerah Kabupaten Maros tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros belum maksimal. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Maros belum menerapkan 100% KTR sesuai dengan Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dimana

seharusnya dalam area KTR tidak boleh menyediakan ruangan khusus merokok, tidak boleh ada yang menjual produk rokok dan tidak boleh ada yang merokok dalam area Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah :

- 1) Kuesioner yang digunakan diformulasikan sendiri oleh peneliti dikarenakan belum ada kuesioner standar baku untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- 2) Responden dan informan belum memahami dengan benar mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 100%, dimana dalam kebijakan ini tidak boleh menyediakan fasilitas ruangan khusus merokok sehingga tidak ada lagi yang merokok dalam area Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang baik tidak memiliki hubungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros.
2. Sumber daya yang cukup tidak memiliki hubungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
3. Disposisi yang baik memiliki hubungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
4. Struktur Birokrasi yang baik tidak memiliki hubungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
5. Sumber daya dan disposisi merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros. Hal ini

dapat dilihat dari tersedianya staf yang memadai dan fasilitas kebijakan yang sudah tersedia serta besarnya dukungan pimpinan dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati Maros yang menjadi contoh dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan variabel komunikasi dan struktur birokrasi masih perlu peningkatan dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros. Hal ini berdasarkan analisa wawancara yang menyatakan bahwa tidak semua pegawai menghadiri sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan tidak mengetahui adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros.

b. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros untuk lebih memaksimalkan komunikasi dan struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, baik pada implementor maupun kelompok sasaran di semua kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
2. Diharapkan kepada para pimpinan yang ada di lingkungan Kantor Bupati Maros agar menerapkan sanksi bagi pelanggar kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik berupa sanksi denda maupun sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat.

3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros untuk mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 100% di Kantor Bupati Maros, sehingga tidak ada lagi yang merokok di dalam Kantor Bupati Maros.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Maros untuk memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang berhasil menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, serta membentuk tim khusus baik dari ulama atau kelompok perempuan yang dilatih untuk memberikan nasehat tentang bahaya rokok bagi kesehatan.
5. Diperlukan adanya metode penelitian lebih lanjut terkait variabel lain (ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik) sebagai upaya peningkatan efektifitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. P. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit ALFABETA Bandung.
- Almeida, L., Szklo, A., Sampaio, M., Souza, M., Martins, L. F., Szklo, M., Malta, D., Caixeta, R. (2012). Global Adult Tobacco Survey Data as a Tool to Monitor the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) Implementation: The Brazilian Case *Environmental Research and Public Health*, 27(9):2520-2536.
- Armayati, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Mahasiswa Dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. *Jurnal RAT*, 3(3):543-550.
- Azkha, N. (2013). Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(4), 171-179.
- Azmi, F. Z., Istiarti, T., Cahyo, K. (2016). Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3):995-1004.
- Azwar, S. (2012). *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya (2 ed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barnoya, J., & Navas-acien, A. (2013). Protecting the World From Secondhand Tobacco Smoke Exposure: Where Do We Stand and Where Do We Go From Here? *Nicotine & Tobacco Research*, 15(4), 789-804.
- Been, J. V., Nurmatov, U. B., Cox, B., Nawrot, T. S., Schayck, C. P. Van, & Sheikh, A. (2014). Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 6736(14):1-12.
- Berg, C. J., Smith, S. A., Bascombe, T. M., Maglakelidze, N., Starua, L., & Topuridze, M. (2016). Smoke-Free Public Policies and Voluntary Policies in Personal Settings in Tbilisi, Georgia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 75(16):1-11.
- Burns, S., Jancey, J., Bowser, N., Comfort, J., Crawford, G., Hallett, J., & Shields, B. (2013). "Moving forward: a cross sectional baseline

study of staff and student attitudes towards a totally smoke free university campus.”. *BMC Public Health*, 13(738), 1-8.

- Demir, M., Karadeniz, G., Demir, F., Karadeniz, C., Kaya, H., Yenibertiz, D., Taylan, M., Yilmaz, S., Sen, V. (2015). The impact of anti-smoking laws on high school students in Ankara, Turkey. . *J. Bras. Pneumol*, 41(6):523-529.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. (2018). *Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*. Maros.
- Faber, T., Been, J. V., Reiss, I. K., Mackenbach, J. P., & Sheikh, A. (2016). Smoke-free legislation and child health. *Nature partner journals*, 55(8):1-8.
- Fatmasari, I., , I., & , D. (2014). Perilaku Supir Angkutan Pasca Penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar. *Jurnal MKMI*, 8(5):131-139.
- Feliu, A., Filippidis, T. F., Joossens, L., Foy, G. T., Vardavas, C. I., Baena, A., Castellano, Y., Martinez, C., & Fernandez, E. (2019). Impact of Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Quit Ratios in 27 European Union Countries From 2006 to 2014. *Tobacco Control*, 28, 101-109.
- Hakam, F. (2015). Realita Kebijakan Pengendalian Rokok di Indonesia: “Komitmen Pemerintah dan Kepedulian Masyarakat.”
- Hasibuan, M, S, P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikram, R. A. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. *Jurnal MKMI*, 6(4):1-14.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media Jaya.
- Ingan, F. A. (2016). Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4 Nomor 1*, 500-514.

- Intarut, N., Chongsuvivatwong, V., & Mcneil, E. (2016). Effects of a School-based Intervention Program on Attitude and Knowledge of Household Members Towards a Smoke-free Home: a Cluster Controlled Trial. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Volume 17*, 1235-1242.
- Jancey, J., Bowser, N., Burns, S., Crawford, G., Portsmouth, L., & Smith, J. (2014). No Smoking Here: Examining Reasons for Noncompliance With a Smoke-Free Policy in a Large University. *Nicotine & Tobacco Research, Volume 16*(Issue 7), 976-983.
- Kaleta, D., Polańska, K., Rzeźnicki, A., Stelmach, W. ł., & Wojtysiak, P. (2017). Tobacco use patterns, knowledge, attitudes towards tobacco and availability of tobacco control training among school personnel from a rural area in Poland. *Tobacco Induced Diseases*, 1-12.
- Kang, H., & Cho, S.-i. (2018). Cohort effects of tobacco control policy: evidence to support a tobacco-free norm through smoke-free policy. *tobaccocontrol*, 1–7.
- Kemenkes Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes Republik Indonesia. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes Republik Indonesia. (2018). *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes. (2019). *Riset Kesehatan Dasar 2018 Provinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta.
- Konfino, J., Ferrante, D., Mejia, R., Coxson, P., Moran, A., Goldman, L., Perez-Stable, E. J. (2014). Impact on cardiovascular disease events of the implementation of Argentina's national tobacco control law. *BMJ Journals*, 23(2).
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: PT Kencana.

- Lando, H., Kabir, Z., Mohan, P., & Panneer, S. (2018). *Analysis of the effect of bidi regulations and its influence on tobacco control in India*. Paper presented at the Tobacco Induced Diseases.
- Macnaughton, P., Adamkiewicz, G., Arku, R. E., Vallarino, J., Levy, E., & Hospital, M. G. (2017). The impact of a smoke-free policy on environmental tobacco smoke exposure in public housing developments. *HHS Public Access*, 1-14.
- Maidin, A. (2016). *Perencanaan Strategis Sektor Kesehatan*. Makassar: Masagena.
- Mistry, R., Pednekar, M. S., McCarthy, W. J., Resnicow, K., Pimple, S. A., Hsieh, H.-f., . . . Gupta, P. C. (2018). Compliance with point-of-sale tobacco control policies a student tobacco use in Mumbai, India. *Tobacco Control*.
- Monica R., & Pambudi R. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Yogyakarta. *Jurnal UNY*.
- Muliku, H. R., Polii, B., & Kumurur, V. (2016). Analisis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Tingkat III Robert Wolter Monginsidi Manado. 13-29.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pasolong, H. (2010). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Maros.
- Peruga, A., Hayes, L. S., Aguilera, X., Prasad, V., & Bettcher, D. W. (2018). Correlates of compliance with national comprehensive smoke-free laws. *Tobacco Control*, 27(6): 608-613.
- Qureshi, F., & Kania, D. (2018). Encouraging tobacco control using national multisectoral ministerial mandate and priorities in Indonesia. *Tobacco Induced Diseases*.
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, 1(463), 1-13.

- Ravara, S. B., Castelo-branco, M., Aguiar, P., & Calheiros, J. M. (2013). Compliance and enforcement of a partial smoking ban in Lisbon taxi: an exploratory cross-sectional study. *BMC Public Health*, 13(1), 1-10.
- Ross, H., Moussa, L., Harris, T., Ajhodea R. (2018). The heterogeneous impact of a successful tobacco control campaign: a case study of Mauritius. *Tobacco Control*, Volume 27(Issue 1).
- Rozema, A. D., Mathijssen, J. J. P., Jansen, M. W. J., & Van Oers, J. A. M. (2016). Schools as smoke-free zones? Barriers and facilitators to the adoption of outdoor school ground smoking bans at secondary schools. *Tobacco Induced Diseases*, 14(10): 1-9.
- Saryono, & Anggraeni, M., D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Septriadi, V. (2016). Perilaku Merokok Siswa SMP di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Siswa SMP di Kota Pekanbaru) *JOM FISIP*, Volume 3 Nomor 1, 1-16.
- Sitanggang, S. H., & , J., Rochadi , Raden Kintoko (2018). Implementasi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1, 64-73.
- Subarsono, A., G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Capiya Publishing.
- Susanti, A. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar Tahun 2018. Universitas Hasanuddin. Makassar. *Jurnal MKMI*, 7(3): 115-127.
- Thaha, R. M. (2018). *Ilmu Sosial dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Thomas, M., & Richmond, R. (2017). Smoke-free mental health inpatient facility policies in Australia: variation across states and territories. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 41(4): 329-332.

- Viralista, A. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. *Repository USU*, 1-12.
- Weishaar, H., Trevisan, F., & Hilton, S. (2016). 'Maybetheysouldregulatethemquitestrictlyuntilthey knowthetrue dangers': a focus group study exploring UK adolescents' views on e-cigarette regulation. *Society for the Study of Addiction*, 1637 –1645.
- World Health Organization. (2004). *The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*.
- World Health Organization. (2017). *Sustainable Development Goals 2017*. World Health Organizations.
- Wulanningrum, P. A., Riyanti, E., & Cahyo, K. (2016). Evaluasi Penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Perguruan Tinggi Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 4, Nomor 5*, 362-369.
- Yang, X. Y., Yang, T., Nie F. (2018). Air pollution as a catalyst for supporting tobacco control policies? Evidence from a nationwide study on Chinese medical students. *Tobacco Control*.
- Ye, X., Chen, S., Yao, Z., Gao, Y., Xu, Y., Zhou, S., & Zhu, Z. (2015). Smoking behaviors before and after implementation of a smoke-free legislation in Guangzhou, China. *BMC Public Health*, 47(9):1-8.

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

INFORMED CONSENT

Persetujuan Menjadi Responden

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Asrul Arif dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Saya bermaksud melakukan penelitian tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Penelitian ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi di sekolah Pasca Sarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Setelah pertanyaan silahkan pilih jawaban terbaik menurut Bapak/Ibu/Saudara(i).

Silahkan baca pertanyaan dengan perlahan kemudian jawab setiap pertanyaan. Semua jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan adalah RAHASIA. Agar penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan kami tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros, diharapkan agar jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan merupakan jawaban sejujur-jujurnya.

INSTRUKSI:

1. Secara umum, diharapkan agar responden berusaha mengisi survei ini. Jika Bapak/Ibu/Saudara(i) membutuhkan bantuan, silakan bertanya kepada peneliti dan akan membantu Bapak/Ibu/Saudara(i).
2. Mohon jawab setiap pertanyaan (kecuali Bapak/Ibu/Saudara(i) diminta pindah ke pertanyaan berikutnya)
3. Jawab dengan cara melingkari atau mencentang jawaban yang dipilih sesuai petunjuk soal.
4. Jika Bapak/Ibu/Saudara(i) tidak yakin dengan jawaban Anda, silakan menjawab sesuai apa yang Bapak/Ibu/Saudara(i) rasa paling sesuai.
5. Mohon mengisi semua lembar pertanyaan dan kemudian berikan kembali pada peneliti.

PERNYATAAN KERAHASIAAN

Semua informasi yang memerlukan identitas responden akan dirahasiakan. Informasi yang terkait dengan identitas hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian ini dan tidak akan diberitahu atau dikeluarkan untuk kepentingan lainnya tanpa pemberitahuan, kecuali dibutuhkan secara hukum.

Setelah Bapak/Ibu/Saudara(i) membaca maksud dan tujuan saya di atas, saya mohon kesediaannya untuk mengisi nama dan tanda tangan di bawah ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Maros, Maret 2019

(.....)

INFORMED CONSENT**Persetujuan Menjadi Informan**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Asrul Arif dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Saya bermaksud melakukan penelitian tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros. Penelitian ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi di sekolah Pasca Sarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Sebelumnya saya bermaksud meminta izin dari Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait studi ini. Nama Bapak/Ibu/Saudara(i) akan dirahasiakan demi menjaga kerahasiaan data yang diberikan. Jawaban yang diberikan tidak akan memberikan keuntungan atau kerugian bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) secara langsung, namun secara tidak langsung akan menjadi bahan pembelajaran demi perbaikan bidang kesehatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya berharap Bapak/Ibu/Saudara(i) bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian.

Setelah Bapak/Ibu/Saudara(i) membaca maksud dan tujuan saya di atas, saya mohon kesediaannya untuk mengisi nama dan tanda tangan di bawah ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama : _____.

Tanda Tangan : _____.

Maros, Maret 2019

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN
2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI KANTOR BUPATI MAROS**

No Responden

Tanggal : _____

Bagian : _____

A. IDENTITAS RESPONDEN	
A1	Nama :
A2	Umur : Tahun
A3	Jenis Kelamin : a. Laki-Laki b. Perempuan
A4	Jabatan/Posisi :
A5	Pendidikan : a. DIII/DIV b. S1 c. S2 d. S3
A6	Apakah Anda pernah merokok? a. Ya b. Tidak
A7	Apakah saat ini Anda masih merokok? a. Ya b. Tidak
B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)	
B1	Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros? a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik
B2	Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait 100% Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros? a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik

B3	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>
B4	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah melarang keras siapapun merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>
B5	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait media promosi (baliho/spanduk/banner/poster/selebaran,dll) tentang larangan merokok/Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>
B6	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait pelaksanaan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>
B7	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait pemberian teguran kepada siapapun yang melanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>
B8	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait pemberian sanksi/denda kepada siapapun yang melanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>

B9	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>
B10	<p>Bagaimana menurut penilaian Anda, terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah membuat perokok merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros?</p> <p>a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik</p>
C. KOMUNIKASI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)	
1. TRANSMISI	
C1.1	<p>Apakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros ?</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>
C1.2	<p>Apakah Anda mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok ?</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>
C1.3	<p>Apakah Anda mengetahui isi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok ?</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>
C1.4	<p>Apakah di Kantor Bupati Maros pernah dilaksanakan Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ?</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>
C1.5	<p>Apakah Anda ikut serta dalam kegiatan sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maros ?</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>
C1.6	<p>Apakah dalam proses penyampaian informasi terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros menggunakan media (spanduk, banner, poster, stiker dll) ?</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>
C1.7	<p>Apakah Anda termasuk yang pernah memperoleh informasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui media (spanduk, banner, poster, stiker dll)?</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>
C1.8	<p>Apakah Anda mengetahui adanya sanksi terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>a. Ya b. Tidak</p>

2. KEJELASAN			
C2.1	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan area atau ruangan yang dilarang untuk kegiatan merokok? a. Ya b. Tidak		
C2.2	Dilarang menjual rokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? a. Ya b. Tidak		
C2.3	Dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok/produk tembakau di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ? a. Ya b. Tidak		
C2.4	KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang timbul oleh asap rokok dengan cara merubah perilaku masyarakat agar hidup sehat ? a. Ya b. Tidak		
C2.5	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula ? a. Ya b. Tidak		
C2.6	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat memberikan udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok ? a. Ya b. Tidak		
C2.7	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014,		
	a. Tempat umum	a. Ya	b. Tdk
	b. Tempat kerja	a. Ya	b. Tdk
	c. Kendaraan angkutan umum	a. Ya	b. Tdk
	d. Tempat proses belajar mengajar	a. Ya	b. Tdk
	e. Tempat pelayanan kesehatan	a. Ya	b. Tdk
	f. Tempat sarana olahraga	a. Ya	b. Tdk
	g. Arena kegiatan anak-anak	a. Ya	b. Tdk
h. Tempat ibadah	a. Ya	b. Tdk	
C2.8	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat atau area di mana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan? a. Ya b. Tidak		
C2.9	Akan diberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok ? a. Ya b. Tidak		
3. KONSISTENSI			
C3.1	Menurut Anda, pernahkah dilakukan perubahan terhadap isi aturan dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak		
C3.2	Menurut Anda, pernahkah dilakukan perubahan terhadap tujuan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak		

C3.3	Menurut Anda, pernahkah dilakukan perubahan terhadap kelompok sasaran Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
C3.4	Menurut Anda, pernahkah dilakukan perubahan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
C3.5	Menurut Anda, pernahkah dilakukan perubahan sanksi terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros ? a. Ya b. Tidak
D. SUMBER DAYA PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)	
1. STAF	
D1.1	Apakah ada komite atau tim pengawas yang bertugas mengawasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
D1.2	Apakah tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok melaksanakan tugasnya dengan baik? a. Ya b. Tidak
2. INFORMASI	
D2.1	Apakah Anda pernah mendapatkan petunjuk cara melaksanakan kebijakan KTR? a. Ya b. Tidak
D2.2	Apakah pelaksana kebijakan KTR mengimplementasikan sesuai dengan petunjuk KTR? a. Ya b. Tidak
3. WEWENANG	
D3.1	Apakah Anda pernah menegur orang yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
D3.2	Apakah Anda pernah memberikan sanksi kepada pegawai yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
4. FASILITAS	
D4.1	Apakah tersedia klinik berhenti merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
D4.2	Apakah ada tempat khusus merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
D4.3	Apakah tersedia media informasi tentang larangan merokok (spanduk, baliho, billboard, banner, stiker, plakat, dll) di Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak
D4.4	Apakah ada dana khusus yang dianggarkan dalam mendukung Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros? a. Ya b. Tidak

Berikan tanda ✓ pada salah satu kolom (Sangat Setuju (SS)/ Setuju (S)/ Tidak Setuju (TS)/ Sangat Tidak Setuju (STS))

E. DISPOSISI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)					
1. SIKAP					
Pernyataan		SS	S	TS	STS
E1.1	Mendukung implementasi Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa Rokok				
E1.2	Kantor Bupati Maros seharusnya menjadi KTR				
E1.3	Orang dengan aktifitas merokok sangat mengganggu orang lain yang tidak merokok				
E1.4	Ketika ada orang lain yang sedang merokok di area KTR, saya berhak menegurnya.				
E1.5	Orang yang melanggar area KTR harus diberi sanksi.				
E1.6	Pemberian denda sejumlah uang dapat ditegakkan di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR)				
E1.7	Pelanggaran terhadap KTR perlu dicatat				
E1.8	Saya tidak akan merokok di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)				
E1.9	Saya akan mengingatkan sesama pegawai yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR).				
E1.10	Semua pegawai tidak boleh merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros				
2. DUKUNGAN PIMPINAN					
E2.1	Apakah implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi prioritas program? a. Ya b. Tidak				
E2.3	Apakah pimpinan memberikan dukungan fasilitas dalam rangka Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat Anda? a. Ya b. Tidak				
F. STRUKTUR BIROKRASI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KTR					
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)					
F1.1	Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? a. Ya b. Tidak				
F1.2	Apakah komite atau tim pengawas melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? a. Ya b. Tidak				
2. FRAGMENTASI					
F2.1	Apakah komite atau tim pengawas mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? a. Ya b. Tidak				
F2.2	Apakah ada kerjasama lintas sektor terkait Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? a. Ya b. Tidak				

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN
2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI KANTOR BUPATI MAROS**

**A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama Informan :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Tanggal Wawancara :
 Apakah Anda merokok :

B. DAFTAR PERTANYAAN**1. Variabel Komunikasi**

Bagaimana komunikasi pemerintah Kabupaten Maros tentang PERDA Kabupaten Maros No. 11 tahun 2014 kepada pihak pegawai kantor Bupati Maros?

Probing :

- a. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- b. Bagaimana proses sosialisasi dilaksanakan?
- c. Apakah sosialisasi yang dilakukan terkait implementasi kawasan tanpa rokok efektif, efisien dan mudah dipahami?
- d. Apakah sosialisasi yang dilakukan terkait implementasi kawasan tanpa rokok sudah diketahui oleh semua pegawai dan pengunjung/masyarakat yang datang ke kantor bupati Maros?
- e. Apakah bapak/ibu mengetahui area yang wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok sesuai dengan Perda Kabupaten Maros No.11 Tahun 2014?
- f. Bagaimana proses koordinasi yang dilakukan tim pengawas kawasan tanpa rokok dengan pejabat kantor bupati?
- g. Apakah bapak/ibu pernah melakukan pertemuan untuk membahas implementasi kawasan tanpa rokok di kantor bupati?

2. Variabel Sumber Daya

Bagaimana kesiapan Sumber Daya di dalam mendukung penerapan KTR di sekolah?

Probing :

- a. Apakah bapak/ibu merokok ?
- b. Apakah ada komite atau tim pengawas yang dibuat untuk mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?

- c. Apakah jumlah dan kompetensi tim pengawas yang dibuat untuk mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros sudah cukup dan memadai?
- d. Bagaimana kesiapan SDM yang dimiliki untuk mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?
- e. Apakah ada petunjuk pelaksanaan bagi tim pengawas untuk mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?
- f. Bagaimana kewenangan tim pengawas untuk mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?
- g. Bagaimana fasilitas untuk tim pengawas dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?

3. Variabel Disposisi

Bagaimana sikap terhadap Perda Kabupaten Maros No.11 Tahun 2014 tentang KTR ?

Probing :

- a. Bagaimana sikap/tanggapan tim pengawas terhadap Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- b. Apakah tim pengawas setuju dengan Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- c. Apakah tim pengawas mengimplementasikan Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kantor bupati Maros?
- d. Apakah tim pengawas mendapat dukungan dari Bupati Maros dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok?
- e. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap adanya oknum yang masih merokok di dalam lingkungan kantor bupati Maros?

4. Variabel Struktur Birokrasi

Bagaimana rancangan struktur birokrasi yang akan diterapkan ?

Probing :

- a. Bagaimana rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ideal untuk mendukung efektifitas implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros menurut bapak/ibu?
- b. Bagaimana fragmentasi (penyebaran tanggung jawab) dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros menurut bapak/ibu?

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (IN-DEPTH INTERVIEW)

Data Demografi
 Kode Partisipan :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan terakhir :
 Lama bekerja/posisi jabatan :
 Pengalaman pelatihan :
 Hari/tanggal wawancara :
 Tempat wawancara :
 Waktu wawancara :
 Pewawancara :

Pertanyaan inti:

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros saat ini? Apakah sudah sesuai?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?
3. Apakah terdapat tanda larangan merokok di kantor bupati Maros?
4. Bagaimana seharusnya apabila ada orang yang ingin merokok merokok di lingkungan kantor bupati Maros?
5. Apa saja hambatan/tantangan yang bapak/ibu temukan selama implementasi kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?
6. Apa upaya yang bapak/ibu lakukan untuk mengatasi hambatan yang ada?
7. Apa upaya yang bapak/ibu butuhkan untuk mengembangkan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?
8. Menurut bapak/ibu, hal-hal apa saja yang dapat mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?
9. Apa harapan bapak/ibu untuk meningkatkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor bupati Maros?

Pertanyaan penutup:

1. Adakah hal lain yang ingin bapak/ibu sampaikan terkait pengalaman anda selama mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok selain dari apa yang sudah saya tanyakan sebelumnya?
2. Apabila masih ada informasi yang saya butuhkan, bisakah saya menghubungi bapak/ibu kembali ?
3. Terima Kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai. Semoga informasi yang bapak/ibu berikan dapat memberikan wawasan baru mengenai implementasi kawasan tanpa rokok.

Lampiran 4. *Check List* / Pedoman Observasi**PEDOMAN OBSERVASI****IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KANTOR BUPATI MAROS**

NO	INDIKATOR	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung	√		Masih ada pegawai yang merokok di dalam gedung Kantor Bupati Maros, mereka tidak merokok dalam ruangan kerja, tapi merokok di bagian sayap gedung menuju jalan keluar.
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam KTR	√		Ada 2 ruangan khusus merokok di lantai 1, tepatnya di kantin kantor dan ada 2 ruangan khusus merokok di lantai 2 yang sudah didesain rapi.
3	Ditemukan tanda larangan merokok	√		Banyak tanda larangan merokok yang bisa dijumpai di Kantor Bupati Maros. Setiap pintu dipasang sticker tanda larangan merokok. Dinding kantor juga banyak poster dan tanda larangan merokok yang terpasang.
4	Tercium bau asap rokok	√		Pegawai yang melanggar area KTR di jalan masuk dan keluar, sehingga orang yang masuk dari sisi sayap bisa mencium bau asap rokok.
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam KTR		√	Tidak ditemukan asbak dalam ruangan kerja setiap bagian di Kantor Bupati

6	Ditemukan puntung rokok di dalam KTR	√	Maros. Masih ada puntung rokok ditemukan dilantai 2 bagian sayap, Puntung rokok ditemukan di pot tanaman.
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan perusahaan tembakau dalam bentuk sponsor, promosi (iklan rokok, spanduk, billboard, dll)	√	Tidak ada indikasi kerjasama dengan perusahaan rokok.
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan KTR	√	Kantin dalam Kantor Bupati Maros menjual rokok.

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan

PENGISIAN KUESIONER

WAWANCARA DENGAN INFORMAN

WAWANCARA DENGAN INFORMAN



FASILITAS PENDUKUNG KTR

OBSERVASI



Lampiran 6. Output Analisis

OUTPUT HASIL PENELITIAN**a. Analisis Univariat****1. Karakteristik Umum Responden****Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	99	52,7	52,7	52,7
Perempuan	89	47,3	47,3	100,0
Total	188	100,0	100,0	

UMUR1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <30	11	5,9	5,9	5,9
30 - 39	77	41,0	41,0	46,8
40 - 49	78	41,5	41,5	88,3
>49	22	11,7	11,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	18	9,6	9,6	9,6
DIPLOMA	20	10,6	10,6	20,2
S1	128	68,1	68,1	88,3
S2	22	11,7	11,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

Pernah Merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	74	39,4	39,4	39,4
Tidak	114	60,6	60,6	100,0
Total	188	100,0	100,0	

Masih Merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	51	27,1	27,1	27,1
Tidak	137	72,9	72,9	100,0
Total	188	100,0	100,0	

2. Impelementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**B1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TB	2	1,1	1,1	1,1
KB	3	1,6	1,6	2,7
CB	33	17,6	17,6	20,2
B	55	29,3	29,3	49,5
SB	95	50,5	50,5	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TB	3	1,6	1,6	1,6
KB	5	2,7	2,7	4,3
CB	27	14,4	14,4	18,6
B	69	36,7	36,7	55,3
SB	84	44,7	44,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TB	1	,5	,5	,5
KB	5	2,7	2,7	3,2
CB	20	10,6	10,6	13,8
B	83	44,1	44,1	58,0
SB	79	42,0	42,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TB	1	,5	,5	,5
KB	5	2,7	2,7	3,2
CB	20	10,6	10,6	13,8
B	83	44,1	44,1	58,0
SB	79	42,0	42,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KB	1	,5	,5	,5
CB	24	12,8	12,8	13,3
B	96	51,1	51,1	64,4
SB	67	35,6	35,6	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KB	1	,5	,5	,5
CB	41	21,8	21,8	22,3
B	82	43,6	43,6	66,0
SB	64	34,0	34,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KB	10	5,3	5,3	5,3
CB	55	29,3	29,3	34,6
B	65	34,6	34,6	69,1
SB	58	30,9	30,9	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TB	15	8,0	8,0	8,0
KB	170	90,4	90,4	98,4
CB	1	,5	,5	98,9
B	1	,5	,5	99,5
SB	1	,5	,5	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KB	10	5,3	5,3	5,3
CB	47	25,0	25,0	30,3
B	92	48,9	48,9	79,3
SB	39	20,7	20,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

B10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TB	1	,5	,5	,5
KB	7	3,7	3,7	4,3
CB	53	28,2	28,2	32,4
B	86	45,7	45,7	78,2
SB	41	21,8	21,8	100,0
Total	188	100,0	100,0	

IMPLEMENTASI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BERHASIL	107	56,9	56,9	56,9
KURANG BERHASIL	81	43,1	43,1	100,0
Total	188	100,0	100,0	

3. Komunikasi a. Transmisi**C1.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	34	18,1	18,1	18,1
Ya	154	81,9	81,9	100,0
Total	188	100,0	100,0	

C1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	42	22,3	22,3	22,3
Ya	146	77,7	77,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

C1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	73	38,8	38,8	38,8
Ya	115	61,2	61,2	100,0
Total	188	100,0	100,0	

C1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	52	27,7	27,7	27,7
	Ya	136	72,3	72,3	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	65	34,6	34,6	34,6
	Ya	123	65,4	65,4	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	16	8,5	8,5	8,5
	Ya	172	91,5	91,5	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	19	10,1	10,1	10,1
	Ya	169	89,9	89,9	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	55	29,3	29,3	29,3
	Ya	133	70,7	70,7	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2. Kelas Informasi**C2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	1,1	1,1	1,1
	Ya	186	98,9	98,9	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	32	17,0	17,0	17,0
	Ya	156	83,0	83,0	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	26	13,8	13,8	13,8
	Ya	162	86,2	86,2	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	36	19,1	19,1	19,1
	Ya	152	80,9	80,9	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	54	28,7	28,7	28,7
	Ya	134	71,3	71,3	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	,5	,5	,5
	Ya	187	99,5	99,5	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7a

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	81	43,1	43,1	43,1
	Ya	107	56,9	56,9	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7b

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	30	16,0	16,0	16,0
	Ya	158	84,0	84,0	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7c

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	88	46,8	46,8	46,8
	Ya	100	53,2	53,2	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7d

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	39	20,7	20,7	20,7
	Ya	149	79,3	79,3	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7e

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	29	15,4	15,4	15,4
	Ya	159	84,6	84,6	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7f

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	62	33,0	33,0	33,0
	Ya	126	67,0	67,0	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7g

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	35	18,6	18,6	18,6
	Ya	153	81,4	81,4	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.7h

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	32	17,0	17,0	17,0
	Ya	156	83,0	83,0	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	1,1	1,1	1,1
	Ya	186	98,9	98,9	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	20	10,6	10,6	10,6
	Ya	168	89,4	89,4	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C3. Konsistensi C3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	9	4,8	4,8	4,8
	Tidak	179	95,2	95,2	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	12	6,4	6,4	6,4
	Tidak	176	93,6	93,6	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	10	5,3	5,3	5,3
	Tidak	178	94,7	94,7	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

C3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	11	5,9	5,9	5,9
Tidak	177	94,1	94,1	100,0
Total	188	100,0	100,0	

C3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	7	3,7	3,7	3,7
Tidak	181	96,3	96,3	100,0
Total	188	100,0	100,0	

TRANSMISI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	110	58,5	58,5	58,5
KURANG BAIK	78	41,5	41,5	100,0
Total	188	100,0	100,0	

KEJELASAN1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	102	54,3	54,3	54,3
KURANG BAIK	86	45,7	45,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

KONSISTENSI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	157	83,5	83,5	83,5
KURANG BAIK	31	16,5	16,5	100,0
Total	188	100,0	100,0	

KOMUNIKASI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	107	56,9	56,9	56,9
KURANG BAIK	81	43,1	43,1	100,0
Total	188	100,0	100,0	

5.Sumber Daya**a.Staf****D1.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	12	6,4	6,4	6,4
Ya	176	93,6	93,6	100,0
Total	188	100,0	100,0	

D1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	18	9,6	9,6	9,6
Ya	170	90,4	90,4	100,0
Total	188	100,0	100,0	

4. Informasi

D2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	11	5,9	5,9	5,9
Valid Ya	177	94,1	94,1	100,0
Total	188	100,0	100,0	

D2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	15	8,0	8,0	8,0
Valid Ya	173	92,0	92,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

5. Wewenang

D3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	12	6,4	6,4	6,4
Valid Ya	176	93,6	93,6	100,0
Total	188	100,0	100,0	

D3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	188	100,0	100,0	100,0

Fasilitas D4.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	185	98,4	98,4	98,4
Valid Ya	3	1,6	1,6	100,0
Total	188	100,0	100,0	

D4.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	8	4,3	4,3	4,3
Valid Ya	180	95,7	95,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

D4.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	11	5,9	5,9	5,9
Valid Ya	177	94,1	94,1	100,0
Total	188	100,0	100,0	

D4.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	178	94,7	94,7	94,7
Valid Ya	10	5,3	5,3	100,0
Total	188	100,0	100,0	

STAF1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	169	89,9	89,9	89,9
	KURANG	19	10,1	10,1	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

INFORMASI1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	173	92,0	92,0	92,0
	KURANG	15	8,0	8,0	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

WEWENANG1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	176	93,6	93,6	93,6
	KURANG	12	6,4	6,4	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

FASILITAS1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	172	91,5	91,5	91,5
	KURANG	16	8,5	8,5	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

SUMBERDAYA1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	132	70,2	70,2	70,2
	KURANG	56	29,8	29,8	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

6. Disposisi**a. Sikap****E1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,1	1,1	1,1
	TS	3	1,6	1,6	2,7
	S	67	35,6	35,6	38,3
	SS	116	61,7	61,7	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

E1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1,6	1,6	1,6
	S	74	39,4	39,4	41,0
	SS	111	59,0	59,0	100,0
	Total	188	100,0	100,0	

E1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	1,1	1,1	1,1
S	77	41,0	41,0	42,0
SS	109	58,0	58,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	1,6	1,6	1,6
S	128	68,1	68,1	69,7
SS	57	30,3	30,3	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	,5	,5	,5
S	119	63,3	63,3	63,8
SS	68	36,2	36,2	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	1,6	1,6	1,6
S	126	67,0	67,0	68,6
SS	59	31,4	31,4	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	1,1	1,1	1,1
S	122	64,9	64,9	66,0
SS	64	34,0	34,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E1.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	2,1	2,1	2,1
S	76	40,4	40,4	42,6
SS	108	57,4	57,4	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E1.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	1,6	1,6	1,6
S	118	62,8	62,8	64,4
SS	67	35,6	35,6	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E1.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	1,1	1,1	1,1
S	113	60,1	60,1	61,2
SS	73	38,8	38,8	100,0
Total	188	100,0	100,0	

b. Dukungan Pimpinan**E2.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	7	3,7	3,7	3,7
Ya	181	96,3	96,3	100,0
Total	188	100,0	100,0	

E2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	8	4,3	4,3	4,3
Ya	180	95,7	95,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

SIKAP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	103	54,8	54,8	54,8
KURANG BAIK	85	45,2	45,2	100,0
Total	188	100,0	100,0	

DUKUNGAN1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	179	95,2	95,2	95,2
KURANG BAIK	9	4,8	4,8	100,0
Total	188	100,0	100,0	

DISPOSISI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	102	54,3	54,3	54,3
KURANG BAIK	86	45,7	45,7	100,0
Total	188	100,0	100,0	

7. Struktur Birokrasi**a. SOP****F1.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	12	6,4	6,4	6,4
Ya	176	93,6	93,6	100,0
Total	188	100,0	100,0	

F1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	19	10,1	10,1	10,1
Valid Ya	169	89,9	89,9	100,0
Total	188	100,0	100,0	

b.Fragmentasi**F2.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	18	9,6	9,6	9,6
Valid Ya	170	90,4	90,4	100,0
Total	188	100,0	100,0	

F2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	17	9,0	9,0	9,0
Valid Ya	171	91,0	91,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

F2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	18	9,6	9,6	9,6
Valid Ya	170	90,4	90,4	100,0
Total	188	100,0	100,0	

F2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	17	9,0	9,0	9,0
Valid Ya	171	91,0	91,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

SOP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	169	89,9	89,9	89,9
Valid KURANG BAIK	19	10,1	10,1	100,0
Total	188	100,0	100,0	

FRAGMENTASI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	156	83,0	83,0	83,0
Valid KURANG BAIK	32	17,0	17,0	100,0
Total	188	100,0	100,0	

BIROKRASI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAIK	150	79,8	79,8	79,8
Valid KURANG BAIK	38	20,2	20,2	100,0
Total	188	100,0	100,0	

b. Analisis Bivariat
1. Komunikasi
a) Transmisi

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
TRANSMISI1	BAIK	Count	64	46	110
		% within TRANSMISI1	58,2%	41,8%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	43	35	78
		% within TRANSMISI1	55,1%	44,9%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within TRANSMISI1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,174 ^a	1	,677		
Continuity Correction ^b	,071	1	,789		
Likelihood Ratio	,173	1	,677		
Fisher's Exact Test				,765	,394
Linear-by-Linear Association	,173	1	,678		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,61.

b. Computed only for a 2x2 table

b) Kejelasan**Crosstab**

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
KEJELASAN1	BAIK	Count	52	50	102
		% within KEJELASAN1	51,0%	49,0%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	55	31	86
		% within KEJELASAN1	64,0%	36,0%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within KEJELASAN1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,202 ^a	1	,074		
Continuity Correction ^b	2,695	1	,101		
Likelihood Ratio	3,219	1	,073		
Fisher's Exact Test				,078	,050
Linear-by-Linear Association	3,185	1	,074		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,05.

b. Computed only for a 2x2 table

c) Konsistensi

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
KONSISTENSI1	BAIK	Count	93	64	157
		% within KONSISTENSI1	59,2%	40,8%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	14	17	31
		% within KONSISTENSI1	45,2%	54,8%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within KONSISTENSI1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,091 ^a	1	,148		
Continuity Correction ^b	1,557	1	,212		
Likelihood Ratio	2,071	1	,150		
Fisher's Exact Test				,168	,106
Linear-by-Linear Association	2,080	1	,149		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,36.

b. Computed only for a 2x2 table

d) Komunikasi

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
KOMUNIKASI1	BAIK	Count	56	51	107
		% within KOMUNIKASI1	52,3%	47,7%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	51	30	81
		% within KOMUNIKASI1	63,0%	37,0%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within KOMUNIKASI1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,123 ^a	1	,145		
Continuity Correction ^b	1,712	1	,191		
Likelihood Ratio	2,134	1	,144		
Fisher's Exact Test				,181	,095
Linear-by-Linear Association	2,112	1	,146		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,90.

b. Computed only for a 2x2 table

2. Sumber Daya

a) Staf

Crosstab

		IMPLEMENTASI1		Total	
		BERHASIL	KURANG BERHASIL		
STAF1	CUKUP	Count	94	75	169
		% within STAF1	55,6%	44,4%	100,0%
	KURANG	Count	13	6	19
		% within STAF1	68,4%	31,6%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within STAF1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,141 ^a	1	,285	,336	,206
Continuity Correction ^b	,679	1	,410		
Likelihood Ratio	1,174	1	,279		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1,135	1	,287		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,19.

b. Computed only for a 2x2 table

b) Informasi

Crosstab

		IMPLEMENTASI1		Total	
		BERHASIL	KURANG BERHASIL		
INFORMASI1	CUKUP	Count	97	76	173
		% within INFORMASI1	56,1%	43,9%	100,0%
	KURANG	Count	10	5	15
		% within INFORMASI1	66,7%	33,3%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within INFORMASI1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,632 ^a	1	,427	,589	,304
Continuity Correction ^b	,274	1	,601		
Likelihood Ratio	,647	1	,421		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,629	1	,428		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,46.

b. Computed only for a 2x2 table

c) Wewenang

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
WEWENANG1	CUKUP	Count	103	73	176
		% within WEWENANG1	58,5%	41,5%	100,0%
	KURANG	Count	4	8	12
		% within WEWENANG1	33,3%	66,7%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within WEWENANG1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,907 ^a	1	,088		
Continuity Correction ^b	1,970	1	,160		
Likelihood Ratio	2,891	1	,089		
Fisher's Exact Test				,131	,081
Linear-by-Linear Association	2,891	1	,089		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,17.

b. Computed only for a 2x2 table

d) Fasilitas

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
FASILITAS1	CUKUP	Count	97	75	172
		% within FASILITAS1	56,4%	43,6%	100,0%
	KURANG	Count	10	6	16
		% within FASILITAS1	62,5%	37,5%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within FASILITAS1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,222 ^a	1	,637		
Continuity Correction ^b	,043	1	,835		
Likelihood Ratio	,225	1	,635		
Fisher's Exact Test				,793	,422
Linear-by-Linear Association	,221	1	,638		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,89.

b. Computed only for a 2x2 table

Sumber Daya

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
SUMBERDAYA1	CUKUP	Count	74	58	132
		% within SUMBERDAYA1	56,1%	43,9%	100,0%
	KURANG	Count	33	23	56
		% within SUMBERDAYA1	58,9%	41,1%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within SUMBERDAYA1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,132 ^a	1	,716		
Continuity Correction ^b	,041	1	,840		
Likelihood Ratio	,132	1	,716		
Fisher's Exact Test				,750	,421
Linear-by-Linear Association	,131	1	,717		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,13.

b. Computed only for a 2x2 table

3. Disposisi

a) Sikap

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
SIKAP1	BAIK	Count	65	38	103
		% within SIKAP1	63,1%	36,9%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	42	43	85
		% within SIKAP1	49,4%	50,6%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within SIKAP1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,562 ^a	1	,059		
Continuity Correction ^b	3,025	1	,082		
Likelihood Ratio	3,566	1	,059		
Fisher's Exact Test				,076	,041
Linear-by-Linear Association	3,543	1	,060		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,62.

b. Computed only for a 2x2 table

b) Dukungan Pimpinan

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
DUKUNGAN1	BAIK	Count	104	75	179
		% within DUKUNGAN1	58,1%	41,9%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	3	6	9
		% within DUKUNGAN1	33,3%	66,7%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within DUKUNGAN1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,144 ^a	1	,143	,177	,132
Continuity Correction ^b	1,253	1	,263		
Likelihood Ratio	2,131	1	,144		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	2,132	1	,144		
N of Valid Cases	188				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,88.

b. Computed only for a 2x2 table

c) Disposisi

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
DISPOSISI1	BAIK	Count	65	37	102
		% within DISPOSISI1	63,7%	36,3%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	42	44	86
		% within DISPOSISI1	48,8%	51,2%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within DISPOSISI1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,218 ^a	1	,040	,054	,028
Continuity Correction ^b	3,632	1	,057		
Likelihood Ratio	4,225	1	,040		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4,195	1	,041		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,05.

b. Computed only for a 2x2 table

4. Struktur Birokrasi

a) SOP

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
SOP1	BAIK	Count	95	74	169
		% within SOP1	56,2%	43,8%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	12	7	19
		% within SOP1	63,2%	36,8%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within SOP1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,336 ^a	1	,562		
Continuity Correction ^b	,112	1	,737		
Likelihood Ratio	,340	1	,560		
Fisher's Exact Test				,631	,372
Linear-by-Linear Association	,334	1	,563		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,19.

b. Computed only for a 2x2 table

b) Fragmentasi

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASIL	KURANG BERHASIL	
FRAGMENTASI1	BAIK	Count	88	68	156
		% within FRAGMENTASI1	56,4%	43,6%	100,0%
	KURANG BAIK	Count	19	13	32
		% within FRAGMENTASI1	59,4%	40,6%	100,0%
Total		Count	107	81	188
		% within FRAGMENTASI1	56,9%	43,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,095 ^a	1	,758		
Continuity Correction ^b	,013	1	,910		
Likelihood Ratio	,096	1	,757		
Fisher's Exact Test				,846	,458
Linear-by-Linear Association	,095	1	,758		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,79.

b. Computed only for a 2x2 table

c) Struktur Birokrasi

Crosstab

			IMPLEMENTASI1		Total
			BERHASI L	KURAN G BERHAS IL	
BIR OK RA S11	BAIK	Count	85	65	150
		% within BIROKRASI1	56,7%	43,3%	100, 0%
S11	KURA NG BAIK	Count	22	16	38
		% within BIROKRASI1	57,9%	42,1%	100, 0%
Total		Count	107	81	188
		% within BIROKRASI1	56,9%	43,1%	100, 0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,019 ^a	1	,891		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,019	1	,891		
Fisher's Exact Test				1,000	,521
Linear-by- Linear Association	,019	1	,892		
N of Valid Cases	188				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,37.

b. Computed only for a 2x2 table

C 3 · 2	C 3 · 3	C 3 · 4	C 3 · 5	S K O R C 3	D 1 · 1	D 1 · 2	S K O R D 1	D 2 · 1	D 2 · 2	S K O R D 2	D 3 · 1	D 3 · 2	S K O R D 3	D 4 · 1	D 4 · 2	D 4 · 3	D 4 · 4	S K O R D 4	E 1 · 1	E 1 · 2	E 1 · 3	E 1 · 4	E 1 · 5	E 1 · 6	E 1 · 7	E 1 · 8	E 1 · 9	E 1 · 10	S K O R E 1	E 2 · 1	E 2 · 2	S K O R E 2	F 1 · 1	F 1 · 2	S K O R F 1	F 2 · 1	F 2 · 2	S K O R F 2	S K O R C	S K O R D	S K O R E	S K O R F	U M U R 1	B- 1
1	1	0	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	8	39	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	8	39	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	5	40	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	39	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	6	33	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	40	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	20	7	40	4	3	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39	1	1	2	1	1	2	1	1	2	19	7	41	4	3	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	3	3	2	4	4	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	37	4	4	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	31	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	31	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	5	33	4	4	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	3	3	3	3	4	3	4	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	6	32	4	3	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	42	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	0	1	21	7	42	3	2	1	
1	1	0	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	20	7	42	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	32	4	2	1	
1	1	1	1	4	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	5	32	4	4	2	
0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	32	4	2	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	32	4	1	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	32	4	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	32	4	2	2	

1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	32	4	4	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	8	33	4	2	2
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	0	0	0	0	1	1	24	5	42	1	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	5	42	4	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	42	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	31	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	8	33	4	3	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	36	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	38	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	42	4	2	2		
0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	37	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	35	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	35	4	1	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	35	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	35	1	1	2	1	1	2	1	0	1	25	7	37	3	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	7	35	4	3	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	35	4	2	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36	1	1	2	1	0	1	1	0	1	25	6	38	2	2	2	
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	5	30	1	2	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	35	4	2	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	13	7	35	4	3	2	
1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	0	1	14	7	32	3	3	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	29	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15	7	31	4	2	1		
0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	32	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	34	4	2	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	19	7	42	4	1	2		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	7	41	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15	7	36	4	2	2	

1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	0	1	28	7	36	3	2	2
1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	1	1	2	1	0	1	1	1	2	16	6	41	3	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0	0	0	1	1	2	0	1	1	20	6	30	3	3	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	4	3	3	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	5	35	4	2	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	4	4	4	3	4	3	3	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	6	36	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	5	37	4	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	1	0	1	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	6	37	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	4	3	3	4	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	37	4	2	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	33	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	36	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	35	1	0	1	1	1	2	0	1	1	29	7	36	3	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	0	1	25	7	32	3	3	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	32	4	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	7	32	4	4	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	19	5	32	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	35	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	42	4	2	2	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	35	4	3	1	
0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	32	4	3	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	32	4	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	32	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	6	32	4	2	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	32	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	4	39	4	4	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	4	4	4	4	3	4	4	3	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	5	39	4	2	2	

1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	8	32	4	4	1
0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	8	32	4	2	1
1	0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	32	4	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	32	4	2	1	
1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	32	4	3	2		
1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	0	1	1	1	2	29	5	32	3	4	2		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	6	32	4	2	2			
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	5	30	4	3	2			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	0	1	23	6	42	3	4	1			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0	0	0	1	1	2	0	1	1	15	6	20	3	2	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	1	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	6	42	4	3	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	35	4	3	1				
1	1	0	0	3	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	7	42	4	2	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	6	35	4	2	2				
1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	36	1	1	2	1	0	1	1	1	2	29	6	38	3	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	36	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	38	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0	1	1	1	1	2	1	1	2	27	6	31	4	2	2					
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	42	4	2	2					
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28	0	0	0	1	1	2	0	0	0	29	6	28	2	3	1				
1	0	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	35	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	0	1	28	7	32	3	3	2					
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	32	1	1	2	1	1	2	1	0	1	21	7	34	3	2	1					
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	36	4	2	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	36	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	8	42	4	3	1					

1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	5	42	4	3	1
1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	42	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	42	4	2	1	
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	0	0	0	0	1	1	21	5	42	1	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	1	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	6	42	4	2	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	42	4	2	1		
1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	42	4	2	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	42	4	2	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	42	4	2	1		
1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	0	1	1	1	2	28	6	42	3	3	1		
0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	42	4	2	1			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	5	40	4	3	1			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	1	1	0	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	40	4	2	1				
1	1	1	0	4	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	6	40	4	3	2				
0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	6	40	4	1	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	20	7	36	4	3	1				
0	1	1	1	4	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38	1	1	2	1	0	1	1	1	2	23	6	40	3	3	1				
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	0	0	0	0	1	1	25	5	42	1	3	1				
1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32	1	1	2	1	0	1	1	1	2	25	6	34	3	4	2				
1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	32	4	2	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	42	4	3	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	35	1	0	1	1	1	2	0	1	1	24	7	36	3	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	32	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	8	34	4	4	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	37	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	35	4	2	2				

1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	32	4	2	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	36	4	2	2			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	32	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	42	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	39	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	36	4	2	2			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	7	42	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	42	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	42	4	2	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	4	3	4	3	4	36	1	1	2	1	1	2	1	0	1	27	7	38	3	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	28	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	6	30	4	3	2			
1	1	1	1	5	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	4	4	2	3	3	4	4	3	4	34	1	1	2	1	1	2	0	0	0	25	6	36	2	2	1			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	35	4	2	2			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	32	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	34	4	3	2				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	4	4	3	3	4	36	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	7	38	4	2	2				
1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	36	1	1	2	0	0	0	1	0	1	27	6	38	1	3	2			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	38	4	4	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	39	4	2	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	38	4	3	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36	1	1	2	1	1	2	1	0	1	26	7	38	3	3	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	4	4	3	4	4	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	40	4	3	2				
1	1	1	1	5	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	2	3	4	3	3	33	1	1	2	0	0	0	0	1	1	27	4	35	1	3	2			
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	3	3	3	3	4	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	37	4	3	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	4	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	36	4	2	1				
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	36	4	2	1			

1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	37	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	37	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	37	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	37	4	3	1
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32	1	1	2	0	0	0	0	1	1	21	5	34	1	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	36	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	37	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	0	1	21	7	36	3	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	6	37	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	36	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	37	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	5	36	4	3	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	7	35	4	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	7	35	4	1	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	8	39	4	4	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	5	40	4	2	1
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	30	1	1	2	0	0	0	0	1	1	22	5	32	1	2	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	1	1	2	1	1	2	1	1	2	20	7	40	4	4	2
1	0	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	36	1	1	2	1	1	2	1	1	2	20	7	38	4	3	2
0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	1	3	3	3	3	4	3	4	3	3	30	1	1	2	0	0	0	0	0	0	15	5	32	0	1	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	0	1	21	7	35	3	3	1
0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	25	7	32	4	3	2
1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	0	0	0	0	1	1	26	6	32	1	2	1
1	0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	7	32	4	3	2
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31	1	1	2	1	1	2	1	1	2	29	7	33	4	3	2

1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	7	42	4	1	1
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	36	4	3	2	
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	33	1	1	2	0	0	0	0	1	1	24	5	35	1	3	1	
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	24	7	35	4	3	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36	1	1	2	1	1	2	1	1	2	26	6	38	4	2	2		
0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15	7	32	4	2	2		
0	0	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	32	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	7	34	4	2	2		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	35	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	7	37	4	1	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34	0	0	0	1	1	2	0	1	1	28	7	34	3	2	2		
1	0	0	1	3	1	1	2	1	1	2	1	0	1	1	1	1	0	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	32	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	8	34	4	2	2		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	36	4	1	2		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29	0	0	0	1	1	2	1	1	2	20	6	29	4	2	2		
1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	33	1	1	2	0	0	0	0	1	1	28	4	35	1	4	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	1	0	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	33	1	1	2	1	1	2	1	1	2	27	6	35	4	1	1		
1	0	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	7	33	4	3	1		
1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	28	5	32	4	1	1		
1	1	0	1	4	1	1	2	1	1	2	1	0	1	1	1	1	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	1	1	2	1	1	2	1	1	2	20	8	32	4	2	1		

C1-1	C2-1	C3-1	C-1	D1-1	D2-1	D3-1	D4-1	D-1	E1-1	E2-1	E-1	F1-1	F2-1	F-1
2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1
2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1

2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1

1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2
1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1
2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2
2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2
2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1

2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2
2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2
1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1

1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2
1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2
2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1

Lampiran 8. Matriks Analisis Isi Informan

1. Komunikasi Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Sosialisasi dan mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014	Informan 10	Saat sosialisasi saya tahu, karena diundang semua pimpinan SKPD, pegawai organisasi pemuda, wakil mahasiswa, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah termasuk pelajarnya. Jadi saat itu Bupati langsung yang menyampaikan adanya Perda ini didampingi ketua dewan Maros sama Satpol PP.	Informan menjelaskan bahwa Bupati Maros melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan mengundang pimpinan DPRD Maros, SKPD, pegawai, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi perempuan serta sekolah.	Sosialisasi hadir, Bupati Maros yang langsung menyampaikan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok.	Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Maros dengan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Maros yang berisi tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.	Bupati Maros telah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada pegawai di kantor Bupati Maros.
2	Pengetahuan informan tentang area yang wajib menerapkan KTR	Informan 10	Yang saya tahu itu seperti disini kantor bupati sama kantor-kantor yang ada di Maros, Puskesmas, RS, sekolah-sekolah, mesjid.	Informan mengetahui beberapa area yang masuk dalam Kawasan Tanpa Rokok, tapi tidak bisa menyebutkan semua area.	Perkantoran, Puskesmas, rumah sakit, sekolah dan mesjid.	Kawasan Tanpa Rokok meliputi : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.	Pengetahuan informan tentang area yang wajib menerapkan KTR cukup baik karena informan dapat menyebutkan beberapa area dengan baik dan jelas.

3	Bentuk komunikasi internal terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 10	Bupati pernah 1 kali mengundang kepala SKPD dan Kabag untuk membahas ini. Bupati menyampaikan untuk tidak merokok di kantor, karena adami aturannya. Jadi kalau rapat dengan pegawai, saya bilang jangan merokok disini. Sekarang ini to, sesama pegawai bisami saling menegur kalau ada yang merokok di ruangan.	Informan menjelaskan bahwa bupati pernah mengadakan rapat untuk membahas pelaksanaan perda dengan menyampaikan ke pegawai supaya tidak merokok di area yang sudah ditetapkan. Saat ini sesama pegawai bisa saling mengingatkan untuk tidak merokok di Kantor Bupati Maros dan diarahkan ke ruangan khusus merokok yang sudah disediakan.	Bupati Maros mengadakan rapat untuk membahas implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok, sesama pegawai bisa saling mengingatkan untuk tidak merokok di Kantor Bupati Maros.	Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mencapai keberhasilan komunikasi adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi (Agustino, 2016)	Informan ikut dalam rapat yang dilakukan oleh Bupati Maros untuk membahas Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
---	---	-------------	---	--	--	--	--

2. Sumber Daya dalam Implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Kesiapan sumber daya manusia untuk mengawasi implementasi KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 10	Pengawasnya itu kan di Satpol PP, mereka keliling. Di area kantor bupati ini memang sudah ada tempat khusus yang dibuat untuk merokok. Satpol PP melihat ada yang merokok di luar tempat dia tegur itu, jadi dia cukup aktif.	Informan menjelaskan kalau masalah perda itu tugas bagian hukum dan yang menjadi penegak perda adalah Satpol PP. Satpol PP cukup aktif dan melaksanakan tugasnya dengan baik.	Yang menjadi penegak Perda Kawasan Tanpa Rokok adalah Satpol PP, pengawas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.	Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi.	Sumber daya manusia untuk mengawasi implementasi KTR adalah Satpol PP.

2	Kesiapan sumber daya pendukung untuk mengawasi implementasi KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 10	Pak bupati pasti sudahmi napikirkan sarannya. Adami disiapkan ruangan untuk merokok, baik dilantai 1 maupun lantai 2, adami papan bicara, poster, spanduk, leaflet, sticker. Bukan cuman disini dipasang, tapi sampai ke desa-desa, kecamatan sama kantor-kantor yang ada di Maros.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan kalau Bupati telah menyiapkan sarana pendukung perda, seperti ruangan khusus merokok, papan bicara, poster, spanduk, leaflet dan sticker.	Bupati Maros telah menyiapkan sarana pendukung Perda Kawasan Tanpa Rokok.	Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia demi terselenggaranya implementasi suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.	Sumber daya pendukung, seperti ruangan khusus merokok, spanduk, sticker, poster, pamflet dan media sejenisnya yang bersifat himbauan terkait Perda No. 11 Tahun 2014 tentang KTR di Kantor Bupati Maros telah disiapkan.
3	Kewenangan pelaksanaan Perda KTR	Informan 10	Satpol PP yang melaksanakannya, mereka bisa menegur langsung pegawai yang merokok, melakukan sidak ke setiap ruangan kerja disini dan bisa mengambil asbak serta rokok yang ditemukan.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa Satpol PP yang mengimplementasikan Perda KTR dan mempunyai kewenangan untuk menegur orang yang merokok serta melaksanakan sidak ke setiap ruangan.	Kewenangan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda KTR adalah dapat menegur pegawai yang merokok, melakukan sidak ke ruangan.	Sumber daya lain adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan mengatur keuangan, baik penyediaan dana, staf, maupun pengadaan supervisor.	Kewenangan dalam implementasi Perda KTR sudah dilaksanakan oleh Satpol PP.

3. Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
----	-----------	----------	------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------------	-----------

1	Sikap terhadap terbitnya Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Thn 2014	Informan 10	Setuju sekali. Tapi bagi orang yang merokok itu merasa tersiksa, perokok itu ada yang tidak setuju, tapi yang namanya ini aturan, ya harus diikuti pegawai. Inikan untuk kesehatan banyak orang, jadi harus saling mengerti.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa perokok merasa tidak setuju dengan adanya perda ini karena merasa tersiksa. Tapi karena adanya kesadaran dari pegawai sehingga sudah jarang yang merokok, namun masih ada juga yang mengambil kesempatan untuk tetap merokok, tapi sudah sangat berkurang.	Perokok tidak setuju dan merasa tersiksa, adanya kesadaran pegawai sehingga sudah jarang yang terlihat merokok.	Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap yang muncul didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk baik, buruk, positif negatif yang mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 2012).	Informan sangat mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros.
2	Sikap terhadap oknum yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros	Informan 10	Jangankan orang ASN, tamu saja, kalau ada yang merokok kami tunjukkan ruangan merokok. Dia tanya kok tidak ada yang merokok disini. Saya bilang ada pak, tapi mereka tidak merokok di ruang kerja, ada tempatnya khusus.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan kalau tidak boleh ada yang merokok diruangan kerja dan meminta untuk merokok diruangan yang sudah disiapkan.	Menegur orang yang merokok dan memintanya merokok di ruang khusus merokok.	Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen dan kejujuran. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.	Informan pernah melakukan teguran kepada orang yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros dan meminta untuk merokok di ruangan yang telah disediakan.

3	Dukungan Bupati Maros dalam pelaksanaan KTR	Informan 10	Sangat mendukung ini perda. Pak Bupati kan tidak merokok, disitu kita bisa lihat sebagai contoh. Sampai sekarang itu kalau ada yang naliat merokok, pasti menegur. Biasa juga sidak itu ke ruangnya pegawai, samaki Pol PP, langsung kaget semua yang diruangan.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa Bupati Maros sangat mendukung Perda KTR. Bupati akan menegur bila ada pegawai yang merokok dan biasa melakukan sidak bersama Satpol PP ke ruangan kerja pegawai.	Bupati Maros sangat mendukung perda KTR, pernah menegur dan melakukan sidak.	Dukungan pejabat sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan sebuah peraturan daerah. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu program sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.	Bupati Maros sangat mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
---	---	-------------	--	--	--	---	---

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi KTR	Informan 10	ada itu, kalau Satpol PP mau melakukan tugasnya untuk melaksanakan ini perda, mereka harus bahas dulu langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan, baru mereka turun ke lapangan, ke instansi.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan ada SOP sebelum melaksanakan perda KTR seperti membahas langkah-langkah yang akan dilakukan di area Kawasan Tanpa Rokok.	Ada SOP dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	SOP merupakan petunjuk yang memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan. SOP merupakan dokumen yang berisi instruksi tertulis yang sudah dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi yang berisi cara melakukan pekerjaan	Ada SOP yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang KTR.

2	Penyebaran tanggung jawab implementasi KTR	Informan 10	Penegak kebijakan ini memang Satpol PP, namun bukan berarti mereka sepenuhnya yang melaksanakannya. Harus ada kerja sama dengan semua instansi, semua pegawai.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa implementasi perda KTR tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP, tapi oleh semua pegawai yang ada.	Semua pegawai bertanggung jawab untuk melaksanakan Perda Kabupaten Maros No. 11 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Untuk itu dibutuhkan penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena dengan demikian implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh berbagai unit pemerintahan.	Satpol PP menjadi penegak Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang KTR dan semua pegawai juga bertanggung jawab untuk melaksanakan Perda KTR.
---	--	-------------	--	--	--	---	--

5. Tanggapan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
----	-----------	----------	------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------------	-----------

1	Hambatan dalam implementasi KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 10	Namanya saja perda baru, yang bandel ya tetap merokok, tapi setelah ada semua fasilitas, nda ada lagi, sudah tertibmi. Kalaupun masih ada, itu tergantung pegawainya saja, curi-curi waktu untuk merokok, memang harus terus disosialisasikan.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan saat awal implementasi KTR, masih ada pegawai yang merokok, tapi setelah adanya fasilitas, pegawai sudah tertib. Perda Kawasan tanpa Rokok memang harus terus disosialisasikan.	Masih ada pegawai yang mengambil kesempatan untuk merokok, perda KTR harus terus disosialisasikan.	George C. Edward III mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Suratman, 2017).	Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang KTR menjadikan Kantor Bupati Maros cukup bebas dari asap rokok, meskipun masih ada juga pegawai yang mengambil kesempatan untuk merokok.
2	Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok	Informan 10	Banyak usaha yang bisa kita lakukan, kita sudah ada tempat khusus merokok, banyakmi tanda larangan merokok yang dipasang disini, kalau saya lihat ada yang merokok saya pasti tegur.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan sudah ada beberapa usaha yang dilakukan, seperti menyediakan fasilitas ruangan dan tanda larangan merokok serta saling mengingatkan sesama pegawai.	Ada usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dengan menyediakan fasilitas ruangan dan membuat media, saling mengingatkan sesama pegawai.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang KTR pada Bab III, diatur tentang kewajiban penanggung jawab KTR, yaitu wajib membuat dan memasang tanda / petunjuk/peringatan larangan merokok pada are KTR dan memberikan teguran pada setiap pelanggaran.	Sudah ada usaha untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3	Bagaimana implementasi KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 10	Kalau khusus untuk lingkup kantor bupati ini efektif sekali. Tidak ada lagi yang berani merokok itu kalau tidak di tempatnya. Tidak ada lagi yang membandel itu, nda adalah, karena itu tadi Satpol PP akan menegur dan kita juga sesama pegawai akan saling menegur kalau ada yang melanggar	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang KTR sudah efektif dilaksanakan di Kantor Bupati Maros	Implementasi KTR di Kantor Bupati Maros sudah efektif, tidak ada lagi yang merokok di dalam kantor bupati, pengawas KTR melaksanakan tugasnya dengan baik.	Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok melarang siapa pun melakukan kegiatan merokok di dalam lingkungan perkantoran/tempat kerja.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. (KTR) di Kantor Bupati Maros sudah berjalan dengan baik, tapi harus tetap ditingkatkan dan terus disosialisasikan.
---	---	-------------	---	--	--	--	--

1. Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Sosialisasi dan mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014	Informan 1	Dengan sendirinya saya tahu, dari sosialisasi disampaikan bahwa ada kawasan dilarang merokok.	Sebagian besar informan ikut sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan informan yang lain mengetahui setelah Pol PP gencar melakukan sosialisasi melalui sticker, poster dan spanduk yang dipasang di setiap instansi.	Ikut sosialisasi, tidak ikut sosialisasi, mengetahui adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Maros dengan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Maros yang berisi tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa	Pengetahuan informan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) cukup baik karena sebagian besar ikut sosialisasi dan setiap hari melihat sarana pendukung
		Informan 2	Ikut sosialisasi Perda KTR, bahkan sampai di kecamatan. Sosialisasi dari pihak kabupaten ke setiap kecamatan.				

		Informan 3	Semuakan diwajibkan untuk ikut sosialisasi, jadi kita sosialisasi, kalau tidak salah itu disini Aula pendopo.			Rokok.	KTR seperti sticker dan poster.
		Informan 4	Tahu informasi tentang perda, kan ada sosialisasi waktu itu dari satpol PP yang gencar melakukan sosialisasi ke kantor-kantor.				
		Informan 5	Ya, saya ikut sosialisasi, kebetulan saya di DPR kebetulan dalam pembahasan ini saya banyak aktif memfasilitasi anggota dewan dalam pembahasan ini.				
		Informan 6	Ada sosialisasi karena ini perda sebenarnya harus melibatkan stakeholder yang ada, dari kesehatan, termasuk DPR. Kemudian disosialisasikan dibawah.				

		Informan 7	Kalau sosialisasi sudah di semua pegawai, termasuk dalam bentuk papan informasi, spanduk dan sticker.				
		Informan 8	Ya, saya ikut. Kita sudah sosialisasi waktu tahun 2014 itu di ruang pola kantor bupati dihadiri oleh semua instansi di kabupaten maros.				
		Informan 9	Saya mengetahui, karena setiap ada Perda yang dikeluarkan Bapak Bupati selalu disosialisasikan.				
2	Pengetahuan informan tentang area yang wajib menerapkan KTR	Informan 1	Yang masuk KTR itu area Kantor Bupati Maros, daerah perkantoran, rumah sakit, sekolah, masjid, tempat anak-anak bermain, puskesmas.	Semua informan mengetahui area yang wajib menerapkan KTR, tapi tidak ada informan yang mampu menyebutkan semua area mana saja yang masuk KTR.	Kantor Bupati Maros, kantor-kantor SKPD, Puskesmas, Rumah Sakit, sekolah, mesjid, terminal, pasar, tempat anak bermain, tempat olahraga.	Kawasan Tanpa Rokok meliputi : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah	Pengetahuan informan tentang area yang wajib menerapkan KTR cukup baik karena informan dapat menyebutkan beberapa area dengan baik dan jelas.
		Informan 2	Yang saya tahu itu wilayah KTR, kantor-kantor, rumah sakit, sekolah, puskesmas, pasar.				

		Informan 8	Perkantoran, tempat ibadah, tempat bermain, tempat umum seperti pasar, sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit.				
		Informan 9	Pertama di kantor, tempat ibadah, di terminal, pasar, sekolah, Puskesmas.				
3	Komunikasi internal yang dilakukan untuk membahas Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang KTR	Informan 1	Dalam bentuk pertemuan tidak pernah dibahas, tapi kalau saling mengingatkan kalau diruangan tidak boleh merokok sudah biasa.	Hanya informan yang dari Pol PP yang biasa adakan pertemuan untuk melaksanakan Perda KTR. Sedangkan informan yang lain, saling mengingatkan sesama pegawai untuk tidak merokok dalam lingkungan Kantor Bupati Maros.	Tidak pernah, sesama pegawai saling tegur, pertemuan di Kantor Satpol PP.	Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mencapai keberhasilan komunikasi adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi (Agustino, 2016).	Komunikasi internal yang dilakukan untuk membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros belum berhasil dengan baik karena tidak memenuhi syarat transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi masih sebatas saling menegur sesama pegawai.
	Informan 2	Saya rasa belum pernah ikut, tidak tahu kalau di kantor Pol PP disana					
	Informan 3	Kalau sesama pegawai, kalau diruanganku pak toh, saya bilangji sama pegawai yang laki-laki, kalau mauki merokok, janganki diruangan.					

		Informan 4	Saya kurang tau itu, yang menjadi penegak perda itu adalah SatpolPP, jadi mungkin pertemuannya disana.			
		Informan 5	Tim Pengawas tetap dari Satpol PP dan sering ada disini. Mereka biasa menegur pegawai atau orang yang merokok di lorong atau masih dalam gedung kantor bupati.			
		Informan 6	Kalau pertemuan khusus membahas ini saya tidak pernah ikut.			
		Informan 7	Kami di bagian hukum biasa koordinasi dengan Satpol PP membahas tentang perda yang ada di Kabupaten Maros termasuk Perda KTR.			
		Informan 8	Wah harus begitu, ada SOP nya harus dirembukkan dulu bersama, kalau kita mau patroli siapkan mobil, siapkan sempritan, siapkan berkas perdanya, siapkan berapa jumlah personil.			

		Informan 9	Kami adakan pertemuan itu untuk kami sendiri disini di kantor Pol PP, tapi untuk kantor-kantor lain kami cuman memasang sticker.				
--	--	------------	--	--	--	--	--

2. Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Kesiapan sumber daya manusia untuk mengawasi implementasi KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 1	Para pimpinan seperti kabag, asisten.	Sebagian besar informan mengatakan bahwa yang menjadi penegak dan mengawasi perda KTR adalah Satpol PP, diman Satpol PP bersama Bupati Maros biasa melakukan sidak. Informan lain ada yang menyebutkan kepala bagian dan asisten yang mengawasi pelaksanaan perda.	Para pimpinan seperti Kepala Bagian, Asisten. Sekda, Bupati, Wakil Bupati. Satpol PP, semua pegawai.	Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi.	Semua pegawai dapat dijadikan pengawas dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sepanjang memiliki keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi.
		Informan 2	Itukan semua perda ke Satpol PP untuk mengamankan perda.				
		Informan 3	SDM nya mencukupi dan kita harus mengikuti perda ini. Biasa ada sidak Pak Bupati dengan Satpol PP.				
		Informan 4	Selama ini cuman di Satpol PP. Kadang-kadang ditegur, ya cuman teguran				
		Informan 5	Tim Pengawas tetap dari Satpol PP dan sering ada disini.				

		Informan 6	Itu dipengawasan kepada Pol PP, malah disitu, ketika didapat ada dendanya kalau nda salah.				
		Informan 7	Yang jelas kalau tupoksinya Satpol PP kan itu diperaturan bupati mereka penegak perda				
		Informan 8	Anggota melaksanakannya dengan baik. Sebelum patroli saya kumpulkan dulu kemudian saya ingatkan kembali ke mereka tentang tugasnya.				
		Informan 9	Kalau melihat pegawai yang merokok bukan di tempatnya, kami tegur pak, karena memang kami katakan kamu melanggar perda.				
2	Kesiapan sumber daya pendukung untuk mengawasi implementasi	Informan 1	Stiker dan poster dipasang semua tempat. Tidak boleh merokok di dalam ruangan, sudah ada tempatnya.	Semua informan menyatakan sumber daya pendukung sudah tersedia, seperti ruangan khusus merokok. Sudah terpasang stiker, poster	Sticker, poster, CCTV, spanduk sudah terpasang di semua area Kantor Bupati Maros. Pamflet,	Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia demi terselenggaranya implementasi suatu	Sumber daya pendukung untuk mengawasi implementasi KTR sudah ada sejak Perda KTR

KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 2	Dilantai 2 ada 2 ruangan diatas itu kiri kanan dibawah juga ada. Ada juga CCTV yang memantau.	dan papan bicara hampir di semua ruangan yang ada di Kantor Bupati Maros.	papan bicara, ada ruangan khusus merokok.	kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.	disosialisasikan. Sarana pendukung tersebut seperti sticker, poster, CCTV, papan bicara dan ruangan khusus merokok.
	Informan 3	Ruangan dipasang sticker , spanduk Kawasan Tanpa Rokok, termasuk poster. ada kawasan ruangan khusus untuk merokok.				
	Informan 4	Dipasang papan spanduknya, stikcker dan papan besarnya				
	Informan 5	Ada ruangan khusus merokok dan papan bicara.				
	Informan 6	Bupati menyiapkan fasilitas area smoking				
	Informan 7	Dalam bentuk papan informasi, spanduk dan sticker				
	Informan 8	Kita arahkan untuk merokok diruangan merokok, kita buat papan bicara, sticker semua ditempel di setiap sudut dan pintu ruangan dan tempat strategis, kita sudah membuat ruangan merokok itu dilantai 2.				

		Informan 9	Memasang sticker, pamflet dibagikan. Ada juga ruangan khusus merokok di kantor bupati.				
3	Kewenangan pelaksanaan Perda KTR	Informan 1	Kewenangan pelaksana itu bisa menegur. Jadi Satpol PP akan menegur bila ada pegawai yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.	Semua informan menyatakan bahwa Satpol PP yang melaksanakan peraturan daerah tentang KTR. Kewenangan Satpol PP itu diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Pada pasal 255 dijelaskan bahwa Satpol PP adalah penegak dari peraturan daerah. Satpol PP dapat menegur dan mencatat bila ada pelanggaran dalam perda KTR.	Ada komite atau tim pelaksana Perda yaitu Satpol PP	Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP untuk mengimplementasikan Perda KTR merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana akan membuat suatu program bisa dapat berhasil dengan baik.	Kewenangan implementasi Perda KTR oleh Satpol PP yang diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah pada pasal 255 yang menyatakan bahwa Satpol PP adalah penegak dari peraturan daerah.
Informan 2	Kewenangan Pol PP dapat menegur langsung perokok, karena saya lihat ditugaskan langsung dari pak bupati.						
Informan 3	Satpol PP dia yang menangani langsung turun menyidak bersama bupati.						
Informan 4	selama ini cuman di Satpol PP. Kadang-kadang ditegur, ya cuman teguran. Sanksi belum ada.						
Informan 5	Yang saya perhatikan Satpol PP itu sebenarnya kalau menegur mungkin agak-agak segan.						

	Informan 6	Pengawasan diberikan kepada Pol PP.				
	Informan 7	Satpol PP ya karena Pol PP penegak perda ya, mereka bisa menegur pegawai yang merokok.				
	Informan 8	Satpol PP, untuk Perda KTR, misalnya mereka bisa menegur pegawai yang melanggar, bisa melakukan sidak.				
	Informan 9	Jadi kalau kami melihat pegawai yang merokok di bukan di tempatnya, kami tegur pak, karena memang kami katakan kamu melanggar perda. Anda jangan merokok disini.				

3. Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Sikap terhadap terbitnya Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014	Informan 1	Ada yang setuju ada juga yang tidak setuju pak. Yang perokok sudah pasti tidak setuju dan curi kesempatan untuk merokok.	Semua informan menyatakan setuju atas peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Informan juga menyatakan bahwa bagi perokok ada yang setuju	Setuju sekali, yang merokok kurang setuju. Harus diatur, aturan harus dilaksanakan.	Sikap merupakan reaksi atau respon yang tertutup dari seseorang terhadap stimulus. Sikap secara nyata menunjukkan reaksi	Dukungan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati

		Informan 2	Setuju sekali, terutama bagi kami atau pegawai yang tidak merokok. Yang perokok merasa tersiksa karena kalau ada rapat mereka harus keluar untuk merokok.	dan ada juga yang tidak setuju karena merasa tersiksa dengan adanya aturan ini.		terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap yang muncul didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk baikburuk, positifnegatif, setuju-tidak setuju yang mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 2012).	Maros.
		Informan 3	Kalau saya sebagai pegawai saya setuju sekali atas perda yang dikeluarkan oleh Pak Bupati. Ini memang harus diatur.				
		Informan 4	Setelah adanya aturan ini, mereka curi kesempatan untuk merokok, mungkin tidak setuju, tapi yang namanya aturan harus diikutilah pegawai disini.				
		Informan 5	Banyak yang setuju, karena saya perhatikan tidak ada yang protes.				
		Informna 6	Yang perokok tentu saya kira nda, tapi bagaimanapun juga karena ini aturan, ya harus dilakukan dan dilaksanakan.				

		Informan 7	Mungkin ada yang tidak setuju, karena mengganggu kenyamanannya, selama ini mereka merokok sembarang, sekarang harus curi waktu untuk merokok				
		Informan 8	Ya, bagi yang pecandu rokok, dia tidak merasa nyaman, Dulu mereka paham, tapi sekarang banyak yang gagal paham.				
		Informan 9	Setuju pak, kami sangat siap pak, karena itu tupoksi kami, kami sangat siap.				
2	Sikap terhadap oknum yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros	Informan 1	Kalau ada yang merokok, saya tegur, saya suruh ke ruangan khusus merokok.	Sebagian besar informan menyatakan menegur bila ada yang merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok. Ada juga informan yang mengingatkan dan sambil bercanda bahwa kantor bupati merupakan daerah Kawasan Tanpa Rokok dan mengarahkan perokok tersebut untuk masuk ke ruangan khusus merokok.	Menegur, disuruh ke ruangan khusus merokok, memberikan peringatan, di foto.	Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen dan kejujuran. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk	Akan menegur bila ada yang merokok di lingkungan Kantor Bupati Maros. Serta meminta oknum untuk merokok di ruangan khusus merokok yang telah disediakan.
		Informan 2	Pol PP dapat menegur langsung perokok, karena saya lihat ditugaskan langsung dari pak bupati.				

		Informan 3	Kalau yang merokok saya biasanya langsung tegur.			melaksanakannya.	
		Informan 4	Iya, kadang-kadang kalau ada yang merokok diruang publik, kita kasi peringatanlah kalau ini kawasan tidak boleh merokok.				
		Informan 5	Kalau sesama pegawai mungkin dalam bentuk candaan ya biasalah. Pemberian sanksi saya kira belum.				
		Informan 6	Pernah menegur tapi karena namanya peraturan itu harus dijunjung tinggi, yang ditegur itu mengaku bersalah, karena melakukan sesuatu yang dilarang ditempatnya.				
		Informan 7	Itumi mereka agak segan karena masih honorki, tapi mungkin mereka tetap menegur.				

		Informan 8	Memang orang-orang atau oknum ini, kecanduan merokok. Sehingga karena tidak biasa, memang perlu penyesuaian. Diarahkan untuk merokok diruangan merokok				
		Informan 9	Kalau ada yang merokok ditempat umum biasa kami foto, kami kirim melalui group kami, baru itu ditegur langsung oleh pak bupati dan memang pak bupati langsung merespon.				
3	Dukungan Bupati Maros dalam pelaksanaan KTR	Informan 1	Pak Bupati sangat mendukung, pertama beliau yang mengeluarkan perda, kedua beliau tidak merokok, ketiga sudah menyediakan sarana dan prasarana pendukung perda.	Semua informan menyatakan Bupati Maros sangat mendukung adanya perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Bentuk dukungan tersebut seperti menyediakan ruangan khusus untuk merokok,	Sangat mendukung, menyediakan sarana dan prasarana, bupati biasa melakukan Sidak dengan Satpol PP.	Dukungan pejabat sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan sebuah peraturan daerah. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu	Bupati Maros sangat mendukung implementasi Perda Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 dengan menyediakan sarana pendukung, menegur orang

		Informan 2	Waktu di awal-awal adanya perda ini, beliau yang menegur langsung pegawai yang masih merokok diruangan kerja, jadi pasti sangat mendukung.	menyediakan sarana informasi seperti poster, spanduk, sticker, papan bicara dan sebagainya. Bupati Maros juga sering melakukan sidak bersama Pol PP untuk penegakan perda Kawasan Tanpa Rokok.		program sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.	yang merokok dan melakukan sidak.
		Informan 3	Sangat mendukung, ketika sosialisasikan perda ini, sudah dibuatkan juga ruangan khusus merokok. Bahkan Pak Bupati biasa melakukan sidak.				
		Informan 4	Saya rasa pak bupati sangat mendukung, diaikan tidak merokok jadi memberi contoh yang baik. Kalau ada pegawai yang merokok pasti ditegurinya.				
		Informan 5	Mendukung sekali, biasaki pak bupati keliling itu bersama Pol PP untuk mengecek setiap ruangan.				
		Informan 6	O, kalau pak bupati itu, setiap perda akan berusaha untuk dilaksanakan dengan baik, kan ini untuk kepentingan bersamaji.				

		Informan 7	Pak Bupati mendukung ini perda, beliau menjadi contoh untuk tidak merokok disini.				
		Informan 8	Selama ini pak bupati sangat mendukung, kan beliau yang mengeluarkan perda ini. Waktu awal-awal kami juga dipanggil untuk membahas sarana dan prasarananya.				
		Informan 9	Sangat besar, Pak Bupati dukungannya sangat besar, karena beliau memang tidak merokok, beliau memasang pamphlet-pamphlet di setiap kantor.				

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi KTR	Informan 1	Nda paham saya kalau masalah SOP nya. Saya kira di situ, tapi kelihatannya, terus terang saya tidak masuk dalam struktur komite itu nda paham.	Sebagian besar informan menyatakan ada Standar Operasional (SOP) dalam mengimplementasikan perda Kawasan Tanpa Rokok. Informan yang lain menyatakan hanya	Ada SOP, hanya petunjuk pelaksanaan, tidak faham kalau ada SOP.	SOP merupakan petunjuk pelaksanaan yang memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan. SOP merupakan dokumen	SOP sudah ada dan telah dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11

		Informan 2	Petunjuk pelaksanaan yang ada, biasanya tertulis di Perda nya dan disampaikan ke seluruh staf, itumi juga SOP nya.	petunjuk pelaksanaan yang ada. Dan yang lain menyatakan tidak paham kalau ada SOP.		yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang sudah baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan yang berperan dalam kegiatan (Insani, 2010).	Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
		Informan 3	SOP pasti ada ini. Yang tangani ini tentunya bagian hukum, Satpol PP juga karena dia yang menangani langsung turun menyidak.				
		Informan 4	Iya ada, kadang-kadang kalau ada yang merokok diruang publik, kita kasi peringatanlah kalau ini kawasan tidak boleh merokok.				
		Informan 5	Saya kira ada SOP nya, ada di Pol PP itu. Kalau sepengetahuan saya SOP itu ya seperti tidak boleh merokok diruangan kerja, atau di area kantor bupati ini.				
		Informan 6	SOP nya ada itu saya rasa Pol PP sudah mengetahuinya, seperti menegur atau mengingatkan bila masih ada ASN yang merokok di dalam kantor bupati.				
		Informan 7	Saya kira mereka sudah cukup baik dalam				

			melaksanakan SOPnya.				
		Informan 8	SOP nya harus dirembukkan dulu bersama, kalau kita mau patroli siapkan mobil, siapkan sempritan, siapkan berkas perdanya, siapkan berapa jumlah personil, siapkan ini dan itu.				
		Informan 9	Ada SOP nya, kami sudah mengawal dengan baik.				
2	Penyebaran tanggung jawab implementasi KTR	Informan 1	Ada himbauan dan contoh dari para pimpinan, itu intinya disitu. Para pimpinan seperti kabag, asisten tidak merokok di dalam ruangan.	Sebagian besar informan menyatakan bahwa sesama pegawai harus saling menegur bila ada yang melanggar perda Kawasan Tanpa Rokok. Setiap pegawai harus bertanggung jawab pada peraturan daerah ini dan berusaha untuk menaatinya. Informan lain menyebutkan tanggung jawab untuk menegakkan perda KTR ini adalah Satpol PP.	Sesama pegawai harus saling menegur bila ada yang merokok, setiap pegawai bertanggung jawab, tanggung jawab melaksanakan perda adalah Satpol PP.	Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Untuk itu dibutuhkan penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena dengan demikian implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh berbagai unit pemerintahan,	Pegawai di Kantor Bupati Maros mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
	Informan 2	Tapi sesama kita pegawai disini, kalau saya, saya tegur pak orang yang merokok dalam ruangan.					
	Informan 3	Perda ini ditujukan untuk semua orang, atau ASN yang ada disini, jadi sebaiknya masing-masing bertanggung jawablah untuk melaksanakannya.					

		Informan 4	Setiap pegawai seharusnya bisa bertanggung jawab terhadap peraturan daerah yang ada.			namun dengan tetap pada kontrol yang sama agar kebijakan yang dilaksanakan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.	
		Informan 5	Tanggung jawabnya kembali kepada setiap ASN, ada yang menaati ada juga yang masih bandel.				
		Informan 6	Pol PP sebagai penegak perda, mereka yang mengimplementasikan. Setiap pegawai juga harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perda KTR.				
		Informan 7	Biasanya kalau ada perda, akan ke bagian hukum. Penegak perda itu adalah Pol PP, kami menyampaikan bahwa ada aturan seperti ini dan mereka akan melaksanakannya.				
		Informan 8	Sebelum patroli saya kumpulkan dulu kemudian saya ingatkan kembali ke mereka tentang tugasnya yang harus dilaksanakan.				

		Informan 9	Setiap hari diatur jadwal, namanya mutasi, disamping dia tulis di mutasinya dia juga melapor sama saya, saya lapor ke atasan saya.				
--	--	------------	--	--	--	--	--

5. Tanggapan dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informasi	Informan	Jawaban Informan (Data Emik)	Reduksi	Konsep Emik (Kata Kunci)	Konsep Etik (Aturan / Kebijakan)	Proposisi
1	Hambatan dalam implementasi KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 1	Hambatannya di ASN yang masih merokok di tempat yang dilarang. Selain itu penerapan sanksi yang belum ditegakkan.	Sebagian besar informan menyatakan kalau yang menjadi hambatan dalam implementasi perda Kawasan Tanpa Rokok ini adalah masih adanya oknum pegawai yang mencuri kesempatan untuk merokok dalam lingkungan Kantor Bupati Maros. Informan lain menyatakan bahwa belum diterapkannya pemberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang ditemukan merokok dalam area KTR.	Masih ada ASN yang merokok, sanksi belum ditegakkan.	George C. Edward III mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Suratman, 2017)	4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan sudah terpenuhi sehingga Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Maros sudah cukup berhasil.
		Informan 2	Kalau hambatan tidak adaji yang terlalu, ya itu mungkin masih ada pegawai yang nakal yang kadang masih merokok di pinggir jalan keluar kantor.				
		Informan 3	Selama ini kalau saya lihat berjalan dengan baikji. Kecuali mungkin bagi perokok berat, masih adaji kadang yang merokok di lorong-lorong itu.				

		Informan 4	Masih adanya ASN yang merokok dalam lingkungan kantor bupati, perlu lebih ditingkatkan lagi penegakan perda ini, bisa di sanksinya dan bisa juga di pengawasannya.				
		Informan 5	Pemberian sanksi saya kira belum, inikan untuk penyadaran, khusus untuk tempat-tempat merokok itu yang belum.				
		Informan 6	Tidak adaji hambatan, kesadaran yang tinggi untuk tidak merokok diruangan. Kita berterima kasih kepada pak bupati atas munculnya ini aturan, karena disamping juga itu memang kita disuruh sehat.				
		Informan 7	Saya kira kesadaran dari perokok ini yang perlu ditingkatkan, agar mereka tidak lagi merokok dalam lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah ditetapkan.				

		Informan 8	Tapi itu juga kadang-kadang namanya manusia yang disiplinnya macam-macam, masih ada 1 atau 2 oknum pegawai yang merokok, susah juga jadinya.				
		Informan 9	Kalau masalah hambatan sih, ya ada. Kemarin saya menegur seorang kepala dinas, cuman ada trik tersendiri, jadi harus fleksibel, menegur seorang atasan.				
2	Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok	Informan 1	Aturan ini bagus, jadi seharusnya semua orang bisa melaksanakannya. Kesadaran sendirilah sehingga kita tidak melanggar aturan ini.	Dari hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa sudah ada usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi perda KTR. Usaha seperti saling mengingatkan/menegur bila ada yang merokok, pembuatan media informasi tentang larangan merokok, menyediakan ruangan khusus bagi perokok dan melakukan sidak. Ada juga yang menyatakan	Ada usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, dibutuhkan kesadaran dari semua pegawai untuk mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Bab III, diatur tentang kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, di antaranya wajib membuat dan memasang tanda / petunjuk / peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok dan wajib memberikan	Sudah ada usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan pegawai untuk menciptakan Kawasan Tanpa Rokok.
	Informan 2	Kalau usaha, saya biasa mengingatkan teman-teman disini yang merokok supaya keruangan yang sudah disediakan.					
	Informan 3	Banyak pak usaha yang sudah dilakukan, adami dibuat papan bicara, poster, tanda larangan merokok, ruangan khusus merokok.					

Informan 4	Ada sosialisasi, sudah banyak dibuat media-media supaya orang tidak merokok.	bahwa yang paling penting adalah kesadaran dari semua pegawai untuk menaati aturan yang sudah dibuat.	teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.
Informan 5	Menurut saya yang penting itu kesadaran dari perokoknya, mereka bisa melihat, membaca itu tanda larangan merokok, banyak dibikin dan sudah dipasang.		
Informan 6	Saya sendiri merokok pak, tapi kalau mau merokok, saya ke ruangan merokok. Kalau ada saya lihat merokok, saya ingatkan itu pak.		
Informan 7	Kita biasa sosialisasikan kembali perda-perda yang ada, termasukmi perda rokok ini.		
Informan 8	Kami sidak bersama bupati, ada asbak atau rokok, akan kami sita. Bupati langsung menegur. Satpol PP juga memasang tanda larangan merokok di semua perkantoran.		
Informan 9	Saya sama teman-teman biasa keliling, kalau kami melihat ada yang merokok, kami tegur dengan cara yang baik.		

3	Bagaimana implementasi KTR di Kantor Bupati Maros	Informan 1	Pelaksanaan perda ini berhasil karena orang sudah tahu bahwa disini tidak boleh merokok, kalau merokok sudah ada fasilitas tempat merokok.	Dari hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa implementasi KTR di Kantor Bupati Maros sudah berhasil dilaksanakan. Ada juga informan yang menyatakan implementasi KTR masih perlu ditingkatkan dan terus disosialisasikan.	Implementasi KTR di Kantor Bupati Maros sudah berhasil dilaksanakan, sudah ada perubahan sejak diberlakukannya perda KTR, masih diperlukan peningkatan dalam implementasinya.	Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok melarang siapa pun melakukan kegiatan merokok di dalam lingkungan perkantoran / tempat kerja.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. (KTR) di Kantor Bupati Maros sudah berjalan dengan baik, tapi harus tetap ditingkatkan dan terus disosialisasikan.
		Informan 2	Implementasi perda ini cukup berhasil, kita sudah jarangmi melihat orang yang merokok di ruangan, kalau ada kita tegur.				
		Informan 3	Alhamdulillah, di kantor bupati sendiri itu sudah terimplementasi dengan sangat baik.				
		Informan 4	Masih perlu ditingkatkan agar perda ini benar-benar bisa ditegakkan, karena masih ada yang merokok di lorong-lorong dalam kantor.				
		Informan 5	Cukup berhasil, setelah adanya perda ini, mengatur area mana saja tidak boleh merokok, berkurangmi orang yang merokok di ruangan, udara lebih bersih juga.				

		Informan 6	Sudah berjalan dengan baik dan cukup berhasil, karena tidak ada lagi pegawai yang merokok dalam ruangan kerja, mereka sudah merokok ditempat yang sudah disediakan				
		Informan 7	Kalau menurut saya artinya itu tadi, di gedung2 pemerintahan ini, itu sudah berhasil 80-90%.				
		Informan 8	Kalau keberhasilan ada presentasinya ya, tapi paling tidak ada perubahan. Nah untuk memaksimalkan memang harus ada pengawasan secara rutin, berkala dan berkelanjutan.				
		Informan 9	Saya berfikir perda dilarang merokok ini sangat berhasil.				

Lampiran 14. Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Pribadi**

Nama Lengkap : Asrul Arif
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / Tanggal Lahir : Majennang, 21 April 1977
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Vila Mutiara Jelita V No. 7 Kel. Bulurokeng, Kota Makassar
Telepon / HP : 081 317 441 357
E-mail : acculyoi21@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 168 Kec. Suppa, Pinrang
SMP : SMP Negeri 1 Kec. Suppa, Pinrang
SMA : SMA Negeri 1 Pare-Pare
S1 : FKM Unhas/AKK
S2 : FKM Unhas/Promosi Kesehatan